

**Implementasi CSR *First Resources Ltd* dalam Pemanfaatan Lahan
Tanam bagi Penduduk Sekitar Lingkungan Industri Provinsi Riau**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu
Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Ilmu Komunikasi



NATASIA NURWITASARI

14321124

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

YOGYAKARTA

2018

SKRIPSI

**Implementasi CSR *First Resources Ltd* dalam Pemanfaatan Lahan Tanam
bagi Penduduk Sekitar Lingkungan Industri Provinsi Riau**

Disusun Oleh :



Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi untuk diajukan dan dipertahankan
dihadapan tim penguji skripsi

Tanggal : 06 JUN 2018

06 JUN 2018

Dosen Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nadia Wasta Utami'.

Nadia Wasta Utami, S.I.Kom., M.A.

NIDN 0505068902

SKRIPSI

**Implementasi CSR *First Resources Ltd* dalam Pemanfaatan Lahan Tanam
bagi Penduduk Sekitar Lingkungan Industri Provinsi Riau**

Disusun Oleh

NATASIA NURWITASARI

14321124

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

06 JUNI 2018

Tanggal _____

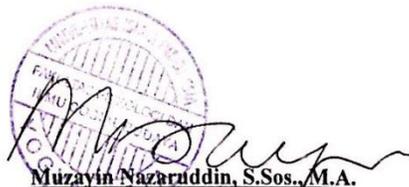
Dewan Penguji

1. Ketua Nadia Wasta Utami, S.I.Kom., M.A. ()
NIDN 0505068902
2. Anggota Sumekar Tanjung, S.Sos., M.A. ()
NIDN 0514078701

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia


Muzayin Nazaruddin, S.Sos., M.A.
NIDN 0516087901

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Natasia Nurwitasari

No. Mahasiswa : 14321124

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Judul Skripsi : Implementasi CSR *First Resources Ltd* dalam Pemanfaatan Lahan Tanam bagi Penduduk Sekitar Lingkungan Industri Provinsi Riau

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan berlaku di Universitas Islam Indonesia
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 20 Juni 2018

Yang menyatakan



(Natasia Nurwitasari)

NIM 14321124

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillah Rabbil' alamin

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayah-Nya, serta memberikan nikmat yang berharga sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan.

Karya sederhana ini dipersembahkan untuk orang-orang terdekat di hati yang selalu memberikan doa yang tiada hentinya, dukungan, kepercayaan, dan kasih sayang

Ayahanda Heru Subagio dan Ibunda Ira Ekawati

Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, perhatian, pengorbanan dan semua dukungan yang telah diberikan selama ini. Semoga saya bisa selalu memberikan kebahagiaan untuk mama dan papa tercinta.

Kakakku Prieska Herwitasari

Terima kasih untuk segala doa, dukungan, kasih sayang yang telah diberikan. Terimakasih telah selalu menjaga dan menjadi teman baik sedari kecil.

Sahabat-sahabatku Tersayang

Terima kasih telah memberikan segala doa, kasih sayang, dukungan dan telah menemani setiap hari-hariku.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S. Al-Insyirah ayat 5 – 6)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٣﴾

“Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan?”
(Q.S. Ar-Rahman ayat 13 – 77)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil 'alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkannya kepada kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan tepat waktu, skripsi tersebut berjudul “IMPLEMENTASI CSR *FIRST RESOURCES LTD* DALAM PEMANFAATAN LAHAN TANAM BAGI PENDUDUK SEKITAR LINGKUNGAN INDUSTRI PROVINSI RIAU” yang mana melalui penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi kegiatan CSR *First Resources Ltd* terutama pada program pemanfaatan lahan tanam perusahaan untuk masyarakat.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Dalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang mana telah membantu penulis dalam banyak hal. Oleh sebab itu penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan ridho-Nya serta kemampuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Bapak Muzayin Nazaruddin, S.Sos, M.A. , selaku ketua Prodi Ilmu Komunikasi yang banyak membantu penulis dalam persoalan kuliah di Universitas Islam Indonesia
3. Ibu Nadia Wasta Utami. S.Ikom, M.A, dosen pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing dan selalu mendukung penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

4. Ibu Sumekar Tanjung, S.Sos, M.A. selaku dosen pembimbing akademik yang menjadi wali penulis selama kuliah di Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia.
5. Seluruh Dosen dan karyawan Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak pengetahuan dan motivasi kepada penulis dengan kesabaran dan keikhlasan selama menjalani proses perkuliahan.
6. Papa Heru Subagio dan Mama Ira Ekawati. Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis sebagai tanda hormat bakti dan kasih sayang penulis. Terimakasih tak terhingga untuk orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun hingga pada akhirnya penulis sampai ditahap ini.
7. Kakak Prieska Herwitasari yang selalu memberikan dukungan dan doa sehingga penulis lebih bersemangat dalam menyelesaikan skripsi.
8. Pranata Rahajie Putranto, terimakasih atas dukungan, kasih sayang dan nasehat yang selalu memotivasi penulis untuk menjadi lebih baik dalam segala hal.
9. Sahabat-sahabat di kota Jogja Azhara Nurul Qisthina, Dimitri Sricessya Dina, Sari, Putri Khaira, Silvia Dwi Puspita dan Reygita Afriyani Jayusman. Terima kasih telah menjadi keluarga dan telah menemani penulis dari awal kuliah hingga akhir. Terimakasih selalu menerima kekurangan penulis dan tidak pernah meninggalkan penulis disaat keadaan sedih dan senang..
10. Sahabat-sahabat tersayang Bobby Salim Malik, Misella Yanistasa Sinaga, Nabila Farah Diba, Elsi Renhar, Nadia Siregar, Silvia Dwi Puspita, Siti Shara Paxia dan Jansen Kanggeraldo. Terimakasih telah mewarnai hari-hari penulis

mulai dari masa SMA hingga sekarang. Semoga persahabatan kita akan selalu terjalin dan kalian akan selalu menjadi kenangan termanis untuk penulis.

11. Untuk Irvan Meidi, Amelda, Fikran, Pramitha dan Amanda. Terimakasih atas dukungan, canda tawa serta motivasi yang selalu diberikan kepada penulis.
12. Teman-teman keluarga besar Ilmu Komunikasi angkatan 2014, terimakasih atas kebersamaan yang terjalin selama 4 tahun masa kuliah ini, semoga kita selalu dapat menjaga silaturahmi.
13. Sahabat KKN unit 210 dusun Kenyaen 1, Iqbal, Anggie, Deny, Hanida, Rizky, Zam, Putri dan Anggra. Terimakasih untuk 30 hari yang sangat berkesan dalam hidup penulis.
14. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa atas terselesaikannya tugas akhir ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala kebaikan kalian semua. Semoga Allah selalu menyertai langkah kalian dan membalas semua kebaikan kalian semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah disusun ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan yang tidak disengaja tersebut menyinggung satu dan lain pihak dan semoga ini dapat membawa manfaat bagi semua pihak yang berakitan.

Wassalamu'alaikum

Wr.Wb.

Yogyakarta 20 Juni 2018

Natasia Nurwitasari

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	I
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
ABSTRAK	
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Kerangka Konsep	12
G. Metode Penelitian	23
BAB II GAMBARAN UMUM	27
A. Profil Perusahaan <i>First Reources Ltd</i>	27
B. Profil PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PT.PISP)	31

BAB III TEMUAN PENELITIAN	37
A. <i>Corporate Social Responsibility (CSR) First Resources Ltd</i> Wilayah Riau....	38
B. Pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) dalam Pemanfaatan Lahan Tanam bagi Penduduk Sekitar Wilayah Industri <i>First Resources Regional</i> Riau.....	44
C. Implementasi Program Kemitraan KKPA di Tengah Masyarakat Riau.....	64
BAB IV PEMBAHASAN	79
A. Analisis Program <i>Corporate Social Responsibility (CSR) First Resources Regional</i> Riau.....	81
B. Program Kemitraan Pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) Sebagai Program Pemanfaatan Lahan Tanam <i>First Resources Regional</i> Riau.....	84
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Keterbatasan Penelitian	107
C. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	113

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Petani KKPA PT. PISP	35
Tabel 2.2 Daftar Koperasi PIR-TRANS Binaan PT. PISP	36
Tabel 3.1 Profil Narasumber	37
Tabel 3.2 Syarat-syarat Keanggotaan Kebun Kemitraan Pola KKPA.....	51
Tabel 3.3 Rangkuman Wawancara Petani Binaan Program Kemitraan Pola KKPA PT. PISP	64
Tabel 3.4 Perbedaan Petani PIR-TRANS dengan Petani KKPA	68
Tabel 4.1 Elemen-elemen Dimensi Filantropis pada Program CSR <i>First Resources</i> Regional Riau.....	82
Tabel 4.2 Analisis SWOT CSR dalam Pemanfaatan Lahan Tanam pada Program Kemitraan Pola KKPA <i>First Resources</i> Regional Riau.....	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo <i>First Resources Ltd</i>	28
Gambar 3.1 Para Karyawan Baru Mengikuti Pelatihan Di <i>First Resources Learning Center</i> Kubang, Pekanbaru-Riau	57
Gambar 3.2 Lokasi Pabrik PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PT. PISP), Anak Perusahaan Milik <i>First Resources Ltd Regional Riau</i>	60
Gambar 3.3 Wawancara dengan Pihak Bank Riau Kepri di Koperasi Mulya Mandiri di Desa Rambah Hilir Tengah, Kabupaten Rokan hulu, Riau.....	63
Gambar 3.4 Wawancara dengan Masyarakat Petani, Lokasi Koperasi KKPA Mulya Mandiri di Desa Rambah Hilir Tengah, Kabupaten Rokan hulu, Riau	70
Gambar 3.5 Wawancara dengan Petani Koperasi PIR-TRANS.....	73
Gambar 3.6 Lokasi Koperasi KKPA Rizki Abadi Desa Kepayang Kabupaten Rokan Hulu, Riau.....	78

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.2 Nilai dan pedoman <i>First Resources Ltd</i>	30
Bagan 2.3 Struktur Organisasi <i>First Resources</i> Regional Riau	31
Bagan 2.4 Struktur Organisasi Perkebunan PT. PISP	33
Bagan 4.1 Hubungan integratif <i>Triple Bottom Line</i> pada <i>First Resources</i> Regional Riau	86

ABSTRAK

Banyaknya jumlah perusahaan yang bergerak di industri perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu alasan terjadinya fenomena kabut asap yang kerap kali melanda wilayah Provinsi Riau hampir setiap tahunnya. First Resources Ltd menjadi salah satu perusahaan yang menjalankan bisnisnya di wilayah Riau dan berdasarkan peraturan pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial perusahaan (CSR), First Resources Ltd dalam menjalankan kegiatan bisnisnya turut serta melaksanakan kewajiban sosial yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup sebagai upaya untuk mengurangi dampak kabut asap dan sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian. Penelitian ini mengambil beberapa pihak narasumber yang berpartisipasi dalam program-program CSR milik First Resources termasuk dengan program pemanfaatan lahan tanam perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja macam-macam kegiatan CSR First Resources Ltd dan bagaimana implementasi program pemanfaatan lahan tanam sebagai bentuk dari kegiatan *Corporate Social Responsibility* oleh First Resources Ltd.

Hasil yang ditemui dalam penelitian ini adalah First Resources Ltd khususnya di wilayah Riau memiliki empat bidang program kegiatan CSR, yaitu (1) kegiatan CSR dalam bidang ekonomi, (2) CSR dalam bidang sosial budaya, lingkungan dan kesehatan (3) CSR dalam bidang pendidikan dan (4) CSR dalam bidang infrastruktur. Selain itu terdapat salah satu program di luar divisi CSR yang implementasinya sesuai dengan unsur-unsur CSR. Program tersebut berupa pemanfaatan lahan tanam milik perusahaan yang disebut dengan Program Kemitraan Pola KKPA. Program KKPA meliputi unsur tanggung jawab sosial serta tanggung jawab ekonomis dalam pelaksanaannya. Adanya strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitar industri Provinsi Riau serta peran First Resources Ltd untuk turut serta mendukung keberlangsungan pelestarian lingkungan hidup merupakan wujud dari tanggung jawab sosial perusahaan disamping memperoleh keuntungan ekonomis dalam kegiatan bisnisnya

Kata Kunci : *Corporate Social Responsibility*, Pemanfaatan Lahan Tanam

ABSTRACT

The large quantity of companies which engaged in the oil palm plantation industry is one of the reason why Haze's phenomenon occurred in Riau Province almost every years. First Resources Ltd is one of co the company which runs its business in Riau Province. Based on the Government regulation about Corporate Social Responsibility (CSR), First Resources Ltd conducts its business activities to implement the social obligations related to environmental conservation in an effort for reducing the impact of haze phenomenon. Also, they help to improve the welfare of the community.

This research is a qualitative research which conduct direct interviews to the relative parties and has a purpose to acknowledge the implementation of the farm land utility program as form of Corporate Social Responsibility program by First Resource Ltd. The interviews are conducted by receiving such as information from the corporate, the bank, and the people who interact with the program. The purpose of this research is to know what kind of CSR First Resources Ltd activities and how the implementation of land use program as a form of Corporate Social Responsibility activities by First Resources Ltd.

The results of this research are First Resources Ltd, especially in Riau region has four areas of CSR program activities, Which are (1) CSR activities in economy, (2) CSR in the field of social culture, environment and health (3) CSR in education and (4) CSR in infrastructure. In addition, there is one program outside the CSR division that implementation in accordance with the elements of CSR. The program is in the form of utilization of planting land belonging to the company called KKPA Pattern Partnership Program. KKPA program includes elements of social responsibility and economic responsibility in the implementation. The existence of the strategies to improve the welfare of the people in the area around the Riau Province industry and the role of First Resources Ltd. to participate in supporting the sustainability of environmental conservation are the manifestation of corporate social responsibility in addition to obtain economic benefits in business activities.

Keywords : Corporate Social Responsibility, utilization of planting land

BAB I

1.1 Latar Belakang

Permasalahan lingkungan merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dipungkiri untuk terjadi. Faktor alam menyumbang peran dalam permasalahan lingkungan contohnya kasus fenomena kabut asap. Kabut asap sejatinya merupakan salah satu fenomena tahunan yang biasa terjadi di wilayah Sumatera khususnya Provinsi Riau. Kabut asap tidak lain sebagai dampak dari kebakaran hutan yang disebabkan oleh pengaruh cuaca musim kemarau. Menurut data yang diperoleh dari Majalah Tempo, 19 April 2017. Data menunjukkan sebanyak tujuh puluh persen daratan di Riau merupakan lahan gambut, jika dalam waktu sepekan tidak turun hujan maka tanah yang gambut akan kering dan berpotensi terjadi kebakaran.¹

Selain faktor alam, kebakaran hutan dan lahan yang selama ini terjadi di Riau diakibatkan unsur kesengajaan. Kebiasaan masyarakat membuka lahan dengan cara membakar membuat bencana kabut asap berkepanjangan melanda Riau. Kebakaran lahan tidak akan terjadi jika masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Melihat kondisi alam yang memiliki potensi untuk terjadi kebakaran lahan serta didukung pula dengan kebiasaan masyarakat yang senang membuka lahan dengan cara membakar sehingga menjadikan penyebab kabut asap menjadi kian kompleks.

Terhitung sekitar 410 jumlah perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau menambah angka titik kebakaran hutan di wilayah tersebut sehingga dampak yang dirasakan cukup besar bagi masyarakat Provinsi Riau.² Dampak terbesar yang dirasakan masyarakat Riau adalah dampak bagi kesehatan

¹ <https://www.tempo.co/topik/masalah/14/asap-dan-kebakaran-hutan> /diakses pada tanggal 23 April 2017 pukul 13.33 WIB

² <http://www.dipenda.pekanbaru.go.id/dari-410-cuma-22-perusahaan-sawit-di-riau-kantongi-sertifikat-ispo/> diakses pada tanggal 23 April 2017 pada pukul 14.40 WIB

yang menyerang masyarakat sehingga sekolah-sekolah memilih untuk meliburkan murid-muridnya sampai dengan ditemui rumah sakit-rumah sakit yang selalu penuh dengan pasien dengan keluhan ISPA mulai dari pasien usia dewasa hingga anak-anak. Di samping dampak kesehatan, dampak ekonomi pun turut hadir karena aktivitas diluar ruangan menjadi sangat terbatas sehingga menyebabkan berbagai kegiatan ekonomi menjadi semakin terganggu.

Salah satu upaya untuk mengurangi dampak masalah lingkungan yang terjadi di Provinsi Riau, setiap perusahaan diwajibkan untuk turut bertanggung jawab atas pelestarian lingkungan sesuai dengan etika bisnis perusahaan yang disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dimana etika bisnis ini harus diimplementasikan sebagai suatu kebijakan dan program yang tujuannya memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar dalam segi ekonomi, sosial dan politik.³ CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang menuntut suatu perusahaan mengalokasikan dana untuk berjalannya program CSR sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 74 ayat (1) UU 40 tahun 2007 yang menjelaskan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”

Perusahaan perlu menyadari bahwa sesungguhnya lingkungan merupakan mitra yang sangat potensial untuk perkembangan perusahaannya di masa yang akan datang dan juga di saat ini sehingga kegiatan CSR dinilai memberikan manfaat bagi jangka pendek maupun jangka panjang. Maka dari itu perusahaan dianggap perlu untuk menerapkan program-program CSR. Kegiatan-kegiatan CSR juga dianggap sebagai bentuk perwujudan rasa kepedulian organisasi terhadap mitranya yaitu lingkungan sekitar.⁴

³ Nasdian, Fredian Tonny. 2014. “*Pengembangan Masyarakat*”. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 248.

⁴ Duha, Timotius. 2016. “*Perilaku Organisasi*”. Yogyakarta : Deepublish, 13.

Tidak sedikit perusahaan-perusahaan besar di bidang kelapa sawit menanamkan modalnya di kawasan sekitar daerah Riau, salah satunya sebuah perusahaan kelapa sawit *First Resources Ltd*. *First Resources Ltd* merupakan perusahaan kelapa sawit yang saat ini beroperasi di wilayah Kalimantan dan Sumatera yang salah satunya berada di Provinsi Riau. Kegiatan operasi inti dari perusahaan ini adalah untuk memproduksi tandan buah kelapa sawit yang kemudian akan diolah menjadi minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan mengolah inti sawit yang akan dijual secara lokal maupun untuk diekspor ke luar negeri. *First Resources Ltd* ini berdiri sejak tahun 1992 dan sahamnya telah terdaftar dalam Bursa Efek Singapura sejak tahun 2007, menurut data dalam website resmi milik *First Resources Ltd*, perusahaan ini tercatat memiliki perkebunan dengan luas area 170.596 hektar yang terdiri atas kebun inti 148.727 hektar dan plasma 21.869 hektar serta mengoperasikan 12 pabrik kelapa sawit di wilayah Sumatera dan Kalimantan pada akhir tahun 2013.⁵

First Resources memiliki anak-anak cabang perusahaan di wilayah Kalimantan dan Sumatera khususnya Riau. Untuk wilayah Riau, *First Resources* lebih dikenal dengan sebutan *First Resources Regional Riau*. *First Resources Regional Riau* terdiri dari 27 anak perusahaan yang bergabung di dalamnya. Sebagai perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, keseluruhan anak perusahaan *First Resources Regional Riau* turut serta melakukan kegiatan operasi di bidang yang serupa dengan induk perusahaannya yaitu kelapa sawit. PT. PISP merupakan salah satu anak perusahaan yang tergabung dalam *First Resources Regional Riau*. PT. PISP berlokasi di desa Kepenuhan Barat Mulia Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Berdasarkan pernyataan General Manager PT. PISP, Ir. Nuryadi, PT. PISP telah melaksanakan kewajiban CSR sejak tahun 2003 terutama dalam bidang pendidikan. Selain itu PT. PISP turut serta melaksanakan tanggung jawab sosial

⁵ <http://www.first-resources.com/> diakses tanggal 6 April 2017 pada pukul 20.30 WIB.

perusahaan (CSR) dalam bidang lain seperti pembangunan infrastruktur untuk kegiatan ibadah, pembangunan gedung sekolah dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya.⁶ Selain melaksanakan kegiatan CSR dalam bidang infrastruktur dan pendidikan, PT. PISP seperti halnya anak-anak perusahaan *First Resources* lainnya, turut serta melaksanakan program kemitraan berupa pemanfaatan lahan tanam milik perusahaan untuk masyarakat yang berdomisili di sekitar lingkungan perusahaan.

Penelitian ini menarik untuk diteliti karena disamping memiliki luas hektar dan jumlah pabrik yang terbilang sangat besar, *First Resources Ltd* memiliki program CSR yang berkaitan dengan pengelolaan lahan untuk masyarakat sekitar lingkungan industri. Dengan adanya program tersebut masyarakat dapat memanfaatkan lahan milik perusahaan untuk digunakan secara pribadi. Melihat fenomena pengelolaan lahan perusahaan oleh masyarakat tersebut peneliti tertarik untuk melihat bagaimana program CSR yang dilakukan *First Resources Ltd* tentang pengelolaan lahan dan bagaimana masyarakat sekitar lingkungan industri memanfaatkan program tersebut. Sesuai dengan bidang operasi perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan kegiatan operasional perusahaan yang selalu dikaitkan dengan isu lingkungan, program tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut karena mengingat eksistensi perusahaan yang telah mencapai lebih dari seperempat abad, tentunya tidak terlepas dari bagaimana konsistensi perusahaan dalam menjalin hubungan dengan lingkungan sekitarnya melalui program-program CSR yang dapat memberdayakan warga sekitar lingkungan industri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

⁶<http://riauterkini.com/usaha.php/sosial.php?arr=104810&judul=%20PT.%20PISP%20Kepenuhan%20Ikut%20Cerdaskan%20Anak%20Rohul%20Melalui%20Program%20CSR> diakses pada tanggal 8 April 2017 pada pukul 10.00 WIB

1. Apa saja program-program *CSR First Resources Ltd* untuk penduduk sekitar lingkungan industri di Riau tersebut?
2. Bagaimana penerapan pemanfaatan lahan tanam sebagai strategi *CSR First Resources Ltd* terhadap penduduk disekitar lingkungan industri di Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apa saja kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh *First Resources Ltd* serta penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana implementasi program pemanfaatan lahan tanam perusahaan sebagai salah satu program CSR yang dimiliki *First Resources Ltd*.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmiah seputar penelitian CSR perusahaan terutama pada bidang perkebunan kelapa sawit sehingga dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1). Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung oleh peneliti berupa pengalaman dalam observasi lapangan. Peneliti mendapatkan banyak informasi terkait tema penelitian sekaligus belajar untuk dapat bersosialisasi dengan baik kepada masyarakat.

2). Manfaat bagi Lembaga / Perusahaan

Setelah penelitian ini selesai dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan agar lebih banyak melakukan evaluasi terkait program-program CSR yang telah dilaksanakan agar dapat menjaga programnya dengan

baik dan memperbaiki kesalahan-kesalahan berdasarkan temuan yang ada di lapangan.

1.5 Kajian Pustaka

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menjadi pedoman penelitian selanjutnya agar penelitian selanjutnya dapat memperbanyak dan mendalami data penelitian dengan tema yang sama. *Corporate Social Responsibility* terdiri dari beberapa macam kegiatan yang berbeda-beda sesuai kebijakan dari perusahaan. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan seperti pada Penelitian berupa tugas akhir skripsi yang diteliti oleh Benedikta Thia Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2013 yang berjudul “Strategi Manajemen Isu PTPN XIII Kalimantan Barat (Studi Kasus Pada Isu Lingkungan Hidup Terhadap PTPN XIII).” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengetahui bagaimana strategi manajemen isu PTPN XIII dalam menangani isu lingkungan hidup yang sering kali menerpa perusahaan perkebunan. Dalam penelitian ini dijelaskan langkah-langkah dan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan sebagai strategi manajemen isu PTPN XIII dan aplikasi program kerja yang berjalan untuk mengelola isu-isu tersebut. Data primer yang diperoleh dari penelitian ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan. Adapun beberapa narasumber merupakan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan (PTPN XIII). Sedangkan data sekunder diperoleh melalui data online serta opini masyarakat sekitar lingkungan perusahaan.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah PTPN XIII Kalimantan Barat menyadari pentingnya memiliki dan mengatur pola strategi manajemen isu sebagai upaya untuk mengelola isu yang menimpa sebuah perusahaan. PTPN XIII menganggap strategi manajemen isu memiliki andil yang cukup besar untuk

memperbaiki citra diri sebuah perusahaan. Strategi yang digunakan PTPN XIII Kalimantan Barat sebagai salah satu perusahaan perkebunan terbesar di Indonesia adalah dengan melakukan sebuah seleksi atau menentukan fakta, keterangan serta argumen yang akan di sampaikan. Dalam tahapan ini, seluruh informasi yang berkaitan dengan isu lingkungan yang berkaitan dengan PTPN XIII Kalimantan Barat dikumpulkan melalui berbagai sumber informan dan lalu kemudian berita-berita tersebut dianalisis yang kemudian akan ditentukan program-program yang sesuai dan tepat sasaran untuk mengurangi dampak isu yang menimpa PTPN XIII Kalimantan Barat. Program-program tersebut disusun dan dijalankan dengan tujuan untuk meredam dan menyurutkan isu-isu negatif yang telah beredar di tengah-tengah masyarakat tentang PTPN XIII Kalimantan Barat. Salah satu program yang dijalankan adalah program tentang kelestarian lingkungan dimana PTPN XIII Kalimantan Barat secara rutin mempublikasikan berbagai macam kegiatan “*go green*” yang dijalankan perusahaan baik melalui media, website resmi, media lokal maupun media nasional. Aktivitas tersebut memerlukan sorotan media untuk dapat dikonsumsi publik guna meredam isu negatif sekaligus memberikan citra positif untuk perusahaan.⁷

Penelitian berikutnya merupakan jurnal komunikasi yang diteliti oleh Saladin Ghalib, Irwansyah, Yuanita Setyastuti dan Sri Astuty dari fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Penelitian dengan judul “*Community Relation* Perkebunan Kelapa Sawit Tanah Rawa di Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan” penelitian ini dinilai memiliki tema yang sesuai dengan membahas tentang *community relation* yang erat kaitannya dengan CSR dan penelitian ini menganalisa mengenai *community relation* pada sebuah perusahaan kelapa sawit tanah rawa. Menurut penelitian ini, semakin

⁷ Benedikta Thia “Strategi Manajemen Isu PTPN XIII Kalimantan Barat (Studi Kasus Pada Isu Lingkungan Hidup Terhadap PTPN XIII)” Skripsi Sarjana. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2013.

marak pembukaan lahan yang beralih fungsi untuk perkebunan kelapa sawit berskala besar yang kemudian menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat dan khususnya masyarakat yang bermukim di sekitar perkebunan kelapa sawit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif karena peneliti ingin menganalisis data secara lebih mendalam mengenai bagaimana *community relation* yang dilakukan perusahaan perkebunan dalam memelihara hubungan baik dan mengatasi konflik dengan masyarakat sekitar perkebunan. Dengan menggunakan tipe penelitian eksploratif yang dilakukan dengan memperoleh data dan mengkaji dengan mendalam tentang penemuan fakta, perencanaan dan pelaksanaan komunikasi dan aksi dalam *community relation* yang dilakukan perusahaan. Hasil dan temuan lapangan yang di dapatkan dari penelitian ini adalah ditemui data melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Kuala, jumlah perusahaan yang sudah memiliki izin lokasi sebanyak empat perusahaan dan bahkan 16 kecamatan yang ada di kabupaten Barito Kuala sudah dapat dipastikan menjadi perkebunan sawit selain Kecamatan Anjir Muara dan Anjir Pasar.

Fakta selanjutnya adalah selain usaha perkebunan yang dikembangkan oleh perusahaan swasta, beberapa komoditas yang sudah berkembang dan menjadi usaha bagi masyarakat setempat cukup banyak ditemui seperti karet, kelapa dalam, kelapa sawit dan purun dan dengan keberadaan perkebunan kelapa sawit oleh pengelola swasta, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga yang misalnya memiliki profesi awal sebagai pencari kayu dan menangkap ikan dan sebagai petani bisa beralih sebagai petani kelapa sawit karena 20% lahan perkebunan diperuntukkan bagi warga sebagai pola plasma kemitraan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat dan karyawan disekitar perkebunan kelapa sawit, ditemukan pernyataan bahwa dengan keberadaan perkebunan ini dinilai sangat baik karena dapat mengurangi pengangguran dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang bekerja disana, dimana dengan bekerja di perkebunan tersebut penghasilan yang diperoleh

berkisar Rp 2,500.000,- perbulan yang sebelumnya ketika belum bekerja di perusahaan penghasilan yang diperoleh pada awalnya sebagai petani hanya 100-200 belek pertahun. Berdasarkan hasil wawancara rata-rata masyarakat yang bekerja di perusahaan sawit di Kabupaten Barito Kuala merasakan dampak yang positif terhadap pemenuhan hidup mereka meskipun mereka menyadari bahwa lahan pertanian yang selama ini mereka garap untuk bertani semakin menyempit dengan keberadaan perusahaan kelapa sawit dan CPO nya. Hal ini menjadi perbandingan sebagai alat ukur masyarakat tentang ukuran terpenuhinya kebutuhan mereka yang sebelumnya ketika menggarap sawah sebelum adanya perusahaan kelapa sawit banyak kebutuhan yang tidak terpenuhi. Selain beberapa data lapangan yang bernilai positif, ditemui pula masih terdapat konflik internal dan eksternal yang berkaitan dengan pembebasan lahan, manajemen karyawan, persoalan batas area perkebunan, perizinan dan lain-lain yang menyebabkan kegiatan *community relation* menjadi terhambat.⁸

Penelitian berikutnya adalah penelitian dari tugas akhir skripsi yang berjudul “Implementasi Program Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) Melalui Pola Kemitraan Pada Sektor Privat (Studi Pada Unit Usaha Bekri, PTPN VII (Persero).” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi, analisis data dokumentasi dan wawancara. Melalui tiga teknik pengambilan data tersebut, peneliti akan mengetahui bagaimana implementasi program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan oleh PTPN VII (Persero). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, implementasi terdiri dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Pola kemitraan yang merupakan program pengembangan masyarakat ini bersifat simbiosis mutualisme atau

⁸ Ghalib Saladin, Irwansyah, Setyastuti, Astuti Sri. “*Community Relation* Perkebunan Kelapa Sawit Tanah Rawa di Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan.” *Journal Of Communication Studies*. Volume 2, Nomor 1. Tahun 2017

menguntungkan kedua belah pihak dan tidak hanya memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja.

Pada tahap pelaksanaannya, petani mitra mendapatkan bimbingan secara berkala dalam periode tiga bulan sekali, satu bulan sekali dan setiap hari oleh PTPN VII. Program kemitraan ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dari segi pendapatan, pendidikan dan penguatan organisasi lokal. Dalam konteks penanggulangan masalah, PTPN VII melakukan pertemuan bersama petani guna merumuskan bagaimana penyelesaiannya sehingga kebijakan yang di dapatkan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Pelibatan masyarakat petani dalam setiap keputusan yang diambil oleh PTPN VII dapat menciptakan rasa memiliki terhadap program kebijakan perusahaan. Hal ini berguna untuk menjaga hubungan kerjasama yang berlangsung dalam jangka panjang.⁹

Penelitian berikutnya merupakan skripsi dengan judul “Aktivitas Humas PT Perkebunan Nusantara V (Persero) Kantor Pusat Pekanbaru Dalam Membina Hubungan Dengan Publik Internal.” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dengan humas PTPN V. setelah melakukan pengamatan langsung ke lapangan serta wawancara kepada pihak humas PTPN V, di dapatkan data bahwa perusahaan membuat kebijakan yang tujuannya sebagai bentuk pendekatan terhadap publik internal, adapun kebijakan berupa pengumuman-pengumuman, buku yang disediakan dan dibuat khusus untuk pegawai, melakukan pertemuan secara berkala, membuat laporan kepada pemegang saham, memberikan fasilitas berupa hiburan serta wisata dan *study tour*, melakukan pelatihan dan member hadiah-hadiah berupa *reward* untuk karyawan yang berprestasi serta fasilitas kesehatan dan ibadah yang

⁹ Muhammad Guntur Purboyo. “Implementasi Program Pengembangan Masyarakat (Community Develepment) Melalui Pola Kemitraan Pada Sektor Privat (Studi Pada Unit Usaha Bekri, PTPN VII (Persero).” Skripsi Sarjana. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung tahun 2010.

keseluruhannya disediakan untuk karyawan perusahaan. Di dapatkan hasil yang memuaskan atas pelaksanaan aktivitas humas tersebut, oleh karena PTPN V merupakan perusahaan besar yang memiliki jumlah karyawan yang sangat banyak, aktivitas tersebut terbukti dapat menciptakan suasana harmonis dan menyenangkan diantara masing-masing karyawannya. Terbukti dengan data yang diperoleh saat peringatan HUT PTPN V yang ke-19 tahun pada tanggal 11 Maret 2015, perusahaan memberi Penghargaan Masa Kerja (PMK) untuk karyawan yang bekerja dengan baik, lalu hubungan harmonis antar karyawan tersebut tergambarkan dalam beberapa rangkaian acara seperti dalam pertandingan, perlombaan dan terlihat suasana semakin akrab karena masing-masing karyawan membawa serta anggota keluarga untuk bergabung dalam kegiatan perayaan ulang tahun PTPN V tersebut.¹⁰

Penelitian yang terakhir adalah “Strategi *Community Development Officer* (CDO) PT. Waru Kaltim Plantation (WKP) dalam menyelesaikan masalah *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kecamatan Waru Desa Bangun Mulya (Periode Januari - Desember 2015)” oleh Ismail dari fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman yang penelitiannya lebih menekankan kepada deskripsi bagaimana strategi CDO PT. Waru Kaltim dalam menyelesaikan masalah CSR di Kecamatan Waru Desa Bangun Mulya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui *key informan* dengan wawancara langsung dan observasi serta data sekunder melalui laporan kegiatan CSR, dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan.

¹⁰ Rino Haryadi “Aktivitas Humas PT Perkebunan Nusantara V (Persero) Kantor Pusat Pekanbaru Dalam Membina Hubungan Dengan Publik Internal.” Skripsi Sarjana. Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2015.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa strategi CDO PT. Waru Kaltim Plantation (WKP) dalam menyelesaikan masalah CSR di kecamatan Waru Desa Bangun Mulya (periode Januari – Desember 2015) sudah terlaksana cukup baik dengan selalu melakukan review atau evaluasi mengenai program-program CSR yang sudah terlaksana oleh perusahaan. PT. Waru Kaltim Plantation (WKP) melaksanakan program CSR secara konsekuen dan berkelanjutan yang bentuknya dirancang oleh CDO PT. Waru Kaltim Plantation (WKP) di kecamatan Waru dan memiliki dampak sosial maupun ekonomi di lingkungan tersebut, dampak yang ditimbulkan antara lain adalah terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, terjadinya hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pihak perusahaan melalui berbagai program-program yang dibuat oleh perusahaan. Program yang direncanng oleh PT. Waru Kaltim Plantation diwujudkan melalui program yang menuntut peran aktif masyarakat sekitar. Program tersebut diupayakan sebagai wujud perusahaan untuk turut serta mengembangkan dan memajukan masyarakat sebagai public eksternal. Adapun bentuk program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Waru Kaltim Plantation adalah dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang sosial.¹¹

1.6 Kerangka Konsep

Teori Penelitian :

A. Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah tanggung jawab sosial dari perusahaan yang harus memastikan keberhasilan komersial melalui cara-cara yang memberikan nilai-nilai etis dan menghormati manusia, masyarakat dan lingkungan. Secara khusus pengertian tersebut menjelaskan bahwa CSR membahas isu-isu yang terkait dengan etika bisnis, investasi untuk masyarakat,

¹¹ Ismail. "Strategi *Community Development Officer* (CDO) PT. Waru Kaltim Plantation (WKP) dalam menyelesaikan masalah *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kecamatan Waru Desa Bangun Mulya (Periode Januari - Desember 2015)." *E- Journal Ilmu Komunikasi*. Volume 5, No. 1. Tahun 2017.

lingkungan, pemerintahan, hak-hak setiap manusia, aktivitas yang berkaitan dengan nilai ekonomi dan tempat kerja. Dapat diartikan jika tanggung jawab sosial adalah bagian dari kegiatan bisnis yang memenuhi harapan etis dan legal yang dimiliki masyarakat terhadap bisnis tersebut.¹²

Adapun definisi lain dari CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah sebuah tindakan maupun konsep yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang sesuai dengan kemampuannya sebagai bentuk dari tanggung jawab untuk sosial dan lingkungan di sekitar tempat perusahaan berada. *Corporate Social Responsibility* (CSR) berdasarkan UU No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 74 menyebutkan, perseroan yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib menjalankan Tanggung Jawab Sosial serta Lingkungan (TJSL). Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan perseroan yang aturannya menjadi kewajiban dalam anggaran dan diperhitungkan sebagai sebuah biaya dari perseroan. Selain itu pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.¹³

Selain definisi diatas, Flaherty (1999) menyatakan “*the problem of corporate social responsibility is matter of distribution of cost that include not only money cost but also human cost or social cost.*” Yang artinya pendapat ini melihat masalah CSR dari sisi persoalan biaya distribusi yang di dalamnya tidak hanya berupa uang tetapi juga manusia dan sosial.¹⁴ Pendapat lain oleh Lord Home and Richard Watt (2006) menyatakan “*Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and*

¹² Parsons, Patricia J. 2004. “*Etika Public Relations.*” Jakarta : Erlangga

¹³ Parmadean Manuli. 2014. “*Mengelola Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit Secara Profesional.*” Jakarta : Penebar Swadaya

¹⁴ Djakfar Muhammad. 2012. “*Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi.*” Jakarta : Penebar Plus

their families as well as of the local community and society at large.”¹⁵ Dalam kutipan kalimat “*the continuing commitment by business*” dijelaskan bahwa program CSR merupakan salah satu bentuk komitmen yang berkelanjutan untuk pembangunan jangka panjang sehingga program CSR tidak hanya sebatas memberikan bantuan sosial di awal dan hanya dalam bentuk sementara waktu dalam jangka pendek.

Konsep CSR pertama kali dimunculkan tahun 1953 melalui buku karya Howard Bowen dengan judul *Social Responsibilities of Businessman* yang kemudian Howard Bowen dikenal sebagai bapak CSR. Seiring berjalannya waktu, CSR semakin dianggap menjadi sebuah keharusan di tahun 1960 ketika terjadi persoalan kemiskinan dan keterbelakangan semakin menjadi perhatian dari berbagai macam kalangan. Di Indonesia sendiri konsep CSR semakin banyak digunakan di tahun 1990an dengan beberapa nama-nama perusahaan yang sebenarnya telah lama melakukan CSA (*Corporate Social Activity*) atau aktivitas sosial perusahaan. Walaupun tidak menamainya sebagai CSR seperti yang saat ini kita ketahui sebagai aktivitas sosial perusahaan, secara faktual kegiatan tersebut mendekati konsep dari CSR yang intinya adalah mempresentasikan peran serta dan kepedulian dari perusahaan terhadap nilai sosial dan lingkungan.¹⁶

Konsep CSR yang sesungguhnya adalah mempertanggung jawabkan tindakan-tindakan dari kebijakan perusahaan dan berupaya untuk menghasilkan *impact* positif melalui kegiatan perusahaan yang memiliki kaitan dengan lingkungan, pelanggan, karyawan, komunitas, *stakeholder* dan semua publik yang berada dalam satu jangkauan operasi perusahaan.¹⁷ Sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang tentang teori *triple bottom line* menurut John Elkington dalam (Rachman; Efendi; Wicaksana, 2011) menjelaskan bahwa bentuk bagan

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Rachman Nurdizal M, Efendi Asep, Wicaksana Emir. 2011. “*Panduan Lengkap Perencanaan CSR.*” Jakarta : Penebar Swadaya

¹⁷ Bevely Beni. 2012. “*Corporate Social Responsibility : Hikmah Kegagalan dan Keberhasilan Strategi Bisnis di Amerika Serikat.*” USA : San Fransisco School

triple bottom line yang mencakup *people, planet, profit* atau bisa disingkat dengan 3P. 3P adalah gambaran tentang bagaimana sebuah perusahaan dapat menyelaraskan ketiga aspek penting tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.¹⁸

Corporate Social Responsibility atau dapat dipahami sebagai tanggung jawab sosial perusahaan terdapat di dalam konsep 3P dimana *planet* dan *people* menjadi unsur penting dari pelaksanaan program CSR. Sedangkan profit yang terdapat dalam unsur 3P merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab ekonomis perusahaan. Konsep 3P mempertimbangkan adanya keselarasan antara tanggung jawab ekonomis dan juga tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut *The Jakarta Consulting Group*, ada dua peranan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu : (1) dari isi internal dan (2) dari sisi eksternal perusahaan. Tanggung jawab perusahaan secara internal diarahkan untuk kepentingan pemegang saham, adapun bentuk tanggung jawab tersebut berupa profitabilitas disertai dengan adanya pemberdayaan kepada karyawan perusahaan. Sementara untuk tanggung jawab eksternal perusahaan berkaitan dengan peran perusahaan untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, menciptakan lapangan pekerjaan dan juga upaya pelestarian lingkungan untuk generasi yang akan datang.¹⁹

Dalam pedoman CSR ISO 26000 yang merupakan standar pedoman perilaku bertanggung jawab sosial bagi organisasi guna berkontribusi untuk pembangunan yang berkelanjutan. ISO 26000 di terbitkan pada tanggal 1 November 2010 (Bevly Beni, 2012) yang isinya adalah mengajak badan usaha dan semua organisasi untuk mendiskusikan penerapan *social responsibility*. ISO artinya stakeholder sebagai kelompok yang menjadi bagian dalam operasi suatu perusahaan dan menjadi kelompok yang membawa dampak untuk perusahaan. ISO 26000 mencakup tujuh aspek yang disebut dengan *core social responsibility issue* yang bunyinya adalah sebagai berikut, pertama *organizational*

¹⁸ Rachman Nurdizal M; Efendi Asep; Wicaksana Emir, *op.cit*

¹⁹ Sunyoto D., Putri Wika H. 2016. "*Etika Bisnis*." Yogyakarta : CAPS

governance. Diperlukan adanya koordinasi yang baik dalam mengatur organisasi dan hal ini mencakup keterlibatan banyak pihak (*inclusiveness*), bertindak sesuai etika (*ethical conduct*), adanya keterbukaan atau disebut dengan (*disclosure of information*), bertanggung jawab (*accountability*) dan harus selalu menjunjung tinggi hukum yang berlaku (*the rule of law*). Kedua adalah mengakui hak asasi manusia dimana penerapan *human rights* diberlakukan supaya tidak terjadi saling menyakiti yang dalam ISO 26000 mencakup hak sipil dan politik, hak ekonomi, budaya, sosial, hak fundamental perburuhan dan hak komunitas. Ketiga adalah *labour practices* yang artinya perusahaan diharuskan menghormati hak-hak pekerja yang mencakup perlindungan di bidang kesehatan dan keamanan. Perusahaan diharuskan menyediakan kondisi kerja yang baik serta memastikan perlakuan yang menghormati untuk para pekerja.

Keempat adalah *environment* atau lingkungan. Organisasi diharuskan bertindak untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup terkait maraknya isu perubahan iklim. Perusahaan diharuskan membantu mencari solusi masalah lingkungan. Tindakan ini mencakup pengurangan polusi, mencegah *global warming*, mengonsumsi dan memanfaatkan lahan secara bijak dan melakukan preservasi dan restorasi *ecosystem* dan lingkungan alam serta memenuhi pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Kelima, adanya *fair operating practices* dimana perusahaan mendahulukan transparansi dalam menjalin hubungan dengan pihak yang lain. Keenam, *consumer issues* yang intinya adalah perusahaan harus menyediakan informasi yang akurat dan jelas kepada tiap-tiap consumer. Dan yang terakhir adalah *community involvement* yang mengharuskan perusahaan memperhatikan pembangunan yang baik dan sehat serta berkesinambungan dalam masyarakat. Adapun pembangunan tersebut dapat berguna untuk kelanjutan kehidupan perusahaan itu sendiri dan pada

akhirnya perkembangan masyarakat juga ikut terbantu dengan adanya pembangunan perusahaan.²⁰

Menurut Panjaitan (2015) dalam buku *Bank Ramah Lingkungan*, dunia saat ini di huni oleh sekitar 6,8 miliar populasi sehingga energi, pangan dan air merupakan salah satu kebutuhan utama manusia. Adanya ancaman tentang perubahan iklim menjadikan setiap elemen populasi berlomba-lomba mencari jalan keluar untuk menemukan terobosan sehingga kebutuhan generasi masa ini dan yang akan datang akan tetap terpenuhi. Kembali kepada pembahasan tentang teori *triple bottom line* dan menganut salah satu kutipan terkenal oleh John Elkington pada tahun 1997 yang berbunyi “*Business through market in the pursuits of Economic, Environment and Society.*” Yang artinya setiap pembangunan yang memiliki nilai ekonomi atau kegiatan perusahaan dan organisasi diharuskan menerapkan tiga jalur keseimbangan untuk ekonomi, ekosistem dan humanis sehingga tercapai keharmonisan resiprokal dalam ketiga aspek tersebut.²¹ Menilai dari latar belakang pembangunan ekonomi melalui kegiatan institusi atau maraknya perusahaan-perusahaan yang dibangun, tentunya tidak terlepas dari faktor pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Tanpa adanya sumber daya manusia dan sumber daya alam, kegiatan ekonomi tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari itu adanya keselarasan antar tiga faktor tersebut diharapkan menciptakan pemerataan dan dapat mengurangi dampak-dampak yang tidak di inginkan.

Berdasarkan kajian diatas tentang *triple bottom line*. Salah satu kewajiban perusahaan adalah untuk menjaga lingkungan agar tetap dapat terjaga dengan baik sangat berkaitan dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang penelitian ini, *First Resources Ltd* yang beroperasi di bidang perkebunan dituntut untuk menjaga lingkungan karena sudah menjadi hal umum diketahui jika provinsi Riau menyumbang tingkat bencana kebakaran hutan yang

²⁰ Bevely Beni. *Op.cit*, hal 45

²¹ Panjaitan Leonard Tiopan. 2015. “*Bank Ramah Lingkungan.*” Jakarta : Penebar Plus

cukup tinggi akibat kebakaran lahan yang sebagian besar merupakan lahan kelapa sawit.

Setelah menerapkan tiga aspek yang berkaitan dengan 3P (Profit, People, Planet) setiap institusi harus melaksanakan kebijakan CSR dengan menerapkan pembangunan yang berkelanjutan atau disebut dengan *sustainable development*. Pembangunan berkelanjutan pertama kali digagas oleh salah satu organ PBB tahun 1987 (Panjaitan, 2015) yang berisi “*development that meet the needs of the present generation without comprising the ability of the future generations to meet their own needs.*” Dapat disimpulkan bahwa adanya pembangunan saat ini harus diimbangi dengan komitmen kemampuan menjaga kebutuhan pembangunan untuk generasi yang akan datang. *Sustainable development* diperlukan sebagai pedoman dalam CSR sehingga selalu menjadi komitmen perusahaan untuk terus menjaga prinsip 3P tanpa terputus atau hanya bersifat sementara.²²

Terdapat tiga tingkatan strategi yang memiliki kaitan dengan bisnis yang mempengaruhi CSR dari suatu perusahaan adapun yang pertama adalah adanya kebijakan dari pemerintah serta ekonomi makro yang terdapat hubungan antara kebijakan yang disah kan pemerintah dengan ekonomi makro sangat erat karena akan mempengaruhi keadaan ekonomi dan negara. Kedua, terdapat strategi global korporasi, secara global strategi korporasi merupakan sebuah pencerminan dari pelaksanaan CSR. Strategi korporasi berawal dari keputusan dan penerapan kebijakan strategi bisnis yang langsung datang dari tingkat tertinggi suatu korporasi. Biasanya datang dari CEO atau *board of director* nya. Ketiga adalah strategi bisnis manajemen mikro. Strategi ketiga ini digunakan untuk memulai, mengembangkan dan dilanjutkan dengan me- maintain bisnis yang dijalankan

²²Panjaitan Leonard Tiopa, *op.cit.* hal 37

sehingga selain mendapatkan profit, perusahaan juga tidak mengabaikan penerapan CSR yang baik.²³

Terkait konsep-konsep yang dijelaskan diatas, disebutkan berbagai komponen atau elemen-elemen penting yang berkaitan dengan keberlangsungan CSR. Adapun elemen tersebut meliputi stakeholder. Stakeholder dapat dikategorikan ke dalam beberapa elemen tingkatan dan melihat posisi penting serta pengaruh stakeholder terhadap isu tertentu. Stakeholder dikategorikan ke dalam beberapa kelompok yaitu pertama adalah Stakeholder utama atau prioritas. Pada umumnya kalangan prioritas memiliki kaitan tentang kepentingan secara langsung dengan kehadiran dari adanya sebuah perusahaan. Contohnya adalah *shareholder*, karyawan dan supplier atau vendor. Stakeholder utama menjadi perhatian perusahaan dan berpotensi untuk meningkatkan sisi kualitas dalam hubungan perusahaan dengan stakeholder lainnya atau stakeholder terkait dengan rantai nilai. Kondisi stakeholder utama atau prioritas biasanya akan mendatangkan isu-isu penting bagi semua pihak terkait dengan keberhasilan perbaikan kondisi mereka yang kemudian menjadi sebuah harapan dari berbagai pihak.

Kedua adalah masyarakat. Masyarakat merupakan stakeholder perusahaan yang dalam konteks merupakan kajian tentang pengembangan masyarakat. Masyarakat adalah penerima dampak terkait dengan kehadiran berdirinya sebuah perusahaan dan bagaimana program-program pemberdayaan yang dijalankan. Ada banyak pihak yang mendapat dampak secara langsung maupun tidak langsung. Pihak tersebut terbagi ke dalam tingkatan sesuai kepentingannya yang tidak sama. Adapun pihak tersebut bisa datang dari pemegang saham, pemerintah pusat atau daerah, masyarakat sekitar perusahaan, LSM dan lain-lain. Dengan diberlakukannya kebijakan yang baik, diharapkan semua pihak (stakeholder) mendukung kemajuan perusahaan.

²³ Bevely Beni, *op.cit.* hal 56

Ketiga adalah Pemerintah. Pemerintah meliputi instansi pusat dan instansi daerah dimana peran pemerintah menurut Howard Fox dalam (Rachman, Efendi, Wicaksana, 2011) Studi Bank Dunia menunjukkan bahwa peran pemerintah terkait dengan aktivitas CSR meliputi pengembangan kebijakan yang menyehatkan pasar, keikutsertaan sumber daya, dukungan politik untuk pelaku CSR serta penciptaan insentif dan peningkatan kemampuan organisasi. Ditengah krisis tentang persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di Indonesia, pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR. Pemerintah juga memfasilitasi, mendukung dan memberi penghargaan kepada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar pemberdayaan masyarakat dan lingkungan. Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antar pelaku bisnis dan kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindarkan proses manipulasi.²⁴

B. Implementasi

Implementasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan atas adanya sebuah keputusan atau kebijakan. Kebijakan ditujukan untuk mencapai suatu sasaran tertentu yang dapat menguntungkan beberapa pihak. Dengan kata lain, implementasi dapat dimaknai sebagai bentuk operasionalisasi dari suatu kebijakan.²⁵ Menurut Mazmanian dan Sabatier yang dikutip oleh Dwidjowijoto, Implementasi merupakan sebuah upaya untuk melaksanakan suatu kebijakan. Lembaga yang berwenang dalam membuat kebijakan tidak hanya berasal dari lembaga pemerintahan, terdapat tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana dari kebijakan yang pertama adalah lembaga pemerintahan, kedua yaitu adanya

²⁴ Rachman Nurdizal M, Efendi Asep, Wicaksana Emir, *op.cit*, hlm 59

²⁵ Salusu J. 1996. "*Pengambilan Keputusan Stratejik*." Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia

kerjasama antara pemerintahan dengan masyarakat atau swasta, yang ketiga adalah kebijakan yang diswastakan (*privatization*).²⁶

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan, terdapat beberapa model-model yang menjadi acuan bagi lembaga dalam pelaksanaannya. Salah satunya merupakan model George Edward III. Dalam gagasannya, Edward III memperhatikan empat isu utama yang tujuannya untuk efektivitas implementasi dari suatu kebijakan. Adapun beberapa isu tersebut adalah :

1. Komunikasi

Dalam melaksanakan kebijakan, komunikasi merupakan sebuah elemen penting dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi berperan sebagai pemberi informasi dari pengambil kebijakan kepada stakeholdernya. Agar implementasi kebijakan terlaksana dengan baik, diperlukan penyampaian informasi secara konsisten yang langsung disampaikan oleh pihak terkait. Jika dalam pelaksanaan kebijakan informasi disampaikan secara tidak konsisten, maka dapat menimbulkan ketimpangan informasi antara pengambil kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Dengan kata lain, jika komunikasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan berjalan dengan baik maka tingkat efektifitas kebijakan tersebut akan lebih kuat.

Terdapat tiga faktor yang dapat mengukur keberhasilan dari proses komunikasi, yaitu : (a) Transmisi, berupa kesadaran atas perintah sebuah kebijakan untuk dilaksanakan. (b) Kejelasan (*Clarity*), adanya kejelasan berupa petunjuk-petunjuk pelaksanaan bagi penerima kebijakan. (c) Konsistensi, adanya

²⁶ Dwidjowijoto Riant N. 2006. "*Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*." Jakarta : PT. Elex Media Komputindo

penyampaian secara berkala untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara pihak pembuat kebijakan dan juga penerima kebijakan.²⁷

2. Sumber Daya (*Resources*)

Dalam melaksanakan suatu kebijakan, perintah-perintah yang akan dan sedang dijalankan harus diteruskan secara baik, cermat dan konsisten. Jika pelaksana tidak memiliki sumber daya yang mumpuni, dapat dipastikan kebijakan yang berjalan tidak akan terlaksana sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Terdapat beberapa kriteria dalam memenuhi sumber daya yang baik, yaitu : (1) penempatan pegawai sesuai dengan kemampuannya, (2) ketersediaan informasi secara berkala, dan (3) fasilitas sebagai sarana penunjang keberlangsungan implementasi kebijakan.²⁸

3. Sikap Pelaksana

Pelaksanaan kebijakan yang efektif harus didukung oleh sikap implementor yang turut serta memiliki kecenderungan positif untuk ikut melaksanakan kebijakan tersebut. Sikap implementor yang baik adalah dengan tidak hanya sekedar mengetahui dan berperan sebagai pemberi perintah semata terhadap penerima kebijakan agar keseluruhan nilai-nilai dari kebijakan tersebut dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Terdapat dua hal yang menjadi perhatian khusus oleh Edward III tentang sikap pelaksana yang berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi mereka, yaitu : (1) Penempatan pegawai, dimana apabila terdapat perbedaan pendapat antara pegawai dengan pembuat kebijakan maka akan dapat menyebabkan permasalahan, dan (2)

²⁷ Sulila Ismet. 2015. “*Implementasi Dimensi Pelayanan Publik dalam Konteks Otonomi Daerah.*” Yogyakarta : Deepublish

²⁸ *Ibid*

Insentif, artinya adanya inisiatif dari pelaksana kebijakan untuk memanipulasi insentif-insentif agar mampu membantu keberhasilan implementasi kebijakan.²⁹

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan komponen-komponen kerja dalam sebuah organisasi. Struktur birokrasi membagi tiap fungsi kerja dan tanggung jawab masing-masing divisinya. Dengan tetap berkoordinasi antar tiap pembagiannya, struktur ini memudahkan sebuah organisasi untuk dapat menunjukkan spesifikasi bidang pekerjaan, perintah kebijakan dan juga laporannya.

Beberapa aspek penting yang terdapat dalam struktur birokrasi yaitu, : (a) adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam tiap menjalankan sebuah kebijakan diperlukan untuk menciptakan fleksibilitas dari sebuah kebijakan. Selain itu SOP dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam pelaksanaan aturan. (2) Fragmentasi, yaitu suatu upaya untuk menyederakan tanggung jawab disuatu wilayah kebijakan diantara tiap-tiap unit organisasi. Dengan pemisahan tiap area tanggung jawab ini kerap kali menimbulkan kesulitan untuk berkoordinasi antar tiap pekerja. Dibutuhkan adanya satu pemusatan yang dapat mengontrol tiap unit kerja dari masing-masing divisinya.³⁰

1.7 Metode penelitian

a.) Paradigma Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang berlandaskan pada studi deskriptif dengan paradigma penelitian Fenomenologi Realistik. Berdasarkan pernyataan Embree dalam kutipan Pawito tentang salah satu varian dari paradigma fenomenologi yaitu Fenomenologi realistik dimana pendekatan ini lebih memperhatikan tentang pengamatan langsung di lapangan

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

dan juga menggambarkan esensi-esensi yang terlihat secara umum.³¹ Dengan melakukan observasi secara langsung, peneliti akan dapat mendeskripsikan perihal keadaan sebenarnya di lapangan. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk menemukan hal-hal yang bersifat tersembunyi (latent) yang karenanya sangat menaruh perhatian pada kejanggalan dan kontroversi. Peneliti dituntut untuk dapat mengemukakan penjelasan-penjelasan mengenai temuan-temuan data yang dinilai penting dan menarik.³²

Oleh karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif dimana deskriptif adalah paparan berdasarkan kejadian sebenarnya di lapangan tanpa ada menambah-nambahi dan mengurang-ngurangi, peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak *First Resources Ltd* tentang program-program CSR yang dijalankan dan peneliti juga akan melakukan wawancara secara mendalam kepada pihak masyarakat yang terlibat dalam program sehingga data yang diperoleh menjadi lengkap dan peneliti mendapat data yang akurat.

b). Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama dua bulan, terhitung pada bulan Oktober – Desember 2017 dan berlokasi di dua wilayah yaitu kantor *First Resources Regional Riau*, Jl. Jenderal Sudirman Pekanbaru, Riau dan pabrik PT. PISP selaku anak perusahaan milik *First Resources Regional Riau* yang berlokasi di Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

c). Narasumber Penelitian

Peneliti memiliki tujuh narasumber, yaitu :

1. Masrokan (Manajer Kebun bagian umum *First Resources Regional Riau*)
2. Rahmat Widodo (Asisten Kebun *First Resources Riau*)

³¹ Pawito. 2007. “*Penelitian Komunikasi Kualitatif*.” Yogyakarta : LKiS

³² *Ibid* hlm 98

3. Robby (staf pihak Bank Riau Kepri)
4. Hardian (staf CSR *First Resources* Regional Riau)
5. Wandi (Petani dan pengurus Koperasi Rizki Abadi)
6. Tarmizi (Petani dan wakil ketua Koperasi Mulya Mandiri)
7. Samsuri (Petani dan anggota Koperasi PIR-TRANS)

d). Teknik Pengumpulan Data

Metode kualitatif pada umumnya berupa informasi dan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu : (a) data yang diperoleh dari *interview*, (b) data yang diperoleh dari observasi, dan (c) data yang berupa dokumen, teks atau karya seni yang kemudian dinarasikan.³³ Peneliti melakukan wawancara langsung (*interview*) kepada narasumber-narasumber yang berpartisipasi aktif dalam tema penelitian ini untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan. Selain itu peneliti juga mendapatkan beberapa data dalam bentuk dokumen dan teks tertulis dari pihak *First Resources* Regional Riau dan peneliti gunakan sebagai pelengkap data sekunder.

e). Metode Analisis Data

Terdapat empat tahapan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Tahap pra-observasi : dalam tahap pra-observasi, peneliti terlebih dahulu mencari informasi awal tentang *First Resources* Ltd dan mengetahui program CSR yang dimiliki perusahaan. Setelah memperoleh informasi, peneliti menyiapkan segala kebutuhan yang akan digunakan untuk wawancara di lapangan.
2. Tahap observasi : peneliti melaksanakan penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang terkait untuk memperoleh data primer dan sekunder.

³³ *Ibid*

3. Tahap olah data : setelah memperoleh data primer dan sekunder dari penelitian, peneliti melakukan olah data berupa penulisan hasil yang diperoleh di lapangan.
4. Tahap analisis data : setelah mengolah data, peneliti melakukan analisis dengan menggabungkan hasil-hasil yang diperoleh di lapangan dengan teori yang sesuai.
5. Tahap Penarikan Kesimpulan : Setelah melakukan olah data dan analisis hasil temuan lapangan, peneliti menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah dilaksanakan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Profil Perusahaan *First Resources Ltd*

First Resources merupakan sebuah perusahaan yang beroperasi di bidang perkebunan dan telah berdiri sejak tahun 1992. *First Resources* telah terdaftar dalam *Singapore Exchange* sejak tahun 2007. Saat ini *First Resources* beroperasi khusus dalam pengelolaan kelapa sawit dengan luas wilayah perkebunan yang mencapai 200.000 hektar dan tersebar di wilayah provinsi Riau, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Kegiatan utama yang dilaksanakan perusahaan dalam pengolahan tanaman kelapa sawit meliputi pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) hingga memprosesnya ke pabrik milik *First Resources* untuk dijadikan olahan minyak kelapa sawit mentah (CPO) yang kemudian di jual ke pasaran lokal dan ekspor. *First Resources* merupakan sebuah *Holding Company* (perusahaan induk) yang memegang beberapa saham anak perusahaan yang berafiliasi di beberapa wilayah yang menjadi lokasi operasional perusahaan, salah satunya di Provinsi Riau. *First Resources Regional Riau* merupakan sebutan untuk induk perusahaan *First Resources* yang berlokasi di wilayah sekitar Provinsi Riau.

Holding Company atau induk perusahaan sendiri dapat diartikan sebagai pemegang saham atau perusahaan yang mempunyai anak-anak perusahaan (*subsidiary company*) yang beroperasi dalam bidang usaha yang sejenis ataupun berbeda jenis usaha. *Holding Company* dapat pula diartikan sebagai penggabungan beberapa badan usaha guna mengonsolidasikan keseluruhan kelompok usaha. Perusahaan induk berperan sebagai pengendali dan pemegang kuasa terbesar dalam menjalankan aktivitas bisnis khususnya bidang keuangan. Salah satu keuntungan perusahaan induk memiliki perusahaan subsidiari adalah, perusahaan dapat memposisikan diri sebagai perusahaan dengan daya saing yang kuat dan menjaga keseluruhan operasional dalam jangka panjang. Penggabungan

anak-anak perusahaan (*subsidiary*) tersebut dapat memperluas berbagai sektor kegiatan usaha seperti dalam bidang produksi, pemasaran, sumber daya dan lain-lain sehingga kegiatan operasional dapat berjalan secara efektif dan efisien.³⁴



Gambar 2.1 Logo *First Resources Ltd*

Sumber gambar : Google³⁵

First Resources Regional Riau terdiri dari 27 anak perusahaan yang keseluruhannya beroperasi dibidang pengolahan tanaman kelapa sawit. Kantor First Resources terletak di gedung Surya Dumai Group Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Riau. terdiri dari 27 anak perusahaan *First Resources* memiliki visi untuk menjadi sebuah perusahaan Agribisnis yang berfokus pada minyak kelapa sawit yang dikenal karena keunggulan dan kualitasnya. Adapun misi *First Resources* adalah :

-Untuk menambah jumlah pemegang saham secara kontinu melalui nilai pertumbuhan dan profitabilitas;

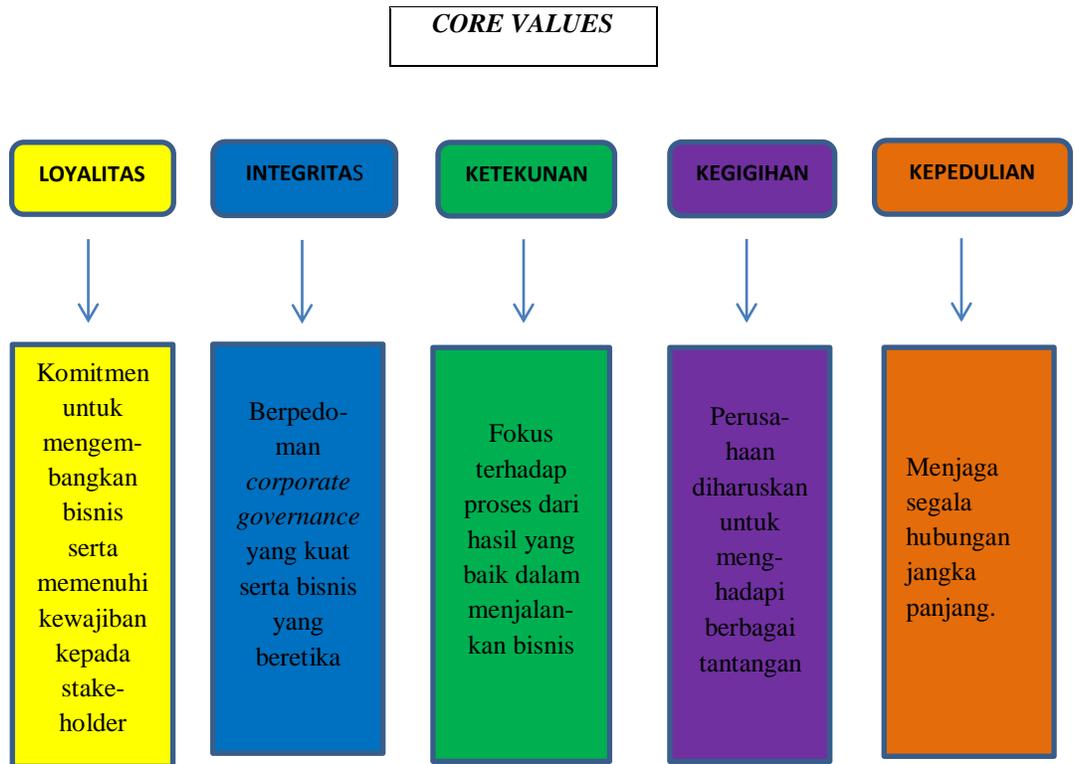
³⁴ Asikin Zainal, Suhartana Wira Pria. 2016. “*Pengantar Hukum Perusahaan.*” Jakarta : Prenadamedia Group

³⁵ Sumber Google

https://www.google.co.id/search?q=first+resources&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAov6Mn-baAhUSS48KHcbABQUQ_AUICygC&biw=1366&bih=662 Diakses pada tanggal 2 Februari 2018

- Memilih SDM dan pemimpin berdasarkan performa dan kerja keras yang telah disesuaikan dengan keunggulan perusahaan;
- Memastikan produksi berjalan secara efisien dengan mempertimbangkan level tinggi untuk produksi dan biaya yang rendah dalam pelaksanaanya;
- Menjadi perusahaan yang ramah lingkungan dan menerapkan nilai-nilai sosial dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.³⁶

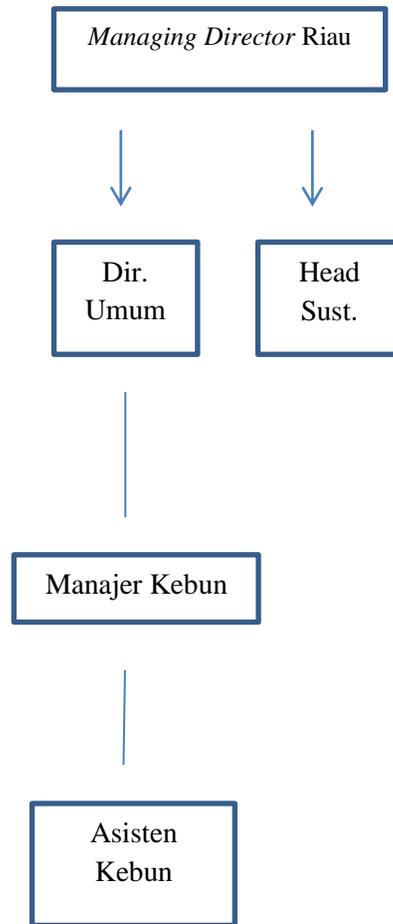
³⁶ Sumber website *First Resources Ltd* diakses pada tanggal 5 Februari 2018 : <http://www.first-resources.com>.



Bagan 2.2 Nilai dan pedoman *First Resources Ltd*

Sumber <http://www.first-resources.com>³⁷

³⁷ Sumber <http://www.first-resources.com> diakses pada tanggal 5 Februari 2018



**Bagan 2.3 Struktur Organisasi *First Resources Regional Riau*
Sumber HRD *First Resources Regional Riau***

B. Profil PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PT. PISP)

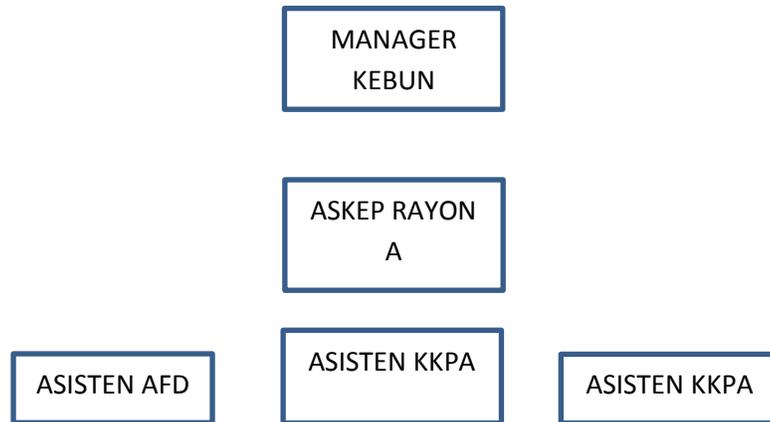
Terdiri dari 27 anak perusahaan yang bersubdiari di dalamnya, *First Resources Regional Riau* yang merupakan induk perusahaan dan memiliki anak-anak perusahaan yang beroperasi dengan bidang serupa dibawah naungannya. PT. Perdana Intisawit Perkasa (PT. PISP) merupakan salah satu dari ke 27 anak perusahaan milik *First Resources Regional Riau* yang beroperasi di bidang perkebunan kelapa sawit. Berlokasi di Kabupaten Rokan Hulu, PT. PISP terbagi menjadi PT. PISP I dan PT. PISP II yang masing-masing dibedakan pembagian koperasi berdasarkan wilayah desa dan kecamatan yang menjadi bagian dari kemitraannya. Adapun PT. PISP I maupun PT. PISP II berlokasi di kabupaten

Rokan Hulu, hanya saja terbagi dari dua kecamatan yang berbeda. Untuk PT. PISP I berlokasi di kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Sedangkan PT. PISP II berlokasi di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Dalam penelitian ini, penulis mengambil PT. PISP sebagai salah satu contoh dari 27 anak perusahaan milik *First Resources* Regional Riau yang akan menjadi subjek dalam penelitian ini. Adapun PT. PISP terdiri dari 18 Koperasi Unit Desa yang bermitra di dalamnya.

Dalam artikel surat kabar pada tanggal 5 Maret 2014, PT. PISP mengadakan kegiatan dengan tema “Menjadi Petani yang Lebih Lestari” dengan membagikan hadiah berupa Doorprize bagi petani peserta yang turut serta berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, dalam Kegiatan tersebut, Erwan Effendi selaku *Sustainability Regional Manager First Resources* Riau mengatakan perusahaan telah melakukan beberapa bentuk Program CSR dan juga turut serta menyalurkan anggaran untuk bidang pendidikan seperti membangun sekolah dengan beberapa jumlah lokal dan disertai dengan memberikan beasiswa untuk masyarakat di desa. Adapun untuk bidang sosial terdapat kegiatan sunatan massal, serta memberikan bantuan berupa sarana pendukung untuk rumah ibadah.³⁸

Dalam artikel surat kabar tersebut diketahui bahwa PT. PISP yang berdiri dibawah naungan *First Resources* Regional Riau memiliki beberapa mitra kerja yang terbentuk dalam anggota-anggota dari koperasi yang bermitra dengan perusahaan. Adanya kegiatan CSR yang disalurkan bertujuan untuk mempererat tali kerjasama antar perusahaan dengan masyarakat sekitar yang menjadi mitra perusahaan.

³⁸ <http://utusanriau.co/?/det/1487> artikel diakses tanggal 28 Februari 2018



Bagan 2.4 Struktur Organisasi Perkebunan PT. PISP
Sumber : HRD First Resources Regional Riau

C. Pengertian Pola KKPA Sebagai Program CSR oleh PT. PISP

CSR merupakan salah satu kegiatan penting untuk dilaksanakan pihak perusahaan. Adapun bentuk kegiatan CSR selama ini selalu diartikan sebagai pemberian bantuan berupa sumbangan atau bahkan sekedar bentuk subsidi dari pihak perusahaan di bidang-bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Berbagai kegiatan yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat dapat dikategorikan pula sebagai bagian dari CSR salah satunya adalah dengan membina masyarakat mandiri dalam program pemanfaatan lahan tanam milik perusahaan dengan skema kemitraan pola KKPA yang dimiliki *First Resources Regional Riau*. Memanfaatkan lahan tanam milik perusahaan untuk kemudian dikelola dan diberikan kepada masyarakat sekitar wilayah industri merupakan bentuk dari implementasi CSR yang tujuannya untuk membentuk masyarakat mandiri. Dengan adanya program kemitraan pola KKPA milik *First Resources Regional Riau*, masyarakat turut serta memiliki kebun kelapa sawit sekaligus merawat dan melestarikan lingkungan perkebunan. KKPA merupakan singkatan dari Kredit Koperasi Primer untuk Anggota. Sesuai dengan keputusan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No.

73/Kpts/KB.510/2/1998 dan No. 01/SKB/M/11/98 Pola ini bertujuan antara lain untuk membangun dan meningkatkan pendapatan petani dengan disertai dengan pengembangan lahan wilayah setempat serta membantu memberdayakan KUD (Koperasi Unit Desa) di wilayah plasma.³⁹

Tujuan pola KKPA terbagi atas tiga kategori berdasarkan tujuan perusahaan, tujuan masyarakat petani dan tujuan umum. Bagi perusahaan melakukan program kemitraan ini semata-mata untuk mencapai tujuan pengelolaan kebun yang lestari dengan berazaskan 3P yang merupakan singkatan dari *Planet-People-Profit*. Untuk masyarakat petani, adanya program kemitraan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf ekonomi, memajukan pembangunan infrastruktur, membuka lapangan pekerjaan dan peluang untuk usaha serta menimbulkan efek pengganda (*multiplier effect*). Adapun tujuan secara umum dari adanya program kemitraan ini adalah untuk membangun kerjasama antara pihak koperasi dengan perusahaan dimana dalam kerjasama tersebut akan terjalin simbiosis mutualisme yang menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu program kemitraan ini berfungsi sebagai sarana untuk memanfaatkan lahan yang kurang dan tidak produktif menjadi lahan yang produktif serta dapat menunjang perekonomian daerah setempat. Dengan demikian jika masyarakat sekitar ikut memiliki kebun, maka masyarakat turut serta menjaganya. Keamanan kebun (termasuk kebun inti milik perusahaan) akan terjaga jika masyarakat sekitar wilayah perkebunan sejahtera. Hal ini dapat terlaksana dengan membangunkan kebun untuk masyarakat dengan sistem kemitraan pola KKPA.

Selain adanya tujuan, terdapat beberapa manfaat dari pembangunan kebun kemitraan pola KKPA ini. Manfaat adanya pola KKPA bagi perusahaan antara lain untuk memastikan pemenuhan Bahan Baku Industri (PKS) dan juga meminimalisasi *Social Problem* yang kerap terjadi antara pihak masyarakat dan

³⁹ Fauzi Yan, Widyastuti Y. E., Satyawibawa Iman, Paeru R. H. 2012. “*Kelapa Sawit*”. Jakarta : Penebar Swadaya

juga perusahaan semisal terlibat konflik-konflik yang berkaitan dengan penggunaan lahan. Selain itu dengan adanya program kemitraan pola KKPA tersebut dapat menjadi bukti nyata dari pelaksanaan CSR berupa kepedulian dan tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan sosial. Masyarakat sebagai subjek yang terlibat dalam program kemitraan tersebut juga turut mendapatkan manfaat dari pola KKPA disamping meningkatkan taraf ekonomi dan nilai sosial budaya, masyarakat juga dapat merasakan dampak dari perbaikan lingkungan yang meliputi iklim mikro, tata air dan sebagainya. Selain memberi manfaat bagi pihak perusahaan dan juga masyarakat petani disekitar wilayah industri perkebunan, adanya program kemitraan ini membawa serta manfaat bagi pemerintah. Pemerintah terbantu dengan program kemitraan ini karena pola KKPA dapat membantu pengembangan kewilayahan dan juga membantu pengembangan dan pengkairahan perekonomian lokal dan nasional. Selain itu program kemitraan tersebut merupakan penyumbang PDRB dari sub sektor perkebunan yang menjadi salah satu keuntungan yang diperoleh bagi pihak pemerintah.

Pelaksanaan program kemitraan KKPA ini sangat erat kaitannya dengan pembangunan koperasi. Untuk PT. PISP sendiri, ada 18 unit koperasi desa yang bermitra di wilayah kabupaten Rokan Hulu. Berikut daftar nama koperasi yang bekerja sama dengan PT PISP,

Table 2.1
Daftar Petani KKPA PT. PISP ⁴⁰

NO.	NAMA KOPERASI	LOKASI	JUMLAH ANGGOTA	LUAS LAHAN
1.	KUD Mulya Mandiri	Dusun Muara Nikum dan Dusun Ujung Gurab, Kecamatan	384 petani anggota	479 Ha

⁴⁰ Tabel daftar petani KKPA yang bermitra dengan PT. PISP. Sumber Data: *Daftar Koperasi Binaan PT. PISP oleh Rahmat Widodo, Asisten Kebun First Resources Regional Riau*

		Rambah Hilir		
2.	KUD Harapan Mulya	Desa Kota Tengah, Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu	116 petani anggota	250 Ha
3.	KUD Rizki Abadi	Desa Kepayang, Kecamatan Tambusai, Kab. Rokan Hulu	199 petani anggota	257,84 Ha

Table 2.2
Daftar Koperasi PIR-TRANS Binaan PT. PISP ⁴¹

NO.	NAMA KOPERASI	LOKASI	ANGGOTA	LUAS
1.	Sumber Rezeki	Kepenuhan Raya	532	1.066,10
2.	Sumber Makmur	Kepenuhan Baru	507	1.012,54
3.	Sawit Subur	KUPT- SP3	500	1.000,48
4.	Jaya Bersama	KUPT- SP4	500	999,86
5.	Suka Damai	KUPT- SP5	381	765,52
6.	Mitra Makmur	Suka Maju	470	892,27
7.	Kop. Integrasi Sawit Sejahtera	Kepenuhan Barat Mulya	122	455,05
8.	Integrasi Karya Makmur	Kepenuhan Timur	206	243,73

⁴¹ Tabel daftar petani koperasi PIR-TRANS yang bermitra dengan PT. PISP. Sumber Data: *Daftar Koperasi Binaan PT. PISP oleh Rahmat Widodo, Asisten Kebun First Resources Regional Riau*

BAB III

TEMUAN LAPANGAN

Dalam bab III ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang telah ditemukan di lapangan. Penelitian dilakukan di kantor *First Resources Ltd Regional* Riau yang berlokasi di gedung *Surya Dumai Group*, Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Riau. di lanjutkan dengan melakukan observasi langsung ke kebun kelapa sawit dengan menemui beberapa pihak koperasi dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan perusahaan. Peneliti memperoleh informasi dengan melakukan observasi secara langsung ke lapangan dengan menganalisis data melalui metode kualitatif agar peneliti dapat dengan mudah menggambarkan kondisi lapangan melalui sumber data wawancara dari pihak-pihak yang terkait dengan program CSR yang diimplementasikan di lapangan. Deskripsi data yang diperoleh di lapangan kemudian akan dianalisis dan disesuaikan dengan teori-teori CSR. Peneliti melakukan observasi awal pada tanggal 5,6,9 dan 10 November 2017. Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu narasumber dari divisi CSR. Narasumber tersebut adalah Hardian yang merupakan salah satu staff divisi *Corporate Social Responsibility (CSR) First Resources Ltd*. Di lanjutkan dengan narasumber dari divisi KKPA, narasumber lapangan yaitu pihak koperasi dan masyarakat petani serta pihak Bank. Adapun profil dari masing-masing narasumber dirangkum dalam table berikut :

Table 3.1
Profil Narasumber⁴²

NO.	Narasumber	Jabatan
1.	Hardian	Staf CSR <i>First Resources</i> Regional Riau
2.	Masrokan	Manager Kebun (bagian umum) <i>First Resources</i> Regional Riau
3.	Robby	Staf pihak Bank Riau Kepri

⁴² Profil Narasumber Wawancara Langsung

4.	Samsuri	Petani dan anggota koperasi PIR-TRANS
5.	Wandi	Petani dan pengurus Koperasi Rizki Abadi
6.	Tarmizi	Petani dan wakil ketua koperasi Mulya Mandiri
7.	Rahmat	Asisten kebun (bagian KKPA) <i>First Resources</i> Regional Riau

A. *Corporate Social Responsibility (CSR) First Resources Ltd Wilayah Riau*

First Resources Ltd di wilayah Riau terdiri dari 27 anak perusahaan yang berafiliasi di dalamnya dan CSR merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang dijalankan semua perusahaan yang tergabung di dalam *Holding Company First Resources Ltd*. *First Resources Ltd* tersebar di beberapa wilayah di Indonesia seperti seperti di Sumatera dan Kalimantan sehingga untuk sebutan *First Resources* yang berada di wilayah Riau lebih dikenal dengan *First Resources Regional Riau*. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, *First Resources Regional Riau* memiliki beberapa divisi yang masing-masing bertanggung jawab di bidang-bidangnya. CSR merupakan salah satu bidang yang kegiatannya dijalankan oleh *First Resources* ini. CSR juga merupakan salah satu kegiatan yang penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk membantu pengembangan pihak perusahaan melalui interaksi sosial antara pihak perusahaan dengan masyarakat di sekitar lingkungan wilayah industri. Melalui penerapan kebijakan yang tepat, perusahaan secara tidak langsung berperan serta membantu kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan sekitar. Bagi *First Resources*, melaksanakan kegiatan CSR bukan hanya sebuah kewajiban tertulis yang telah diatur kebijakannya oleh pemerintah, tetapi CSR adalah sebagai tanggung jawab moral yang dilaksanakan untuk menyelaraskan hubungan baik antar tiap elemen-elemen kehidupan disamping tujuan perusahaan adalah untuk mencari keuntungan (*profit*) semata. Pentingnya CSR dalam kegiatan perusahaan disamping kepentingan perusahaan untuk mendapatkan *profit*, menciptakan

hubungan yang baik antar pihak perusahaan dengan sekitarnya akan membantu keberlangsungan kegiatan perusahaan dalam waktu dan jangka panjang.

“Kegiatan CSR memang sangat penting untuk diterapkan dalam suatu perusahaan, Disamping kegiatan CSR merupakan kewajiban yang ketentuannya telah diatur oleh pemerintah akan tetapi kami merasa kegiatan CSR ini sangat menunjang keberlangsungan kegiatan masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Sesuai dengan teorinya 3P, CSR harus menerapkan konsep kelestarian People dan Planet disamping mencari Profit. Dan kami merasa itu memang sangat penting bukan karena kewajiban dari pemerintah tetapi memang kami merasakan benar manfaatnya.”⁴³

1. Kegiatan CSR *First Resources* Regional Riau

Memiliki 27 anak perusahaan, *First Resources* telah melakukan kegiatan CSR di macam-macam bidang. *First Resources* melaksanakan tanggung jawab sosial ini berdasarkan kebutuhan di lapangan dimana tempat perusahaan bermitra dan kebutuhan masyarakat tersebut telah disesuaikan dengan kebijakan yang dimiliki perusahaan. Ada empat jenis kegiatan CSR yang telah dijalankan oleh *First Resources* Regional Riau contohnya kegiatan CSR di bidang ekonomi, lingkungan dan kesehatan, pendidikan serta infrastruktur. Dalam jabaran yang dipaparkan oleh penulis, data yang diperoleh merupakan kegiatan CSR selama tahun 2017 dan beberapa ada yang diterapkan dari lanjutan program di tahun sebelumnya.

⁴³ (Hardian, Staf CSR *First Resources* Regional Riau) Wawancara langsung pada tanggal 5 November 2017 pukul 10.00 WIB

a). CSR dalam Bidang Ekonomi

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu faktor penting demi menunjang kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah industri perusahaan. Kegiatan CSR dalam bidang ekonomi yang telah dilaksanakan dan menjadi fokus utama bagi *First Resources* adalah pelatihan tentang kewirausahaan. Program kewirausahaan tersebut antara lain adalah Program Pemberdayaan UMKM yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk tahun 2017, program kewirausahaan yang dilaksanakan *First Resources* Regional Riau adalah bantuan keramba dan bibit ikan untuk Desa Danau Lancang Provinsi Riau, adapun program bantuan dapat sewaktu-waktu berganti setiap tahunnya karena pihak perusahaan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan kebutuhan masyarakat setempat. Program pembibitan ikan di Desa Danau Lancang terlaksana dengan baik dan masyarakat setempat dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh pihak perusahaan untuk kemudian mereka jadikan sebagai salah satu mata pencaharian tetap yang dapat mereka kelola dalam jangka panjang.

Selain itu *First Resources* memiliki Program Pelatihan Menjahit dan Tata Rias. Sasaran kegiatan ini adalah ibu-ibu yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga produktif di Desa Bangsal Aceh, Meridan, Simpang Beringin dan Kerinci Kanan Provinsi Riau untuk 3 sampai 4 anggota PKK aktif setempat. Dengan melakukan pelatihan tersebut, *First Resources* selaku pemilik program turut membantu meningkatkan tingkat produktivitas dan menambah kegiatan serta pendapatan bagi ibu-ibu rumah tangga. Selain itu perusahaan juga turut membantu melatih ibu-ibu setempat untuk lebih kreatif dan mandiri. Dengan rutinitas ibu-ibu PKK yang selalu aktif mengadakan kegiatan, pelatihan menjahit dan tata rias menjadi kegiatan yang digemari oleh ibu-ibu setempat.

b). CSR dalam Bidang Sosial Budaya, Lingkungan dan Kesehatan

Program Sosial Budaya, Lingkungan dan Kesehatan digagas oleh perusahaan untuk menciptakan pemerataan sosial bagi masyarakat setempat. Dalam bidang

sosial budaya, perusahaan mengadakan kegiatan Safari Ramadhan di setiap tahunnya di bulan ramadhan dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat setempat sebagai wujud dari kegiatan sosial yang diterapkan *First Resources*. Selain itu dalam bidang sosial juga perusahaan mendukung pelaksanaan kegiatan MTQ Desa dengan memberikan bantuan kegiatan MTQ sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat di desa/kecamatan setempat.

Dari bidang kesehatan, *First Resources* dengan bertemakan “Sehat Bersama FR” memiliki program dokter keliling yang memberikan layanan kesehatan gratis. Bantuan kesehatan gratis ini lebih diperuntukkan kepada masyarakat yang terkena dampak kabut asap ISPA yang kerap terjadi dan dampaknya sangat dirasakan masyarakat di provinsi Riau. dikarenakan kabut asap telah menjadi fenomena yang kerap terjadi dan melanda warga Provinsi Riau, pihak *First Resources* selaku perusahaan yang beroperasi dan menjalankan kegiatan usahanya di bidang perkebunan, sudah menjadi kewajiban moral bagi *First Resources* untuk turut serta bertindak dalam penanggulangan permasalahan kabut asap. Program kesehatan berikutnya adalah perusahaan rutin melaksanakan *Fogging* penyemprotan nyamuk malaria dengan tujuan untuk mengantisipasi wabah malaria yang kerap terjadi dan menyerang masyarakat terutama anak-anak. Dikarenakan daerah sekitar industri merupakan lahan perkebunan dan masih banyak terdapat lahan hutan, permasalahan malaria mendapat perhatian khusus bagi pihak *First Resources* yang kemudian setiap bulannya rutin dijalankan penyemprotan malaria.

Berikutnya *First Resources* turut serta melaksanakan kegiatan di bidang lingkungan dengan bertemakan “Program FR *GO GREEN*” yang menurut pihak *First Resources*, tujuan mereka membuat program tersebut adalah untuk mendukung program penghijauan yang digagas oleh pemerintah. Adapun bentuk program *go green* tersebut adalah program Pengayaan Desa Konservasi (Penghijauan Mangrove) dengan melakukan penanaman mangrove di pesisir pantai Dumai Provinsi Riau dan juga perusahaan turut berpartisipasi dalam

kegiatan pameran lingkungan hidup dengan menghadirkan *stand* pameran FR pada hari lingkungan hidup sedunia yang diselenggarakan oleh BLH Riau setiap tanggal 5 Juni. Disamping melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan golongan usia dewasa, pihak perusahaan turut melakukan pendekatan tentang program lingkungan ini untuk golongan usia anak-anak dengan melaksanakan program lomba menggambar bertemakan lingkungan untuk tingkat SD dan TK serta melaksanakan program penghijauan lingkungan sekolah.

c). CSR Bidang Pendidikan

Selanjutnya perusahaan juga menjalankan tanggung jawab sosial di bidang pendidikan dengan memberikan beasiswa untuk siswa-siswi pilihan serta pembangunan gedung-gedung sekolah demi menunjang taraf pendidikan di desa setempat. Untuk beasiswa, perusahaan melanjutkan program-program ditahun sebelumnya dan akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya bahkan sangat memungkinkan bagi pihak perusahaan untuk menambahkan kuota beasiswa sesuai dengan permintaan dan kesepakatan antar pihak perusahaan dengan masyarakat yang bersangkutan. Dalam menunjang kegiatan belajar mengajar, perusahaan turut serta memberikan bantuan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan berupa pembangunan WC sekolah, penyediaan sarana air bersih dan program bantuan akses internet untuk menunjang kegiatan belajar siswa.

d). CSR Bidang Infrastruktur

Dalam membantu dan menunjang seluruh kegiatan masyarakat sehari-hari, infrastruktur menjadi hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan. *First Resources* pun turut serta memberikan perhatian dalam hal pembangunan infrastruktur demi memudahkan segala aktivitas masyarakat. Beberapa contoh program CSR bidang infrastruktur yang telah dibangun oleh *First Resources* adalah Bantuan rumah ibadah berupa rehab Masjid, bantuan pembangunan Gerbang dan Tugu untuk kantor balai desa dan bantuan pembuatan kanal *blocking* bersama pemerintah setempat.

“First Resources Group memiliki 27 anak perusahaan. Untuk hampir keseluruhan PT kami melakukan kegiatan CSR dari bidang ekonomi seperti program pemberdayaan UMKM dan kewirausahaan. Untuk bidang pendidikan kami juga memiliki program beasiswa dan pembangunan gedung sekolah. Selain itu kami juga melakukan CSR di bidang sosial budaya, lingkungan dan kesehatan dengan membuat program dokter keliling yang bertugas melakukan pengobatan secara gratis untuk masyarakat. Dan dari bidang infrastruktur kami melakukan bantuan berupa rumah ibadah, bantuan pembuatan gerbang atau tugu untuk masing-masing wilayah sekitar industri.”⁴⁴

Penerapan kegiatan CSR tersebut berada di wilayah desa dimana desa tersebut merupakan kawasan industri dan pabrik milik *First Resources*. Dengan adanya kegiatan CSR tersebut perusahaan secara tidak langsung menjaga hubungan baik dengan masyarakat yang bermitra dengan perusahaan. Hal tersebut karena perusahaan berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat dari berbagai sektor. Dalam merumuskan dan menentukan macam jenis CSR di suatu desa, pihak perusahaan lebih mengandalkan keterlibatan tokoh masyarakat secara langsung, pihak perusahaan tidak ingin program yang diusung oleh mereka menjadi terlaksana secara berulang karena sebelum program perusahaan dijalankan, terlebih dahulu sudah dilaksanakan oleh pihak desa setempat. Perlunya pendekatan dan komunikasi dua arah dari para tokoh masyarakat tentang kegiatan CSR yang mereka butuhkan merupakan faktor penting sebagai acuan bagi pihak perusahaan dalam menentukan program yang akan diberikan untuk tiap-tiap desa. Selain melakukan pendekatan berupa komunikasi langsung dengan tokoh masyarakat desa, pihak pemerintah juga memberikan saran tentang program CSR apa yang hendak dilaksanakan dalam suatu daerah. Pihak pemerintah lebih menyarankan adanya perhatian khusus dalam bidang UKM

⁴⁴ (Hardian, Staf CSR *First Resources* Regional Riau) Wawancara langsung pada tanggal 5 November 2017 pukul 10.00 WIB

untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Dengan memperbanyak pelatihan tentang UKM, Pemerintah berharap masyarakat dapat terlatih untuk lebih mandiri dan memiliki keuletan dalam berwirausaha.

“Kalau dari pemerintah, lebih menyarankan kegiatan UKM dimaksimalkan karena tujuan untuk peningkatan perekonomian masyarakat itu sendiri.”⁴⁵

B. Pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) dalam Pemanfaatan Lahan Tanam bagi Penduduk Sekitar Wilayah Industri *First Resources* Regional Riau

Program pemanfaatan lahan tanam kebun kelapa sawit milik perusahaan tidak menjadi bagian dalam divisi CSR. Ada divisi lain dibagian umum yang khusus melaksanakan dan mengontrolnya, program tersebut dikenal dengan program kemitraan atau pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggota atau lebih dikenal dengan istilah KKPA. Dari pihak perusahaan tidak memungkiri bahwa program pola KKPA ini merupakan program yang menerapkan nilai-nilai CSR sehingga program ini dapat dikatakan sebagai salah satu program CSR karena memang dalam pelaksanaannya perusahaan juga memberdayakan masyarakat petani, akan tetapi karena pembahasannya terlalu luas, pihak *First Resources* menjalankan program kemitraan pola KKPA ini melalui divisi umum bukan ditangani melalui divisi CSR.

“Memang benar perusahaan memiliki program pengelolaan lahan tanam kebun kelapa sawit untuk masyarakat dengan mengusung pola KKPA. Untuk program kemitraan pola KKPA tersebut dari perusahaan sendiri sebenarnya tidak menggabungkan antara kegiatan CSR dengan KKPA karena

⁴⁵ (Hardian, Staf CSR *First Resources* Regional Riau) Wawancara langsung pada tanggal 5 November 2017 pukul 10.00 WIB

pembahasan KKPA cukup luas sehingga membutuhkan bagian khusus yang menanganinya, bisa ditanyakan di bagian umum KKPA dengan bapak Rokan.”⁴⁶

Pola KKPA merupakan salah satu program yang dijalankan oleh perusahaan dengan menerapkan nilai-nilai dari CSR. Bentuk dari program ini adalah pembangunan kebun kemitraan dengan mengambil pola KKPA sebagai landasan kebijakannya. *First Resources* yang terdiri dari 27 anak perusahaan, keseluruhan anak perusahaannya turut melaksanakan kewajiban program kebun kemitraan pola KKPA sebagaimana telah diatur dalam kebijakan pemerintah yang awalnya merupakan instruksi dan keputusan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No. 73/Kpts/KB.510/2/1998 dan No. 01/SKB/M/11/98 pada saat itu. Untuk saat ini program kemitraan dilaksanakan secara mandiri oleh perusahaan tanpa adanya peran pemerintah, sehingga keseluruhan proses pelaksanaan termasuk pendanaanya ditangani langsung oleh perusahaan inti.

KKPA merupakan program yang sudah terlebih dahulu muncul sebelum lahirnya kebijakan menjalankan CSR oleh pemerintah. Dahulunya program KKPA adalah kebijakan milik pemerintah bersamaan dengan PIR. Pada awalnya, program KKPA merupakan program yang dijalankan oleh pemerintah bersamaan dengan program PIR. Akan tetapi setelah ditiadakannya program tersebut oleh pemerintah, perusahaan mengambil pola yang serupa untuk diterapkan secara langsung dalam hubungan kemitraan dengan masyarakat sekitar wilayah industri. Karena pola KKPA bahasanya terbilang cukup luas dibandingkan dengan program CSR, *First Resources* menjelaskan empat macam sumber daya yang harus diperhatikan dalam membangun kebun kelapa sawit kemitraan untuk memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan KKPA di perusahaan mereka,

⁴⁶ (Hardian, Staf CSR *First Resources* Regional Riau) Wawancara langsung pada tanggal 5 November 2017 pukul 10.00 WIB

yang pertama dibutuhkan adanya sumber daya alam yang mendukung seperti contohnya tersedianya lahan yang siap dimanfaatkan. Kedua, dibutuhkan adanya SDM yang mampu mengelola dengan baik lahan yang disediakan. Ketiga, adanya dana dan finansial yang mampu mencukupi pembangunan kebun kemitraan. Keempat, adanya teknologi yang berkaitan dengan kebun kelapa sawit. Sumber daya alam dan sumber daya manusia dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat sedangkan finansial atau dana dan ketersediaan teknologi dimiliki oleh perusahaan atau investor. Menurut pihak *First Resources* dengan menggabungkan keempat elemen tersebut kebun kemitraan akan dapat berjalan dengan baik.

Dalam membangun kerjasama kebun kemitraan tersebut, beberapa dasar-dasar yang harus terpenuhi meliputi adanya minat masyarakat memiliki kebun sawit sendiri dengan disertai kesadaran akan hubungan simbiosis mutualisme (saling menguntungkan) antara pihak perusahaan dengan masyarakat di sekitar wilayah industri. Selain itu diberhentikannya ketersediaan dana program KKPA dan PIR dari Pemerintah ikut serta mendorong pihak perusahaan untuk terus melanjutkan program kemitraan tersebut secara mandiri tanpa peran pemerintah di dalamnya. Ditiadakannya peran pemerintah dalam program KKPA oleh perusahaan ini bukan serta merta pemerintah tidak turut berpartisipasi. Pemerintah tetap mendukung pelaksanaan program kemitraan pola KKPA oleh perusahaan ini karena memang prakteknya sangat dibutuhkan masyarakat dan program pola KKPA telah menjadi salah satu sumber peningkatan ekonomi bagi masyarakat di Provinsi Riau.

“Program pola KKPA ini tingkatannya jauh lebih besar, ibaratnya paling penting lah untuk perusahaan kita, volumenya juga besar maka dari itu perlu staff khusus yang menangani. Karena pola KKPA ini menyangkut tentang aspek sosial, maka ini ditangani oleh pihak umum. KKPA adalah Kredit Koperasi Primer untuk Anggota. Pola KKPA ini adalah sistem pembangunan kebun plasma yang dilakukan oleh kebun inti perusahaan dimana peran dari perusahaan adalah sebagai

Bapak Angkat yang memanfaatkan kerjasama dengan institusi yang memiliki kekuatan hukum yaitu koperasi sebagai perantaranya.”⁴⁷

Dalam pembangunan kebun kemitraan kelapa sawit, *First Resources* menyebut istilah inti dan plasma terdengar tidak asing di kalangan perusahaan kelapa sawit. Inti merupakan sebutan untuk perusahaan dan plasma merupakan sebutan untuk masyarakat. Inti dan plasma menggambarkan hubungan antara pihak perusahaan dengan masyarakat. Hubungan yang dimaksud adalah, inti sebagai unit kegiatan usaha berskala besar melakukan binaan dan pemberdayaan untuk masyarakat kecil dengan berbagai tujuan. Dalam konteks usaha perkebunan, *First Resources* menjalankan pemberdayaan yang serupa dengan bidang operasinya yaitu kelapa sawit sehingga pemberdayaan pun ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat petani yang turut serta dibina mengelola kebun kelapa sawit dengan harapan dapat membantu kesejahteraan dalam bidang ekonomi. Menurut pihak perusahaan, masyarakat adalah pemegang kunci sustainabilitas dari perusahaan sendiri. Dengan memberikan kesejahteraan dalam bidang ekonomi, masyarakat akan merasa tercukupi sehingga mereka dapat mengatur dan mengelola pemasukan setiap bulannya secara mandiri. Pola KKPA tidak hanya sekedar bantuan berupa sumbangan yang sistemnya dinilai oleh *First Resources* hanya untuk kepentingan jangka pendek. Tetapi dengan adanya pola KKPA ini masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya dalam jangka waktu panjang dan masyarakat pun secara tidak langsung dibina oleh perusahaan untuk menjadi masyarakat yang mandiri.

⁴⁷ (Masrokan, Manager Kebun bagian umum *First Resources* Regional Riau) Wawancara langsung pada tanggal 6 November 2017 pukul 09.30 WIB.

*“Dalam membangun kebun kemitraan, perusahaan disebut juga sebagai inti, perusahaan inti memiliki kewajiban untuk membangun kebun plasma. Plasma disini ditujukan untuk masyarakat. Sehingga dalam pola KKPA terkenal istilah inti-plasma yang ditujukan untuk menggambarkan hubungan perusahaan dengan masyarakat.”*⁴⁸

Lahan yang diperoleh perusahaan untuk menjalin kerjasama dan bermitra dengan suatu desa di dapat dari tiga sumber, (1) adanya pengajuan dari masyarakat untuk dibangun kebun di desanya, (2) perusahaan yang mengajukan kerjasama dengan desa untuk membangun kebun kemitraan, (3) terdapat *social conflict* yang terkadang menuntut perusahaan untuk bermitra dan membuat kebun kelapa sawit dalam suatu desa. Menurut Masrokan, rata-rata yang menjadi pertimbangan untuk perusahaan membangun kebun adalah faktor (1) dan (2), karena faktor *social conflict* biasa terjadi pada kasus-kasus tertentu akibat adanya tuntutan berupa demonstrasi dari masyarakat desa lain ketika melihat sebuah desa dibangun kebun oleh *First Resources* atau lebih jelasnya, adanya rasa tidak puas dari suatu desa akan kemitraan dengan perusahaan lain diluar *First Resources* sehingga mereka ingin ikut bermitra dengan *First Resources*.

*“ya sumber lahan yang biasanya kita dapatkan ada 3. Yang pertama kami memperoleh lahan untuk kemitraan ini berdasarkan adanya ajuan atau permohonan kerjasama dari masyarakat. Lalu ada juga yang dari kita perusahaan memohon pembangunan lahan dengan mengurus dan membuat surat izin. Terus yang ketiga biasanya kita membangun lahan karena hasil *social conflict* seperti ada protes dari desa sebelah minta dibuatkan kebun juga, mungkin merasa di anak*

⁴⁸ (Masrokan, Manager Kebun bagian umum *First Resources* Regional Riau) Wawancara langsung pada tanggal 6 November 2017 pukul 09.30 WIB.

tirikan ya desanya itu. Kurang puas padahal sudah ada mitra dengan perusahaan lain.”⁴⁹

Dalam pembangunan kebun kemitraan ini terdapat dua tahapan pelaksanaan yang pertama adalah masa Pra-konversi dan masa Konversi. Konversi merupakan suatu proses pengalihan hak kebun dari perusahaan untuk diberikan kepada masyarakat melalui koperasi disaat usia tanaman kurang lebih empat tahun karena di usia tersebut tanaman sudah mulai menghasilkan. Pemeliharaan awal di masa Pra-Konversi untuk Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) terlebih dahulu dilakukan oleh perusahaan. Pemeliharaan awal ini dilakukan oleh perusahaan sampai usia tanaman berumur 4 tahun atau sampai dikatakan layak untuk diserahkan (dikonversikan) kepada petani melalui koperasi. Di masa Pra-konversi, perawatan kebun mulai dari pembukaan lahan, stacking, pembibitan, penanaman dan pemupukan dikerjakan oleh perusahaan inti. Pengerjaan tersebut membutuhkan modal utama yang cukup besar yang diperoleh dari bank.

Sebelum perusahaan melaksanakan konversi, terlebih dahulu pula harus memenuhi beberapa persyaratan berupa legalitas koperasi di desa setempat, perusahaan melakukan pemeliharaan sampai kebun berumur 4 tahun dan layak untuk diberikan ke petani, adanya penetapan pagu kredit dimana penentuan beban hutang untuk petani atas investasi pembangunan kebun ini nantinya akan ditanggung oleh petani. Rencana Kerja Operasional (RKO) merupakan syarat penting karena perawatan kelapa sawit harus tetap diawasi oleh perusahaan dan ketika kebun sudah dikonversikan biaya perawatan tersebut ditanggung oleh petani yang diperoleh dari pemotongan hasil penjualan setiap bulannya dengan persentase yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan terlebih dahulu dibuat Rencana Kerja Operasional. Untuk semua urusan yang berkaitan dengan penjualan, pengembalian kredit bank serta hal-hal yang bersangkutan dengan

⁴⁹ (Masrokan, Manager Kebun bagian umum *First Resources* Regional Riau) Wawancara langsung pada tanggal 6 November 2017 pukul 09.30 WIB.

transaksi antara perusahaan, masyarakat serta bank seluruhnya ditengahi oleh koperasi desa. Secara lebih jelasnya, Masrokan menjelaskan tentang Tahapan-tahapan dalam pembangunan kebun kemitraan tersebut. Adapun tahapan awal dari pembangunan kebun kemitraan ini terlebih dahulu harus melalui serangkaian izin dari Pemerintah untuk memperoleh dan membangun lahan, pembangunan kebun dimulai dari proses pembukaan lahan, stacking, pembibitan, penanaman kelapa sawit hingga pada tahap pemeliharaannya. Pada tahap pembangunan ini seluruh kegiatan inti secara teknis dikerjakan langsung oleh perusahaan inti.

1. Tahap Pembangunan Kebun Kemitraan *First Resources* Regional Riau dalam masa

Pra-Konversi

Pembangunan kebun kemitraan ini secara garis besar adalah untuk memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah industri dengan kata lain jika masyarakat ikut memiliki kebun maka mereka akan ikut serta menjaga lingkungan seperti contohnya masyarakat menjadi enggan untuk membakar lahan. Untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program kemitraan pola KKPA ini, masyarakat harus mengikuti tahapan awal masa sebelum konversi yang dikenal dengan istilah tahap Pra-Konversi. Pra-Konversi merupakan prosedur atau tahapan awal dalam pelaksanaan program kemitraan ini dan *First Resources* telah memiliki syarat-syarat khusus bagi petani pemula yang ingin bergabung dalam program kemitraan pola KKPA. Berbeda dengan PIR-TRANS yang sudah terlebih dahulu bermukim di wilayah tertentu dan telah terdaftar dalam program pemerintah (PIR-TRANS) sejak lama, program KKPA memerlukan adanya persyaratan khusus bagi petani yang ingin bergabung dengan program kemitraan ini. Berikut adalah syarat-syarat keanggotaan bagi petani yang ingin bergabung menjadi anggota petani KKPA :

Tabel 3.2

Syarat-syarat Keanggotaan Kebun Kemitraan Pola KKPA ⁵⁰

NO.	Syarat-syarat Pola Kemitraan	Syarat-syarat Keanggotaan
1.	Adanya ketersediaan lahan yang sesuai untuk kelapa sawit	Umur petani peserta minimal 21 tahun atau sudah menikah
2.	Lahan yang tersedia harus bebas konflik masalah kepemilikan	Berkelakuan baik selama menjadi petani plasma dan bersedia menandatangani surat pernyataan
3.	Adanya keinginan masyarakat untuk bermitra dengan perusahaan untuk membangun kebun kelapa sawit	Belum pernah menjadi peserta petani plasma pola PIR-Trans, KKPA atau program kemitraan lainnya
4.	Kesediaan masyarakat untuk membentuk koperasi sebagai wadah untuk bermitra dengan perusahaan	Bersedia tidak menjual areal kebun miliknya
5.	Harus ada koperasi sebagai institusi yang berbadan hukum	Bersedia mematuhi peraturan di dalam kesepakatan bersama
6.	Adanya bank sebagai penyanggah dana pembangunan kebun kelapa sawit dan perusahaan menjadi avalis.	Bersedia memberi kuasa kepada koperasi untuk mengurus kerjasama dengan pihak perusahaan dan Bank.

Karena bentuk implementasi dari kegiatan CSR yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan tanam milik perusahaan *First Resources* Regional Riau ini berupa program kemitraan dengan menggunakan pola KKPA, tentunya perusahaan mewajibkan beberapa persyaratan khusus. Salah satu syarat penting adalah memiliki koperasi sebagai institusi berbadan hukum yang menjadi perantara antara perusahaan, masyarakat dan pihak bank. Dengan adanya koperasi kegiatan transaksi dari keseluruhan perantara dapat terlaksana dengan baik. Koperasi juga merupakan syarat utama dalam pembangunan kebun kemitraan yang dijalankan oleh perusahaan. Koperasi sendiri menjadi syarat mutlak dalam pembangunan kebun kemitraan dikarenakan koperasi menjadi wadah untuk setiap

⁵⁰ Syarat keanggotaan KKPA, Sumber data : *materi sosialisasi kebun kemitraan oleh Masrokan*

komponen-komponen yang terlibat untuk melakukan transaksi serta pengelolaan kebun kelapa sawit. Selain itu menurut Masrokan, koperasi mengambil peran yang cukup besar dalam program ini karena dari pihak perusahaan, koperasi dimanfaatkan untuk kegiatan transaksi berupa penjualan TBS (Tandan Buah Segar) oleh petani kelapa sawit yang telah bermitra dengan perusahaan. Penjualan TBS oleh petani ini menunjang keberlangsungan produksi bagi perusahaan.

“Koperasi menjadi wadah penting dalam implementasi program kemitraan ini karena hasil kebun yang perusahaan berikan untuk masyarakat harus dijual ke perusahaan itu sendiri.”⁵¹

Adapun mekanisme kerjasama antara pihak perusahaan (inti) dengan masyarakat (plasma) melalui pemerintah desa setempat atau tokoh masyarakat yang terlibat pada mulanya merumuskan dasar perencanaan kerjasama yang hasilnya tertuang dalam bentuk sebuah naskah kesepahaman (MoU). Di dalam MoU ini perusahaan dan masyarakat telah menyepakati pembagian kebun inti untuk perusahaan dan kebun plasma untuk masyarakat. Setelah mendapatkan kesepakatan, perusahaan sebagai Bapak Angkat mulai melaksanakan pembangunan perkebunan dan melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat tentang ketersediaan koperasi.

“Demi meningkatkan taraf perekonomian masyarakat tempatan artinya masyarakat yang berada di sekitar kebun kami melakukan pembangunan kebun dan melakukan perawatan di empat tahun pertama sebelum kebun menghasilkan buah.”⁵²

⁵¹ (Masrokan, Manager Kebun bagian umum *First Resources Regional Riau*) Wawancara langsung pada tanggal 6 November 2017 pukul 09.30 WIB.

⁵² (Masrokan, Manager Kebun bagian umum *First Resources Regional Riau*) Wawancara langsung pada tanggal 6 November 2017 pukul 09.30 WIB.

Selanjutnya adalah pemeliharaan kebun kelapa sawit. Setelah kebun kelapa sawit dibangun, pemeliharaan diserahkan kepada pihak perusahaan inti hingga umur tanaman memasuki usia 4 tahun sebelum diserahkan kepada petani. Pada masa ini kebun masih berstatus TBM (Tanaman Belum Menghasilkan) sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Masrokan, secara teknis keseluruhan kegiatan pola KKPA ini dikerjakan oleh perusahaan inti sampai umur tanaman memasuki usia empat tahun atau sampai kebun sudah menghasilkan TBS (Tandan Buah Segar) berupa tanaman kelapa sawit yang nantinya akan dimanfaatkan oleh petani sebagai mata pencahariannya.

“Usia kebun harus masuk tahun tanam dulu, karena perawatan awal kan susah, kalau dari perusahaan kami kan memiliki SDM khusus yang dipersiapkan untuk mengelola kebun kelapa sawit sehingga kami berharap dapat lebih memudahkan petani di awal pembangunan.”⁵³

Adapun sebelum memasuki tahap konversi terlebih dahulu perusahaan melakukan persiapan yang disebut dengan Pra-Konversi, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, tahap Pra-Konversi yang menjadi proses persiapan pengalihan kebun milik perusahaan untuk kemudian diberikan kepada masyarakat, memiliki beberapa persiapan khusus. Persiapan ini meliputi urusan administrasi untuk persyaratan kredit, pengurusan rekomendasi teknis dan pengurusan legalitas atau disebut dengan alas hak kepemilikan lahan bagi masyarakat. Adapun beberapa pelaksanaan yang harus dipenuhi pada tahap Pra-Konversi, antara lain :

⁵³ (Masrokan, Manager Kebun bagian umum *First Resources* Regional Riau) Wawancara langsung pada tanggal 6 November 2017 pukul 09.30 WIB.

- a). Legalitas Koperasi : Legalitas Koperasi merupakan persyaratan mutlak yang prosesnya diikat melalui notaris. Dalam urusan legalitas, koperasi diwajibkan untuk menyiapkan Akte Pendirian, Laporan Keuangan, SIUP, SITU, TDP, NPWP dan lain-lain.
- b). Usia Tanaman : Usia tanaman dikatakan layak untuk dilakukan konversi adalah dalam usia empat tahun.
- c). Penetapan Pagu Kredit (*Unit Cost*) : Penetapan pagu kredit ditujukan untuk masyarakat petani yang mendapat lahan kebun plasma yang telah dikonversikan, adapun ini adalah bentuk dari penetapan beban hutang yang harus dilunaskan petani atas investasi pembangunan kebun kelapa sawit.
- d). Penetapan CPP : CPP merupakan singkatan dari Calon Petani Peserta. CPP ditentukan oleh SK Bupati yang mekanismenya mendapat usulan dari desa yang diketahui terlebih dahulu oleh camat baru kemudian disahkan oleh bupati.
- e). Penyusunan RKO : setelah nanti kebun diserahkan kepada petani, perawatan kebun tetap dilakukan oleh perusahaan. Kesepakatan ini disusun dalam Rencana Kerja Operasional (RKO) tetapi biaya ditanggung oleh petani.
- f). Sertifikat Alas Hak : Sertifikat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama petani peserta dan bisa berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama koperasi. Sertifikat ini bertujuan sebagai agunan untuk pinjaman petani atau koperasi kepada bank.

Salah satu kendala utama masyarakat dalam pembangunan awal kebun kelapa sawit ini adalah dari sisi SDM, secara teknis, masyarakat petani masih kurang menguasai perawatan kebun kelapa sawit yang baik agar menghasilkan tanaman yang berkualitas sehingga pihak perusahaan merasa perlu terjun langsung ke lapangan untuk melakukan perawatan kebun hingga dapat menghasilkan dan petani dapat melanjutkan masa-masa panen di periode berikutnya secara mandiri.

2. Tahap Pembangunan Kebun Kemitraan *First Resources* Regional Riau dalam masa Konversi

Setelah melewati masa Pra-Konversi dan memenuhi keseluruhan prosedur yang terdapat dalam masa Pra-Konversi, tahap selanjutnya adalah Konversi. Konversi merupakan proses pengalihan kebun yang telah dirawat oleh perusahaan inti sampai usia tanaman berumur empat tahun dan telah menghasilkan tanaman kelapa sawit atau biasa disebut dengan TBS (Tandan Buah Segar). TBS yang merupakan buah hasil panen kelapa sawit tersebut setelah memasuki masa konversi wajib dijual ke perusahaan melalui koperasi yang bermitra dengan perusahaan. Penyerahan lahan kepemilikan oleh perusahaan ini dilakukan melalui koperasi yang prosedurnya telah diatur oleh perusahaan dan telah disepakati oleh masyarakat.

Adapun masa Konversi ini meliputi tahapan Pengembalian Kredit dan juga Pemberian Sertifikat Alas Hak. Pengembalian Kredit atau pinjaman ini diurus secara kolektif oleh koperasi yang mekanismenya telah diatur dengan cara melakukan pemotongan sekitar 30% dari hasil penjualan TBS (Tandan Buah Segar) berupa kelapa sawit hasil panen petani ke perusahaan setiap bulannya sampai dengan lunas. Pemotongan 30% tersebut dimaksudkan untuk pembayaran bunga dan pokok pinjaman awal yang diberikan bank. Setelah pinjaman lunas, seluruh hasil penjualan TBS (Tandan Buah Segar) diberikan kepada petani pemilik dengan tetap dikurangi dengan biaya pemeliharaan kebun seperti untuk pemupukan sesuai dengan kesepakatan yang disusun dan disepakati di dalam RKO. Setelah pinjaman petani lunas dan sertifikat telah terbit, sertifikat tersebut diserahkan kepada petani pemilik. Ada dua jenis sertifikat yang dapat diberikan. Sertifikat dapat berupa HGU dengan mengatas namakan koperasi dan diserahkan kepada koperasi yang bermitra, atau dengan SHM yang mengatas namakan masing-masing nama petani anggota.

“Jadi tahapnya terbagi dua, ada masa Pra-konversi dan masa konversi. Konversi itu masa peralihan, saat perusahaan memberikan hak kebun setelah empat tahun kepada petani peserta, tetapi sebelumnya, harus melewati tahap pra konversi dahulu.”⁵⁴

Secara praktis berdasarkan keterangan narasumber penelitian, pola KKPA sebenarnya dapat dipahami dengan mudah. Dalam pembangunan kebun kelapa sawit, sangat sulit untuk mendapatkan modal awal pembangunan dengan nominal yang terbilang cukup besar untuk masyarakat petani, sehingga pihak perusahaan disini bertugas sebagai penjamin kepada pihak bank untuk peminjaman modal awal pembangunan kebun kelapa sawit tersebut. Segala yang berkaitan dengan urusan pembukaan lahan sampai dengan perawatan di empat tahun pertama, perusahaan yang bertanggung jawab mengelolanya. Setelah usia tanaman memasuki tahun ke-empat, pihak perusahaan lalu mengkonversikan kebun tersebut untuk masyarakat dengan kebijakan porsi pembagian 50 : 50 (50% inti untuk perusahaan dan 50% plasma/petani) untuk lahan yang sudah lebih dahulu tersedia. Sedangkan lahan yang masih berupa hutan/semak belukar, pembagian menjadi 70 : 30 dengan persentase pembagian 70% untuk perusahaan inti dan 30% untuk petani plasma. Jika diawal lahan milik masyarakat terpisah-pisah, setelah dilakukan kesepakatan, pengukuran dan pembagian, kemudian lahan akan direlokasi dalam satu hamparan kebun plasma sehingga memudahkan pengawasan kepada petani plasma.

Kesepakatan selanjutnya, pola KKPA ini mewajibkan petani plasma untuk menjual TBS (Tandan Buah Segar) yang siap panen untuk perusahaan yang bersangkutan. Hal tersebut didukung oleh harga yang diberikan perusahaan sesuai

⁵⁴ Masrokan, Manager Kebun *First Resources* Regional Riau) Wawancara langsung pada tanggal 5 November 2017 pukul 10.00 WIB

dengan harga yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Riau. Harga yang disesuaikan oleh Dinas Perkebunan lebih tinggi dibandingkan dengan harga-harga tengkulak di pasaran sehingga hal tersebut menjadi strategi tersendiri untuk menghindari oknum petani yang menjual TBS diluar perusahaan. Setelah kredit peminjaman modal kepada petani oleh bank terbayar lunas melalui pemotongan 30% hasil penjualan TBS setiap bulan yang diurus secara kolektif oleh koperasi, maka Sertifikat Hak Milik (SHM) yang kepengurusannya berjalan bersamaan dengan pembangunan kebun, dapat diserahkan kepada petani.

3. Pelatihan Program Kemitraan Pola KKPA Untuk Karyawan *First Resources* Regional Riau



Gambar 3.1 Para Karyawan Baru Mengikuti Pelatihan Di *First Resources Learning Center* Kubang, Pekanbaru-Riau

Sumber : dokumentasi milik direksi Umum KKPA *First Resources* Regional Riau

Salah satu program yang dimiliki oleh First Resources adalah pelatihan khusus untuk para karyawan baru yang rata-rata terdiri dari *Fresh Graduate*. Pelatihan ini dikhususkan untuk memberikan materi dan sosialisasi tentang industri perkebunan *First Resources*. Salah satu materi yang diajarkan adalah tentang Kebun Kemitraan KKPA. Dalam pelaksanaannya, para karyawan baru yang terdiri dari *fresh graduate* tersebut diwajibkan untuk menjalani karantina sebagaimana prosedur yang ditetapkan oleh *First Resources* dalam penerimaan karyawan baru. Karantina berjalan selama kurang lebih 5-6 bulan di asrama milik First Resources Regional Riau yang disebut dengan *First Resources Learning Centre* (FRLC). FRLC berlokasi di jalan Kubang Raya, Kelurahan Kubang, Kec. Siak Hulu Pekanbaru, Riau.

Mentor yang bertugas untuk memberikan materi merupakan para petinggi-petinggi di perusahaan *First Resources* Regional Riau. Bentuk dari sosialisasi ini serupa wujudnya dengan proses pembelajaran di perkuliahan. Selain diberikan beragam materi seputar perusahaan perkebunan yang terdiri dari produksi, kegiatan operasional dan kegiatan teknisnya, para karyawan baru di didik sebagaimana pelatihan militer. Dengan ketentuan latihan fisik dan mental, *First Resources* memiliki alasan khusus mengapa pelatihan ini mewajibkan anggotanya untuk di didik seperti layaknya seorang tentara militer. Salah satu alasannya adalah agar fisik dan mental para karyawan baru siap untuk ditempatkan di lokasi-lokasi yang telah ditentukan oleh *First Resources* karena mengingat lokasi perkebunan memiliki medan-medan yang cukup rumit dan masih banyak ditemukan satwa-satwa buas yang kerap kali menyerang saat akan dilaksanakannya pembangunan kebun di lahan-lahan kosong. Atas dasar alasan ini, *First Resources* menerapkan pelatihan khusus yang tidak hanya memberikan informasi dan edukasi terhadap karyawan tetapi juga sekaligus melatih para karyawan baru agar siap secara fisik dan mental untuk dapat menyesuaikan diri dengan kondisi di lapangan.

Dalam melaksanakan pelatihan ini, *First Resources* memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada para karyawan baru yang bergabung dalam perusahaan perkebunan *First Resources*. Salah satu materi yang diberikan adalah informasi yang berkaitan dengan kebun kemitraan KKPA. Sejauh ini, *First Resources* mengakui para karyawan baru yang bergabung dalam perusahaan, masih banyak yang belum mengetahui tentang program kemitraan KKPA. Dengan adanya pelatihan khusus ini, *First Resources* memberikan gambaran dan informasi-informasi terkait pola KKPA yang harus dikuasai oleh para karyawan baru karena KKPA merupakan bagian penting dari pelaksanaan bisnis perkebunan kelapa sawit.

“memang kita melatih karyawan baru ini harus keras, apalagi yang penempatannya nanti di perkebunan. Perkebunan itu kadang masih di daerah hutan dan semak belukar, masih sering dijumpai harimau dan binatang buas lainnya. Maka dari itu kita maunya karyawan ini siap lah dengan kondisi yang ada di lapangan.”⁵⁵

⁵⁵ (Masrokan, Manager Kebun bagian umum *First Resources* Regional Riau) Wawancara langsung pada tanggal 6 November 2017 pukul 09.30 WIB

4. Kerjasama Kebun Kemitraan Pola KKPA oleh PT PISP di Rokan Hulu, Riau



Gambar 3.2 Lokasi Pabrik PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PT. PISP), Anak Perusahaan Milik *First Resources Ltd Regional* Riau.

Sumber : dokumentasi pribadi peneliti

Dalam implementasinya, pihak perusahaan mengaku jika pelaksanaan kebun kemitraan atau KKPA tersebut dari pihak perusahaan tidak termasuk dalam kepengurusan bagian CSR, terdapat divisi khusus untuk menangani program tersebut karena program ini terbilang cukup luas dan merupakan salah satu aspek penting yang harus dijalankan. Tetapi pihak perusahaan tidak memungkiri bahwa dasar-dasar dari seluruh kegiatan pola KKPA ini terbilang sama dengan kegiatan CSR sehingga perusahaan menyetujui pola KKPA dapat dikategorikan sebagai salah satu kegiatan CSR. Menurut penjelasan Masrokan, oleh karena *First Resources* wilayah Riau terdiri dari 27 anak perusahaan yang bersubdiari, akan sangat sulit untuk mengumpulkan keseluruhan data dari tiap-tiap anak perusahaan. Peneliti mengambil salah satu anak perusahaan dari *First Resources Ltd Regional* Riau yaitu PT. Perdana Intisawit Perkasa atau biasa disingkat PT. PISP yang berlokasi di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

PT. PISP memiliki kebun dan beberapa koperasi yang bekerja sama menangani transaksi kelapa sawit di desa-desa yang terdapat di sekitar Kabupaten Rokan Hulu. Telah dibahas melalui pihak perusahaan dalam wawancara sebelumnya, Program KKPA ini mengandalkan koperasi sebagai wadah perantara antar masyarakat dengan pihak perusahaan maupun bank.

“Kalau mau tahu tentang KKPA First Resources, akan sangat luas sekali, karena kami terdiri dari 27 anak perusahaan untuk di wilayah Riau saja. Tetapi secara keseluruhan sistem dan teknis dari masing-masing anak perusahaan kami semua sama karena tergabung dalam bidang yang sama juga yaitu kelapa sawit.”⁵⁶

PT. PISP sendiri telah bermitra dengan 18 unit koperasi yang tiga diantaranya adalah koperasi KKPA dan selebihnya merupakan koperasi anggota PIR-TRANS. Dari hasil data yang dipaparkan oleh pihak perusahaan, penjualan kelapa sawit tidak memiliki target tertentu. PT. PISP setiap bulannya akan membeli TBS (Tandan Buah Segar) tergantung dengan jumlah tonase kelapa sawit dan kondisi masa naik serta turunnya musiman TBS tersebut. Seperti pada tahap periode Desember 2017, berat TBS yang dijual petani mencapai 18.741.130 ton. Pada bulan Januari 2018 penjualan mencapai 16.116.050 ton dan pada bulan Februari 2018 turun menjadi 10.399.780 ton. Hasil penjualan tersebut merupakan gabungan TBS kelapa sawit dari 18 jumlah koperasi yang bermitra dengan PT. PISP. Dalam transaksi penjualan, perusahaan tidak menargetkan secara khusus jumlah tonase yang harus dijual kepada perusahaan. PT. PISP selaku anak perusahaan *First Resources* menyadari jika setiap periodenya jumlah produksi sawit selalu mengalami naik-turun yang disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan teknis dan kondisi lingkungan.

⁵⁶ (Masrokan, Manager Kebun bagian umum *First Resources* Regional Riau) Wawancara langsung pada tanggal 6 November 2017 pukul 09.30 WIB.

Selain itu, PT. PISP turut bermitra dengan Bank Riau Kepri. Bank Riau Kepri merupakan salah satu lembaga keuangan perbankan yang menjadi bagian dalam pengelolaan kebun kemitraan KKPA di PT. PISP. Bank Riau Kepri memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan kebun kemitraan KKPA khususnya di wilayah Rokan Hulu, Riau. Pihak Bank turut serta membantu kesejahteraan masyarakat dan juga membimbing masyarakat untuk menjadi mandiri dengan upaya mengelola penghasilan sendiri melalui kebun kelapa sawit ini. Adapun pihak Bank Riau Kepri terlebih dahulu melihat potensi dan peluang yang ada di suatu daerah sebelum membuat produk atau kebijakan tertentu. Untuk di daerah Rokan Hulu sendiri pihak Bank Riau Kepri melihat besarnya potensi dan peluang dalam pembangunan kebun kelapa sawit yang dibentuk dengan sistem kemitraan pola KKPA. Bank Riau Kepri juga telah membuat SKIM Kredit yang dikhususkan untuk agribisnis yang menangani kebun kelapa sawit dan karet karena melihat besarnya peluang dan potensi yang ada di daerah Rokan Hulu tersebut. Kemudian pihak Bank Riau Kepri menyepakati kerjasama dengan koperasi dan perusahaan.

Pengecekan kondisi lahan dan sistem pembagian hasil menjadi langkah awal yang dilaksanakan pihak Bank Riau Kepri untuk memastikan kerjasama kebun kemitraan dengan pihak perusahaan. Menurut Robby, selaku pihak Bank Riau Kepri, pihak perusahaan pun sudah mempunyai pemetaan untuk kawasan wilayah kebun inti dan plasma sekaligus perusahaan menjamin lahan yang diajukan bebas dari konflik jika sudah akan meminta pihak bank untuk bekerjasama. Lebih lanjut dalam membahas terkait agunan, pihak Bank Riau Kepri menyatakan bahwa terkait masalah agunan memang sertifikat menjadi persyaratan utama yang mutlak harus dimiliki untuk investasi jangka panjang ini, tetapi saat ini dipermudah untuk investasi khusus perkebunan berkat kerjasama pihak bank dan perusahaan, perusahaan yang semula dikatakan sebagai avalis tersebut pihaknya adalah penjamin atas pembangunan perkebunan kepada pihak bank.

“sebelum menyepakati kerjasama dengan perusahaan dan koperasi terlebih dahulu kami melakukan pengecekan terhadap kondisi lahan, kami harus memastikan lahan tidak berbenturan dengan kawasan yang dilindungi, misalnya. Kemudian kami melihat kondisi lahannya, bagaimana kelayakannya. Lalu kami melihat bagaimana sistem pengelolaan hasil. Untuk PT. PISP sendiri harga yang ditetapkan cukup bagus karena sesuai dengan harga Disbun. Dan keseluruhan prosedur kerjasamanya juga sejauh ini tidak ada masalah hanya mungkin kendala sertifikat saja.”⁵⁷



Gambar 3.3 Wawancara dengan Pihak Bank Riau Kepri di Koperasi Mulya Mandiri di Desa Rambah Hilir Tengah, Kabupaten Rokan hulu, Riau
Sumber : dokumentasi pribadi peneliti

⁵⁷ (Robby, Pegawai Bank Riau Kepri) Wawancara langsung pada tanggal 9 November 2017 pukul 09.00 WIB.

C. Implementasi Program Kemitraan KKPA di Tengah Masyarakat Riau

Tabel 3.3

Rangkuman Wawancara Petani Binaan Program Kemitraan Pola KKPA PT. PISP

No.	Narasumber	KUD	Manfaat	Kendala
1.	Wandi	Pengurus dan anggota KUD Rizki Abadi	-Meningkatkan perekonomian masyarakat -Harga yang ditetapkan PT. PISP untuk membeli TBS cukup tinggi sesuai harga disbun - akan membangun warung kebutuhan rumah tangga dari dana SHU	-Akses jalanan yang rusak akibat musim hujan membuat petani sulit mengirimkan TBS ke pabrik PT. PISP -Keterlambatan pada penerbitan sertifikat -SDM yang dimiliki desa tidak sebanding dengan yang dimiliki perusahaan sehingga sering terjadi miss-komunikasi
2.	Tarmizi	Pengurus dan anggota KUD Mulya Mandiri	-PT. PISP tidak menetapkan target khusus untuk petani menjual TBS nya, PT. PISP membeli TBS berdasarkan jumlah panen yang ada -dengan adanya KKPA, KUD Mulya Mandiri membuka lahan usaha baru untuk anggota mereka,	-Akses jalan yang cukup sulit menjadi kendala dalam pengiriman TBS

			seperti membuat toserba di desanya. -mengangkat harkat dan martabat petani anggota dan mampu meningkatkan perekonomian - akan membangun toserba untuk menambah pendapatan petani anggota dari dana SHU	
3.	Samsuri	Anggota Petani Koperasi PIR-TRANS	-Dapat menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi di Jawa di jurusan kedokteran -Penghasilan setiap bulannya cukup untuk kebutuhan sehari-hari -memiliki kebun kelapa sawit yang dapat diwariskan ke anak cucunya. -PT. PISP membeli dengan harga yang cukup tinggi	-Penerbitan sertifikat yang sangat lama hingga memakan waktu lebih dari 20 tahun

Penulis melakukan observasi langsung ke kebun kelapa sawit PT PISP yang berlokasi di Rokan Hulu Provinsi Riau. Dalam observasi ini peneliti melakukan wawancara dengan tiga narasumber pihak koperasi binaan PT PISP. Koperasi pertama adalah KUD (Koperasi Unit Desa) Mulya Mandiri yang berlokasi di Desa Rambah Hilir Tengah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Selanjutnya adalah KUD (Koperasi Unit Desa) Rizki Abadi yang berlokasi di Desa Kepayang, Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Selain itu peneliti menemui beberapa warga anggota koperasi PIR-TRANS yang juga merupakan anggota koperasi binaan PT PISP. Fakta yang ditemui dilapangan adalah masyarakat disamping berprofesi sebagai petani dan mendapatkan lahan dari PT PISP,

mereka turut serta terlibat menjadi anggota dan pengurus dari koperasi tempat binaan PT PISP. Koperasi secara utuh diurus dan diketuai oleh mereka yang merupakan masyarakat petani. Masyarakat yang merupakan subjek utama dalam pelaksanaan kebun kemitraan pola KKPA ini telah lebih dulu menyadari fungsi dari pembentukan koperasi sebagai penunjang kegiatan transaksi dan mata pencaharian mereka sebagai petani kelapa sawit. Dalam pengakuan Wandu yang merupakan salah satu anggota dan pengurus koperasi KKPA Rizki Abadi, mereka dapat memanfaatkan keberadaan koperasi sebagai alternatif untuk kepentingan anggotanya. Koperasi memudahkan mereka untuk melakukan kegiatan simpan pinjam serta menunjang penghasilan lain diluar kegiatan perkebunan kelapa sawit dikarenakan koperasi yang dibangun tidak semata-mata dikhususkan untuk urusan kebun melainkan koperasi berbentuk umum sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan dan sektor lain diluar transaksi kebun kelapa sawit.

“Fungsi koperasi adalah sebagai wadah untuk melakukan kegiatan operasional dalam tahapan pembangunan hingga perawatan kebun kelapa sawit. Sebelum kebun kelapa sawit dibangun, terlebih dulu harus memiliki koperasi yang berbentuk umum dalam artian koperasi tidak hanya dikhususkan untuk menangani kebun saja, bisa juga untuk keperluan dan kegiatan lain. Koperasi ini juga harus disahkan oleh dinas koperasi kabupaten setempat.”⁵⁸

Dalam melakukan wawancara kepada masyarakat, peneliti mendapati pula fakta di lapangan bahwa program kemitraan ini dijalankan oleh petani KKPA dan petani PIR-TRANS. Tetap dengan sistem yang sama dengan KKPA, yaitu memanfaatkan koperasi dalam setiap kegiatan transaksinya, petani PIR-TRANS

⁵⁸ (Wandu, Pengurus Koperasi KKPA Rizki Abadi) Wawancara langsung pada tanggal 9 November 2017 pukul 07.00 WIB.

yang turut bekerja sama dengan PT PISP sudah terlebih dahulu bermukim di wilayah Rokan Hulu karena mereka merupakan peserta bagian dari program pemerintah yang mendatangkan penduduk dari Jawa dengan tujuan untuk pemerataan penduduk demi kesejahteraan masyarakat. Samsuri selaku narasumber pihak yang terdata dalam program PIR-TRANS contohnya sudah menetap di Sumatera sejak tahun 1992. Warga yang terdata dalam program PIR-TRANS ini mendapatkan hak berupa rumah dengan lahan 1,2 Ha dan kebun seluas 2 Ha. Selain itu warga PIR-TRANS mendapat jatah konsumsi untuk kurun waktu satu tahun yang subsidi keseluruhannya telah diatur oleh pemerintah pada saat itu.

Oleh karena ditiadakannya lagi program PIR-TRANS oleh pemerintah, perusahaan mengambil alih untuk pelaksanaan kemitraan tersebut dengan mengambil pola KKPA. Di dalam pelaksanaan kemitraan ini terdapat dua kelompok masyarakat yang terdiri dari petani PIR-TRANS dan Petani KKPA.

“pada saat itu, kita diupah untuk bekerja di lahan kebun plasma PIR-TRANS. Kami dibayar murah pada tahun 1992 itu. Program itu milik pemerintah dan tidak ada konversi atau kerjasama dengan perusahaan seperti sekarang ini.”⁵⁹

Adapun dari keseluruhan pelaksanaan program kebun kemitraan KKPA ini, baik petani KKPA dan petani PIR-TRANS memiliki prosedur kegiatan yang terbilang sama. Berikut beberapa perbedaan dari PIR-TRANS dengan petani KKPA :

⁵⁹ (Samsuri, Petani PIR-TRANS) Wawancara langsung pada tanggal 9 November 2017 pukul 12.00 WIB.

Table 3.4

Perbedaan Petani PIR-TRANS dengan Petani KKPA ⁶⁰

PIR-TRANS	KKPA
<ul style="list-style-type: none">• Mendapatkan fasilitas berupa tempat tinggal, lahan perkebunan seluas 2 Ha dan jatah konsumsi selama 1 tahun diawal pelaksanaannya.	<ul style="list-style-type: none">• Petani tidak mendapatkan fasilitas dari pemerintah
<ul style="list-style-type: none">• Memiliki koperasi	<ul style="list-style-type: none">• Memiliki koperasi
<ul style="list-style-type: none">• Mendapatkan kebun konversi	<ul style="list-style-type: none">• Mendapatkan kebun konversi
<ul style="list-style-type: none">• Penghasilan dipotong 30% untuk pelunasan kebun konversi kepada pihak bank (oleh koperasi pengurus)	<ul style="list-style-type: none">• Penghasilan dipotong 30% untuk pelunasan kebun konversi kepada pihak bank (oleh koperasi pengurus)
<ul style="list-style-type: none">• Penghasilan tidak dipotong biaya perawatan. Untuk perawatan kebun diserahkan sepenuhnya kepada petani	<ul style="list-style-type: none">• Penghasilan penjualan perbulan dipotong untuk biaya perawatan sehingga urusan perawatan, pemilihan pupuk dan bibit diserahkan kepada pihak koperasi

Dalam tabel diatas ditemui bahwa perbedaan dari PIR-TRANS dan petani KKPA hanya dari sisi fasilitas dan pemotongan penghasilan untuk biaya perawatan kebun. Dari keseluruhan prosedur pelaksanaan terbilang sama dan tidak jauh berbeda. Untuk PIR-TRANS merawat kebun dengan biaya masing-masing tanpa ada pemotongan dari koperasi setiap bulannya. Menurut Samsuri selaku petani PIR-TRANS, anggota PIR-TRANS sudah terbentuk lebih awal tanpa ada penyeleksian dikarenakan mereka telah diseleksi pada awal pelaksanaan program PIR-TRANS oleh pemerintah beberapa tahun yang lalu sehingga tidak diperlukan lagi seleksi seperti program KKPA. Antara petani KKPA dan petani PIR-TRANS secara keseluruhan prosedurnya sama karena masing-masing mempunyai koperasi sebagai wadah kerjasama antara perusahaan dan juga bank untuk pelunasan kredit lahan.

⁶⁰ Perbedaan petani KKPA dan PIR-TRANS. Sumber data : wawancara langsung oleh Samsuri, anggota koperasi PIR-TRANS

“anggota PIR-TRANS sudah terlebih dahulu bermukim dan telah diseleksi oleh pemerintah sejak zaman dulu, jadi sebelum ada lahan pola KKPA yang sekarang ini, anggota petani kami sudah ada, kalau KKPA kan harus dibentuk dulu dicari anggotanya.”⁶¹

Sedangkan untuk koperasi KKPA, peneliti mewawancarai dua koperasi KKPA yang bermitra dengan PT PISP yaitu KUD (Koperasi Unit Desa) Mulya Mandiri yang berlokasi di Desa Rambah Hilir Tengah, Kabupaten Rokan hulu, Riau, dan KUD Rizki Abadi yang berlokasi di Desa Kepayang, Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan hulu, Riau. Pengurus koperasi sendiri merupakan masyarakat yang merangkap profesi sebagai petani, mereka adalah pihak yang ikut serta memiliki kebun plasma hasil dari program kemitraan pola KKPA ini, sehingga masyarakat tentunya menyadari fungsi dari berdirinya koperasi tersebut. Wandi mengakui dengan adanya koperasi unit desa, kerjasama dalam hal tahapan pembangunan kebun kelapa sawit mulai dari pembukaan lahan, administrasi, perawatan hingga penjualan dan penyelesaian sertifikat keseluruhannya diatur oleh koperasi. Untuk masyarakat, koperasi dinilai sebagai wadah untuk menyatukan semua keinginan petani dan masyarakat dengan lembaga berkekuatan hukum dan legalitas yang jelas untuk kemudian disampaikan ke perusahaan tentang apa kendala di lapangan sehingga perusahaan dapat membantu menyelesaikan persoalan di lapangan. Berbeda dengan Petani PIR-TRANS, untuk menjadi petani KKPA terlebih dahulu harus dilakukan pendaftaran peserta untuk kemudian dapat bergabung dan terdaftar sebagai anggota koperasi KKPA.

“Fungsi koperasi adalah sebagai wadah untuk melakukan kegiatan operasional dalam tahapan pembangunan hingga

⁶¹ (Samsuri, Petani PIR-TRANS) Wawancara langsung pada tanggal 9 November 2017 pukul 12.00 WIB.

perawatan kebun kelapa sawit. Sebelum kebun kelapa sawit dibangun, terlebih dulu harus memiliki koperasi yang berbentuk umum dalam artian koperasi tidak hanya dikhususkan untuk menangani kebun saja, bisa juga untuk keperluan dan kegiatan lain. Koperasi ini juga harus disahkan oleh dinas koperasi kabupaten setempat.”⁶²

a). Manfaat Program Kemitraan pola KKPA bagi Masyarakat



Gambar 3.4 Wawancara dengan Masyarakat Petani, Lokasi Koperasi KKPA Mulya Mandiri di Desa Rambah Hilir Tengah, Kabupaten Rokan hulu, Riau

Sumber : dokumentasi pribadi peneliti

Dilaksanakannya program KKPA ini mendapat respon yang cukup baik dari pihak masyarakat. Pelaksanaan kebun kemitraan oleh PT PISP dirasa sangat membantu menunjang perekonomian masyarakat. Masyarakat tersebut adalah mereka yang ikut terjun langsung sebagai anggota dan pengurus koperasi serta

⁶² (Wandi, Pengurus Koperasi KKPA Rizki Abadi) Wawancara langsung pada tanggal 9 November 2017 pukul 07.00 WIB.

mereka yang memiliki kebun plasma. Adanya pembangunan kebun KKPA kelapa sawit di Desa Rambah Hilir Tengah ini menguntungkan dari sisi ekonomi. Sebelum bertani sawit, mereka sudah terlebih dahulu menjadi petani karet. Salah satu penyebab petani di Rokan Hulu lebih senang menanam sawit adalah pengelolaan kelapa sawit tidak lebih sulit jika dibandingkan dengan pengelolaan pohon karet yang terbilang cukup sulit karena pada musim hujan, getah karet akan sulit diperoleh sehingga jika sudah masuk musim hujan banyak petani karet yang tidak berproduksi. Sedangkan jika dibandingkan dengan kelapa sawit, cukup lebih menguntungkan karena disamping harus memakan waktu yang lebih lama untuk panen, tetapi hasilnya sangat memuaskan dan walaupun musim hujan kebun kelapa sawit tetap bisa produksi. Serupa dengan pernyataan Tarmizi sebagai pihak pengurus koperasi Mulya Mandiri, Wandi yang merupakan pengurus koperasi Rizki Abadi mengakui akan manfaat yang dirasakan setelah lebih dari 10 tahun menjalani program kemitraan KKPA oleh PT PISP di wilayahnya, petani merasakan kesejahteraan dari sisi ekonomi dimana mereka tidak perlu kekurangan penghasilan dan mata pencaharian setelah berjalannya program ini. Mereka pun merasa memiliki penghasilan yang cukup setiap bulannya.

“Dengan adanya pembangunan kebun KKPA ini, mengangkat harkat dan martabat kami para petani dari sisi ekonomi. Karena jujur saja dari zaman dulu kami hanya berprofesi sebagai petani kebun karet, dimana karet itu perawatannya sangat susah tidak seperti kelapa sawit yang tetap menghasilkan. Jika dulu musim hujan, karet susah sekali untuk produksi, tetapi sekarang walaupun musim hujan, kelapa sawit tetap menghasilkan untuk kami.”⁶³

⁶³ (Tarmizi, Pengurus Koperasi KKPA Mulya Mandiri) Wawancara langsung pada tanggal 9 November 2017 pukul 08.30 WIB

Berbeda dengan Samsuri yang merupakan petani dan anggota koperasi PIR-TRANS, Samsuri mengakui PIR-TRANS lebih merasa diuntungkan, karena lahan diperoleh dan mereka juga berhak mendapatkan hunian tempat tinggal serta jatah makan selama satu tahun, sesuai dengan kebutuhan mereka karena anggota PIR-TRANS ini mayoritas adalah mereka yang berpindah dari pulau Jawa, sehingga pada masa itu untuk menciptakan keadilan masyarakat yang merupakan penduduk asli di daerah tersebut dibuatkan program kebun KKPA sebagai sarana lapangan pekerjaan. Samsuri yang menjadi anggota PIR-TRANS semenjak tahun 1992 mengaku program PIR-TRANS membawanya berhasil menyekolahkan putra-putrinya di Jawa dan merasakan keuntungan adanya kebun kemitraan pola KKPA ini. Selain itu, Petani dan masyarakat merasa diuntungkan dengan adanya program pola KKPA dari sisi ekonomi karena tanaman sawit merupakan tanaman yang selalu menghasilkan setiap bulannya.

Selain itu menurut pengakuan dua pengurus koperasi Mulya Mandiri dan koperasi Rizki Abadi, adanya dana Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap tahunnya dari hasil kegiatan koperasi dapat membawa manfaat tersendiri bagi masyarakat, contohnya untuk tahun ini kedua koperasi tersebut berencana membangun toserba dan warung perlengkapan rumah tangga untuk menunjang kesejahteraan masyarakat anggota koperasi serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di desa sekitar koperasi.



Gambar 3.5 Wawancara dengan Petani Koperasi PIR-TRANS

Sumber : dokumentasi pribadi peneliti

b). Kendala Program Kemitraan Pola KKPA bagi Masyarakat

Kedua koperasi KKPA dan anggota koperasi PIR-TRANS memaparkan beberapa kendala terkait kegiatan dari pengelolaan kebun kemitraan ini, adapun kendala terbagi dari tingkatan dengan skala kecil sampai skala besar. Dalam membahas tentang kendala, pihak Koperasi Rizki Abadi dan Koperasi Mulya Mandiri memiliki jawaban yang sama terkait masalah transportasi di kala musim hujan tiba. Kendala umum yang dirasakan masyarakat tersebut adalah jika memasuki musim hujan, akses jalan dan transportasi pengiriman TBS menjadi terhambat. Sulitnya menjangkau jalan yang rusak merupakan salah satu kendala dengan skala kecil, pihak pengurus koperas Rizki Abadi sudah menyiapkan solusi atas kendala ini dengan cara menyiapkan kendaraan yang lebih memungkinkan untuk digunakan dalam menjangkau medan besar seperti menggunakan mobil *Hard Top*. Jalan rusak diakibatkan oleh intensitas hujan yang tinggi saat memasuki musim hujan. Masih terdapat banyak jalan yang belum teraspal menyebabkan akses sering terhambat. Walaupun masyarakat sudah memiliki

solusi tersendiri dari permasalahan akses jalan ini, masyarakat tetap berharap perusahaan dapat memberikan bantuan bagi desa untuk memperbaiki kondisi jalanan sehingga dapat menghemat biaya bagi petani.

c). Kendala Permasalahan Sertifikat

Selain kendala SDM yang meliputi minimnya segi pengetahuan dan teknologi yang dimiliki desa, menurut Wandu selaku pihak pengurus koperasi KKPA Rizki Abadi SDM yang dimiliki desa terbilang masih sangat kalah dengan SDM yang dimiliki perusahaan. Kendala cukup dirasakan karena minim pengetahuan dari pihak desa sehingga terdapat kesenjangan pengetahuan dan beberapa *miss-komunikasi* di lapangan. Seperti untuk masalah penyelesaian sertifikasi saat masa konversi. Penyelesaian sertifikat ini menjadi salah satu kendala yang terbilang cukup besar karena penyelesaiannya sendiri tidak melalui perusahaan melainkan berada di tangan BPN. Bentuk dari penerbitan sertifikat dapat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan atas nama petani peserta yang menjadi peserta anggota dari kebun kemitraan KKPA dan juga sertifikat dapat berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama koperasi yang bermitra dengan perusahaan. Oleh karena urusan penerbitan adalah mutlak kewenangan dari BPN dan perusahaan hanya menjadi perantara dalam kepengurusannya, tidak jarang ditemui di lapangan kendala tentang keterlambatan masalah penerbitan sertifikat yang seharusnya sudah terbit saat memasuki masa konversi empat tahun umur tanaman.

“Apalagi sekarang, mbak. Penerbitan sertifikat menjadi lebih lama, lebih disiplin ketentuan-ketentuannya, kami masih ada lagi 44 sertifikat yang masih nyangkut belum diterbitkan.”⁶⁴

⁶⁴ (Wandu, Pengurus Koperasi KKPA Rizki Abadi) Wawancara langsung pada tanggal 9 November 2017 pukul 07.00 WIB.

Permasalahan sertifikat diakui juga oleh Samsuri yang merupakan anggota koperasi PIR-TRANS, baginya sertifikat menjadi hak tersendiri bagi para petani yang sudah melaksanakan kewajibannya untuk melunasi lahan konversi dari perusahaan kepada pihak bank dengan cara melakukan pemotongan penghasilan setiap bulannya. Menghadapi fenomena terlambatnya penerbitan sertifikat hak milik (SHM) maupun sertifikat hak guna usaha (HGU) membuat Samsuri merasa kecewa kepada pihak perusahaan. Samsuri turut menambahkan bahwasannya kendala yang sampai saat ini terjadi adalah penerbitan sertifikat yang cenderung memakan waktu lama. Pihak petani beramsumsi bahwa sertifikat sepenuhnya tanggung jawab perusahaan karena petani tidak memiliki akses kepada pihak BPN sehingga petani berharap kendala dalam urusan sertifikat dapat diselesaikan sesegera mungkin dikarenakan sudah banyak lahan yang masuk masa konversi dan petani sudah melunasi kreditnya dengan bank, tetapi sertifikat belum di dapat dalam jangka waktu tersebut.

“Kendala pastilah ada, untuk masalah sertifikat. Ini kan perusahaan bilang itu diurus oleh BPN, sekarang petani tidak ada urusannya dengan BPN, urusan petani kan sama perusahaan. Sekarang adek bayangkan saja, usia tahun tanam dari 1997 sampai sekarang tahun 2017 masih ada beberapa sertifikat yang belum terbit, kendalanya dimana? Sampai sekarang belum ada solusinya.”⁶⁵

Robby, selaku pihak Bank Riau Kepri turut membahas terkait penerbitan sertifikat yang menjadi permasalahan agunan. Tetapi pihak perusahaan yang perannya adalah sebagai avalis, terlebih dahulu memberikan jaminan kepada pihak bank berupa deposito sampai sertifikat tanah tersebut selesai dan diterbitkan oleh BPN. Deposito yang ditentukan oleh Bank Riau Kepri kepada PT PISP

⁶⁵ (Samsuri, Petani PIR-TRANS) Wawancara langsung pada tanggal 9 November 2017 pukul 12.00 WIB.

berkisar 20% dari total harga konversi. Dalam kurun waktu empat tahun, kebun kelapa sawit baru dapat menghasilkan TBS (Tandan Buah Segar) yang kemudian dijual kepada perusahaan dan hasil penjualan tersebut dipotong oleh koperasi untuk memudahkan petani melunasi hutang kepada bank setiap bulannya. Deposit yang merupakan jaminan oleh perusahaan tersebut digunakan di awal masa pembangunan kebun, karena kebun baru menghasilkan kelapa sawit diusia empat tahun, maka sebelum itu pihak perusahaan meyakinkan bank dengan cara menjadi penjamin atau avalis. Bank dianggap sebagai pihak ketiga yang menjadi pendukung keberlangsungan perkembangan diri dan kesejahteraan masyarakat.

“agunan ini dalam perkembangan saat ini terdapat beberapa kemudahan, yang awalnya berupa sertifikat, tetapi untuk kebun ini agunan yang dipakai adalah tujuan investasi untuk apa dan itulah yang dipegang untuk agunan. Berarti lahan yang dijadikan objek investasi tersebut yang menjadi agunannya tetapi karena surat tanah belum selesai jadinya kami akomodir dengan avails perusahaan yang berupa deposito yang telah disiapkan oleh perusahaan.”⁶⁶

Adapun sertifikat seutuhnya merupakan tanggung jawab pihak BPN dimana dalam kepengurusannya memang perusahaan ditugaskan menjadi pihak perantara dalam membantu petani mengurus segala persyaratan yang diajukan BPN untuk menerbitkan sertifikat. Kendala sertifikat diakui oleh pihak Koperasi KKPA Rizki Abadi dan salah satu anggota koperasi PIR-TRANS yang keduanya sama-sama tidak mengetahui akar dari permasalahan mengapa sertifikat cenderung mengalami keterlambatan terbit hingga untuk beberapa koperasi bisa sampai memakan waktu selama kurang lebih 20 tahun menunggu sertifikat kebun sawitnya diterbitkan. Seperti yang telah diketahui dalam pengakuan dari petani dan pihak bank yang terlibat langsung dengan program kemitraan pola KKPA ini,

⁶⁶ (Robby, Pegawai Bank Riau Kepri) Wawancara langsung pada tanggal 9 November 2017 pukul 09.00 WIB.

pihak mereka mengakui penerbitan sertifikat menjadi salah satu kendala dan persoalan yang kompleks dalam implementasi program kemitraan KKPA tersebut. Pihak masyarakat petani dan Bank tentunya tidak memiliki kewenangan untuk mengurus secara langsung kepada pihak BPN. Perusahaan menjadi satu-satunya yang berhak dan bertanggung jawab dalam perantara penerbitan sertifikat hak milik kebun kelapa sawit yang telah dilunasi petani setelah memasuki masa konversi tersebut.

Bahkan, Rahmat selaku utusan pihak perusahaan yang bertugas di kebun kemitraan turut menambahkan perihal urusan sertifikat. Rahmat mengakui maraknya keluhan tentang penerbitan sertifikat ini menjadi salah satu kendala yang diterima perusahaan dari masyarakat. Menurutnya, pihak perusahaan selalu mengutus staffnya untuk memberikan penyuluhan terkait penerbitan sertifikat yang memang kendala ini berada diluar kewenangan perusahaan sehingga perusahaan sebenarnya hanya menjadi perantara antara pihak BPN dengan masyarakat sendiri. Sertifikat berbentuk SHM dan HGU merupakan sertifikat yang akan diberikan untuk petani plasma setelah petani melunasi kredit bank perbulan yang dipotong dari hasil penjualan TBS (Tandan Buah Segar) ke perusahaan melalui koperasi. Kendala terlambatnya penerbitan sertifikat ini dapat berlangsung hingga beberapa tahun bahkan ketika angsuran petani kepada bank telah terbayar lunas. Hal tersebut dikarenakan pihak BPN yang semakin memberikan persyaratan ketat dan peraturan-peraturan kelengkapan berkas, selain itu jumlah koperasi yang bermitra dengan perusahaan perkebunan di provinsi Riau yang jumlahnya tidak sedikit sehingga menimbulkan keterlambatan untuk penerbitan sertifikatnya.

“penerbitan sertifikat memang lama dan itu menjadi salah satu kendala kami, sebenarnya yang memiliki hak untuk menerbitkan sertifikat itu adalah BPN, Badan Pertahanan Nasional bagian agrarian. Pekerjaan mereka sebenarnya tidak hanya mengurus sertifikat untuk 1 atau 2 koperasi saja,

bahkan seluruh koperasi yang ada di kabupaten ini, jangankan setahun dua tahun, bisa sampai empat sampai lima tahun baru selesai. Jadi kendala tentang sertifikat ini bukan berasal dari petani maupun perusahaan, tetapi ini adalah kewenangan BPN. Memang dari penerbitannya yang agak lama.”⁶⁷



**Gambar 3.6 Lokasi Koperasi KKPA Rizki Abadi Desa Kepayang
Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Sumber : dokumentasi pribadi peneliti**

⁶⁷ (Rahmat, Asisten Kebun *First Resources*) Wawancara langsung pada tanggal 9 November 2017 pukul 09.00 WIB.

BAB IV

PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan membahas hasil penelitian yang dilaksanakan di *First Resources* Regional Riau yang berlokasi di Gedung Surya Dumai Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru, Riau. Dengan mengambil satu dari 27 anak perusahaan milik *First Resources*, yaitu PT. PISP, peneliti menjadikan PT. PISP sebagai objek yang mewakili *First Resources* untuk observasi program kemitraan pola KKPA di tengah masyarakat. Penelitian ini membahas seputar implementasi sehingga selain melakukan penelitian ke kantor *First Resources*, peneliti juga melaksanakan penelitian langsung ke lapangan dimana masyarakat di wilayah sekitar industri menjadi subjek pelaksana dalam tema penelitian ini.

Sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya, penelitian ini mengambil tema tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) di *First Resources* Regional Riau yang beroperasi di bidang usaha perkebunan kelapa sawit. Menurut penjabaran Prastowo & Huda (2011) tentang ISO 26000, terdapat tujuh elemen pendukung berjalannya kegiatan CSR yang efektif yaitu (1) adanya tata kelola perusahaan yang baik (GCG), (2) Praktik perusahaan terhadap karyawannya, (3) lingkungan, (4) isu tentang perilaku konsumen, (5) praktik operasi bisnis yang adil dan transparan, (6) pengembangan masyarakat dan (7) hak asasi manusia.⁶⁸ Berdasarkan penjabaran tersebut, dengan menerapkan standarisasi kegiatan CSR yang dijelaskan dalam ISO 26000 perusahaan dapat mewujudkan program CSR secara efektif.

CSR sendiri merupakan tanggung jawab sosial perusahaan dimana perusahaan wajib memegang teguh suatu komitmen untuk berkontribusi memberikan pengembangan dalam segi kesejahteraan masyarakat dan juga kelestarian lingkungan. CSR merupakan sebuah kewajiban yang memiliki sanksi (*strict*

⁶⁸ Apsari A. A. & Rohman A. "Perspektif Pelaku Bisnis Perhotelan di D.I Yogyakarta terhadap CSR." *Jurnal Komunikasi*. Volume 7 No. 1. Tahun 2012

liability) dan pelaksanaannya telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dimana Undang-Undang tersebut dilatar belakangi oleh kondisi perusahaan yang memanfaatkan wilayah sekitar industrinya.⁶⁹ Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tidak terlepas dari peran sumber daya di sekitarnya baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka CSR menjadi sebuah kewajiban bagi perusahaan yang tujuannya untuk menjaga keberlangsungan kegiatan usaha dalam jangka panjang. Jika perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan tanggung jawab sosial ini, perusahaan yang bersangkutan akan mendapat sanksi sebagaimana dengan ketentuan dari perundang-undangan yang terkait (Pasal 74). Dalam Pasal 74 UU terdapat penjelasan tentang limitasi terhadap sebuah instansi dan harus diterapkan dalam praktek bisnisnya. Adapun maksud dari Pasal 74 adalah sebagai pedoman bagi setiap perusahaan yang menjalankan operasi bisnisnya di bidang sumber daya alam maupun perusahaan yang tidak memanfaatkan sumber daya alam. Kedua jenis perseroan tersebut tetap wajib menaruh perhatian lebih terhadap kondisi lingkungan dan sosial.⁷⁰ Walaupun salah satu perseroan bergerak di bidang yang tidak memanfaatkan sumber daya alam sebagai pendukung aktivitas bisnisnya, perseroan tersebut wajib memberikan perhatian yang serupa untuk kondisi lingkungannya. Hal tersebut disebabkan oleh kegiatan perusahaan yang dapat dipastikan akan memberi dampak terhadap fungsi kemampuan sumber daya alam di lingkungan sekitarnya.

Sumber daya terkadang tidak hanya datang dari masyarakat dan lingkungan saja. Selain daripada itu terdapat sektor finansial atau keuangan seperti lembaga keuangan perbankan yang turut serta mengambil peran dalam pelaksanaan CSR. Ada bermacam-macam jenis kegiatan CSR yang dilakukan di *First Resources Regional Riau*. Jenis-jenis kegiatan CSR tersebut merupakan kebijakan yang

⁶⁹ Untung Budi. 2014. “*CSR dalam Dunia Bisnis*”. Yogyakarta : CV Andi Offset

⁷⁰ *Ibid*

dipilih dan telah dirumuskan oleh perusahaan untuk diterapkan dalam kegiatan usahanya.

A. Analisis Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) *First Resources* Regional Riau

Dalam kutipan wawancara pada bab sebelumnya, pihak *First Resources* mengakui pentingnya melaksanakan kegiatan CSR disamping CSR merupakan kebijakan dan kewajiban yang dibuat oleh pemerintah. *Philanthropic Responsibility* atau tanggung jawab filantropis merupakan bagian paling utama dari Tanggung Jawab Sosial perusahaan (CSR). Tanggung jawab filantropis merupakan bukti nyata bagi pihak perusahaan untuk mulai mengarahkan perhatian serta rasa peduli kepada kondisi wilayah luar. Wilayah luar yang dimaksud adalah masyarakat dan lingkungan sosialnya. Tidak hanya sekedar untuk memperkaya diri semata, dalam tanggung jawab filantropis, perusahaan turut serta memperhatikan berbagai macam jenis kebutuhan sosial yang dibutuhkan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.⁷¹ Filantropis merupakan lapisan tertinggi dari tanggung jawab perusahaan. Dimensi filantropis harus menjadi diskresionari bagi perusahaan agar dapat lebih meningkatkan kepeduliannya akan kualitas hidup masyarakat. Siahaan (2014) mengungkapkan para aktivis dan akademisi CSR menciptakan istilah *greenwash* bagi perusahaan yang hanya menutupi kinerja buruknya dengan berlomba-lomba menciptakan kegiatan CSR atas dasar penguatan citra semata. Biasanya perusahaan tersebut hanya berdalih atau membuat iklan yang semata-mata mendeskripsikan mereka sebagai instansi yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Sedangkan selain itu ada perusahaan yang memang benar-benar melaksanakan program CSR

⁷¹ Yosephus L. S., 2010. "*Etika Bisnis*". Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia

secara baik. Biasanya program-program yang disusun merupakan program yang sifatnya demi kepentingan jangka panjang.⁷²

Table 4.1
Elemen-elemen Dimensi Filantropis pada Program CSR *First Resources*
Regional Riau⁷³

NO.	Dimensi Filantropis	Implementasi
1.	Edukasi	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan beasiswa bagi siswa-siswi pilihan • Membangun gedung sekolah di desa wilayah sekitar mitra <i>First Resources Regional Riau</i>
2.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Program “Sehat Bersama FR” dengan menyediakan layanan kesehatan gratis berupa dokter keliling
3.	Program bantuan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Safari Ramadhan • Bantuan pelaksanaan kegiatan MTQ • Pembangunan rumah ibadah • Pembangunan Gerbang dan Tugu kantor balai desa
4.	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • <i>First Resources</i> memberikan bantuan keramba dan bibit ikan untuk desa Danau Lancang, Riau sebagai program kewirausahaan • Pelatihan tata rias dan menjahit untuk ibu-ibu rumah tangga di desa Bangsal Aceh, Meridan Simpang Beringin dan Kerinci Kanan Provinsi Riau.
5.	Kepedulian terhadap lingkungan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Program penghijauan “FR GO GREEN”

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari *First Resources Regional Riau*, usaha untuk mewujudkan tanggung jawab sosial (CSR) adalah dengan

⁷² Siahaan, J. T. H., 2014. “*Memungut Remah-remah Kehidupan*”. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia

⁷³ Yosephus L. S., *Op.cit*

pelaksanaan dan implementasi dari beberapa program CSR yang dimiliki *First Resources*. *First Resources* turut melaksanakan program CSR yang terdiri dari beberapa bidang, diantaranya: (1) CSR dalam bidang ekonomi, (2) CSR dalam bidang sosial budaya, lingkungan dan kesehatan, (3) CSR dalam bidang pendidikan dan (4) CSR dalam bidang infrastruktur. Keempat bidang kategori CSR tersebut dijalankan oleh *First Resources* dengan terlebih dahulu menyesuaikan kebutuhan masyarakat di wilayah sekitar industri. Contohnya *First Resources* pada tahun 2017 mengadakan program bantuan keramba dan bibit ikan untuk Desa Danau Lancang Provinsi Riau, program bantuan tersebut dilaksanakan untuk tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam bidang pendidikan, *First Resources* turut serta melaksanakan program sosial dengan memberikan beasiswa bagi siswa-siswi pilihan serta beberapa sekolah gratis untuk masyarakat. Beberapa contoh tersebut merupakan implementasi dari tanggung jawab filantropis dari program-program CSR yang dilaksanakan oleh *First Resources* Regional Riau.

First Resources berharap dengan bantuan yang diberikan perusahaan, masyarakat dapat memanfaatkannya demi menambah pendapatan. Selain itu, *First Resources* memberikan bantuan berupa layanan kesehatan gratis untuk masyarakat yang tinggal di sekitar daerah sekitar industri. Dengan adanya layanan kesehatan ini masyarakat tidak perlu khawatir akan biaya pengobatan yang terbilang cukup tinggi. Serupa dengan kegiatan CSR dalam bidang ekonomi dan kesehatan, bidang infrastruktur maupun bidang pendidikan juga diterapkan dalam bentuk pemberian bantuan kepada desa.

Dapat dikatakan bahwa empat bidang kegiatan CSR yang dijalankan oleh *First Resources* memenuhi kriteria dari dimensi filantropis sebagaimana yang telah di jelaskan dalam tabel diatas. Hampir dari keseluruhan implementasi program CSR yang dilaksanakan oleh *First Resources* merupakan program dalam bentuk bantuan. Program bantuan tersebut merupakan wujud dari adanya tanggung jawab sosial yang dikemukakan oleh Bertens. Menurut Bertens,

tanggung jawab sosial atau lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* merupakan wujud dari tujuan sosial dan kegiatannya dilaksanakan tanpa memperhitungkan untung atau ruginya bagi perusahaan. Program-program CSR harus mengedepankan kepentingan lingkungan dan masyarakat tanpa adanya kepentingan ekonomis.⁷⁴ Sebagaimana pendapat Bertens tentang *Corporate Social Responsibility*, *First Resources* telah melakukan beberapa bantuan dengan bersifat sukarela untuk masyarakat. *First Resources* melaksanakan kegiatan CSR tersebut murni untuk memberikan bantuan berupa penyaluran dana tanpa mendapat sesuatu kembali untuk keuntungan pihak perusahaan.

B. Program Kemitraan Pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) Sebagai Program Pemanfaatan Lahan Tanam *First Resources* Regional Riau

KKPA merupakan singkatan dari Kredit Koperasi Primer untuk Anggota. *First Resources* mengadopsi program yang awalnya merupakan milik pemerintah ini untuk kemudian diterapkan secara pribadi tanpa campur tangan dari pemerintah. Menjadi bagian diluar divisi CSR, *First Resources* memiliki Program Kemitraan Pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) yang turut serta memiliki andil dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pola KKPA dapat diperjelas sebagai program binaan dari *First Resources* untuk membantu masyarakat petani yang bermukim di sekitar wilayah industri. Dengan berperan sebagai bapak angkat atau pemberi modal utama dalam pembangunan kebun kemitraan ini, *First Resources* memberikan jaminan berupa deposit kepada pihak bank agar dapat meminjamkan modal pembangunan kebun kemitraan KKPA sehingga masyarakat petani dapat memiliki kebun kelapa sawit sendiri dengan syarat melunasi kredit yang dipinjamkan oleh bank.

Berdasarkan temuan lapangan tentang pengertian program kemitraan KKPA, dapat dikatakan jika KKPA merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan dan

⁷⁴ Bertens K. 2013. "*Pengantar Etika Bisnis.*" Yogyakarta : PT. Kanisius

penerapan konsep *Triple Bottom Line* atau dikenal dengan istilah 3P. 3P merupakan konsep yang diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan *Corporate Social Responsibility*. Adapun 3P meliputi *Planet* dimana istilah *planet* diartikan sebagai gambaran lingkungan dengan memprioritaskan pembangunan kebun yang berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan artinya adalah perusahaan memiliki komitmen untuk tidak melakukan kerusakan terhadap lingkungan bahkan membantu memperbaiki lingkungan. Selanjutnya adalah *People*. *People* dapat diartikan sebagai masyarakat dan istilah *people* diambil untuk menggambarkan kesejahteraan. Kesejahteraan ditujukan untuk masyarakat sekitar yang terlibat dalam kegiatan industri. Terakhir adalah *Profit*. *Profit* adalah keuntungan dan pencapaian perusahaan yang di dapatkan secara finansial atas keselarasan dari pelaksanaan 3P. *Profit* merupakan pencapaian yang di dapatkan oleh pihak perusahaan setelah menjalankan kewajiban-kewajiban moral dan sosial perusahaan.⁷⁵

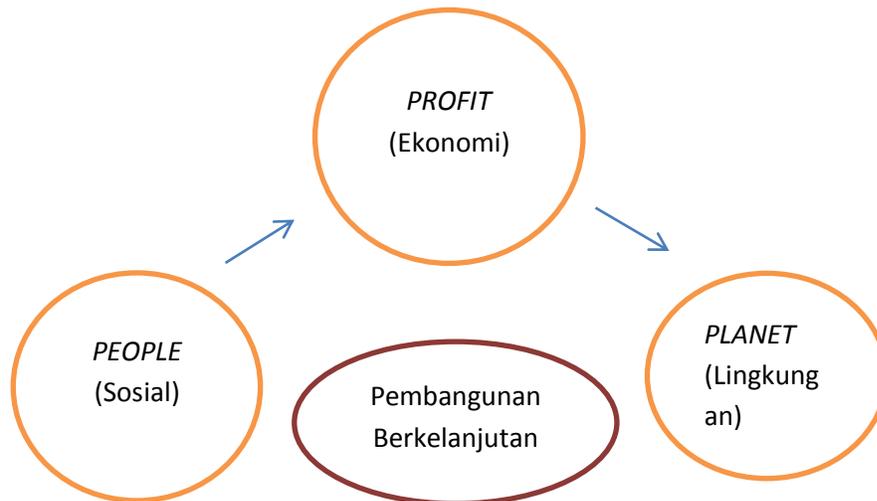
Menurut Bartens, terdapat dua jenis tanggung jawab di dalam bisnis (perusahaan), yaitu tanggung jawab ekonomis dan tanggung jawab sosial (CSR). Tanggung jawab sosial atau lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* merupakan wujud dari tujuan sosial dan kegiatannya dilaksanakan tanpa memperhitungkan untung atau ruginya bagi perusahaan. Sedangkan di sisi lain perusahaan turut serta bertanggung jawab atas kesejahteraan pemegang sahamnya dalam artian perusahaan wajib memperoleh keuntungan atas kegiatan bisnisnya demi kepentingan stakeholdernya.⁷⁶ Selain itu menurut Milton Friedman (1912) sebagaimana dikutip oleh Yosephus, “*The social responsibility of business is to increase its profits.*” Maksudnya, tanggung jawab sosial harus dapat menunjang *profit* bagi perusahaan dan setiap perusahaan baru dapat

⁷⁵ Rachman Nurdizal M, Efendi Asep, Wicaksana Emir, *op.cit*

⁷⁶ Bertens K, *Op.cit*

melaksanakan tanggung jawab lainnya apabila tanggung jawab internalnya telah terlebih dahulu tercukupi.⁷⁷

Di dalam pelaksanaan program kemitraan pola KKPA ini, *First Resources* menerapkan konsep 3P yang di dalamnya terdapat unsur CSR yaitu dari sisi *People* dan *Planet*. Sedangkan *Profit* merupakan bentuk dari tanggung jawab ekonomis yang dapat memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan disamping menjalankan tanggung jawab sosialnya. Ketiga unsur 3P tersebut dapat berjalan selaras dan akan mewujudkan *sustainability* bagi perusahaan, lingkungan maupun masyarakat.



People : hubungan sosial masyarakat merupakan komitmen *First Resources* untuk terus menjaga eksistensinya ditengah masyarakat dengan membangun kebun kemitraan pola KKPA sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Planet : dengan adanya program kemitraan pola KKPA oleh *First Resources*, masyarakat akan merasa ikut memiliki kebun dan tentunya akan menjaga kebun mereka dengan baik.

Profit : Adanya kebijakan perusahaan tentang kewajiban petani untuk menjual seluruh hasil panen TBS kelapa sawitnya kepada *First Resources* sehingga perusahaan tetap dapat menjaga keuntungan dan kestabilan produksi minyak kelapa sawit.

⁷⁷ Yosephus L. S., *Op.cit*

**Bagan 4.1 Hubungan integratif *Triple Bottom Line*
pada *First Resources Regional Riau* ⁷⁸**

1. People

Dari data temuan wawancara narasumber *First Resources*, ditemukan fakta bahwa semua anak perusahaan milik *First Resources Regional Riau* diwajibkan melaksanakan program kemitraan pola KKPA ini yang tujuannya untuk membangun mitra-mitra perusahaan yang mandiri sekaligus fokus dalam pembangunan desa di wilayah provinsi Riau. Usaha pihak *First Resources* untuk membangun masyarakat yang mandiri merupakan salah satu kategori dari *Community Development* yang dalam pengertiannya, menurut Blackburn (1989) *Community Development* adalah pengembangan masyarakat tentang kualitas hubungan sosial dan disertai dengan perubahan-perubahan menuju arah kemajuan dan kesejahteraan secara terencana dan bersifat gradual.⁷⁹ Lebih singkatnya, *Community Development* dapat dipahami secara praktis dalam konteks pengembangan masyarakat. Dalam ISO 26000 sebagaimana yang dibahas sebelumnya, *community development* atau pengembangan masyarakat merupakan salah satu wujud dari elemen pendukung efektivitas kegiatan CSR. Melalui *community development*, perusahaan secara tidak langsung melatih masyarakat lebih mandiri secara finansial dengan dapat mengelola sendiri keuangannya lewat program kemitraan pola KKPA.

Dalam program kemitraan pola KKPA, masyarakat yang merupakan gabungan kelompok petani sawit mendapatkan edukasi secara tidak langsung melalui sistem yang diterapkan dalam program KKPA, seperti petani mengelola sendiri hasil keuangannya setiap bulan dengan menjual hasil panen kelapa sawit

⁷⁸ Sumber : John Elkington, *The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998) dalam Rachman Nurdizal M, Efendi Asep, Wicaksana Emir, *Op.cit*

⁷⁹ Nasdian, F. T. 2014. "*Pengembangan Masyarakat*". Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia

ke anak perusahaan milik *First Resources*, selain itu petani juga sekaligus mengelola kepengurusan koperasi yang di dalamnya terdapat kesepakatan untuk melunasi lahan yang diberikan perusahaan pada tahap konversi. Lahan yang disediakan oleh perusahaan terlebih dahulu dimodali di awal pembangunannya oleh perusahaan yang berperan sebagai bapak angkat. Lewat kredit bank, perusahaan dapat membangun kebun mulai dari tahap awal penanaman hingga perawatan. Saat memasuki usia tanam 4 tahun (masa konversi) kebun diserahkan ke masyarakat disertai dengan tanggung jawab masyarakat untuk melunasi kredit bank yang telah berjalan. Setiap bulannya masyarakat harus membayar cicilannya berdasarkan hasil pemotongan transaksi penjualan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang dijual oleh petani untuk kemudian melunasi kredit dari bank itu sendiri. Dengan sistem yang berjalan tersebut, petani secara tidak langsung mendapatkan edukasi untuk menjadi lebih profesional dengan cara menjalankan komitmennya untuk mengelola lahan yang dimodali oleh *First Resources*.

Selain itu berdasarkan keterangan yang diperoleh melalui dua koperasi yang menjadi mitra dari PT. PISP (anak perusahaan milik *First Resources* Regional Riau), adanya program kemitraan pola KKPA ini menambah kas koperasi sehingga dana Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dimiliki koperasi dapat dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat terutama anggotanya. Contohnya dalam waktu dekat kedua koperasi tersebut akan membangun sebuah toserba yang menjual perlengkapan rumah tangga dan keperluan sehari-hari. Hal ini merupakan salah satu bentuk *sustainability* dari pengembangan masyarakat dengan adanya program kemitraan KKPA karena di samping masyarakat mendapatkan keuntungan materil dari adanya program tersebut, secara tidak langsung petani anggota di didik untuk menjadi lebih inovatif dalam berinvestasi demi kepentingan mereka dalam jangka panjang diluar sektor perkebunan kelapa sawit. Sehingga suatu saat kondisi penjualan kelapa sawit menurun, mereka tetap memiliki *secondary income* dari adanya pembukaan toko serba guna tersebut.

Mengutip jurnal komunikasi yang ditulis oleh Triyono, setelah melaksanakan analisis yang menjadi tahap awal dari pelaksanaan program *community development*, perusahaan selaku pemilik program terlebih dahulu melaksanakan sosialisasi tentang program yang akan direalisasikan kepada seluruh masyarakat di wilayah tersebut.⁸⁰ Selain itu menurut Blackburn seperti yang dikutip oleh Nasdian, penyuluhan merupakan suatu bagian integral dari pelaksanaan *community development*. Penyuluhan juga merupakan sebuah strategi dalam keberlangsungan program pengembangan masyarakat.⁸¹

Namun *First Resources* tidak melakukan penyuluhan atau sosialisasi secara langsung kepada masyarakat terkait program kemitraan KKPA ini. Menurut dua narasumber dari koperasi yang bermitra dengan PT. PISP, perusahaan tidak melakukan sosialisasi secara langsung dengan masyarakat tetapi hanya berkomunikasi dengan pengurus koperasi atau sebagian tokoh masyarakat dalam suatu desa. Jika terjadi suatu masalah di lapangan, pihak *First Resources* hanya menjalin komunikasi dengan pengurus koperasi dan beberapa tokoh masyarakat yang mewakili pertemuan dengan perusahaan.

Sebagai salah satu contoh kendala yang ditemui di lapangan tentang penerbitan sertifikat SHM dan HGU yang cenderung memakan waktu sangat panjang. Keterlambatan dalam penerbitan sertifikat ini dinilai salah satu narasumber di lapangan sebagai sebuah kendala yang tidak kunjung ditemukan solusinya dan masyarakat berharap perusahaan dapat segera memberikan sertifikat yang sudah menjadi hak mereka setelah melunasi kredit lahan pada bank. Akan tetapi penerbitan sertifikat kenyataannya bukan merupakan kewenangan perusahaan melainkan sepenuhnya adalah kewenangan BPN. Adanya *miss* komunikasi tersebut antara pihak masyarakat dengan perusahaan

⁸⁰ Triyono Agus. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui *Community Development* Program Posdaya(Pos Pemberdayaan Keluarga) PT. Holcim Indonesia Tbk Pabrik Cilacap." *KomuniTi*. Volume 6 No. 2. Tahun 2014.

⁸¹ Nasdian F. T., *Op.cit*

merupakan bentuk dari kurangnya perhatian *First Resources* untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan langsung kepada masyarakat petani anggotanya.

2. *Planet*

Ada banyak dampak yang dapat ditimbulkan dari aktivitas perusahaan, terlebih perusahaan perkebunan yang berlokasi di Provinsi Riau sebagaimana yang kita ketahui dalam 2 tahun terakhir, Provinsi Riau menjadi salah satu penyumbang titik api terbesar dalam fenomena kabut asap di Indonesia.⁸² Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pembakaran lahan sebagai upaya oknum perusahaan untuk membuka lahan baru atau *replanting* kebun dengan tujuan untuk menghindari *high-cost*. Faktor kedua adalah kurangnya edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak sembarangan membakar sampah terlebih di musim kemarau.

Pola KKPA turut serta mengedukasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, perusahaan dinilai telah melaksanakan tanggung jawab sosial dalam bidang kepedulian lingkungan sosial sebagaimana teori 3P yang membahas tentang *Planet* sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Pelaksanaan kebun kemitraan pola KKPA merupakan salah satu strategi bagi *First Resources* demi mencegah fenomena kabut asap yang hampir setiap tahunnya terjadi di Provinsi Riau. Dalam implementasinya, program kemitraan pola KKPA ini menurut *First Resources* dilaksanakan dengan salah satu tujuan untuk mengurangi dampak fenomena kabut asap yang kerap melanda Provinsi Riau. Manfaat KKPA bagi perusahaan adalah jika masyarakat sudah ikut memiliki kebun sendiri, secara otomatis mereka akan menjaga dan merawat kebun dengan baik karena kebun tersebut merupakan *primary income* bagi masyarakat sehingga kebiasaan untuk membakar sampah sembarangan di area sekitar kebun menjadi berkurang.

⁸² Sumber <http://riausky.com/news/detail/5866/hari-ini-riau-penyumbang-titik-api-terbesar-di-sumatera.html> artikel terbit 2016, diakses pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 19.00 WIB

Selain itu, berdasarkan kesepakatan dalam Millenium Development Goal's (MDG's) tahun 1990-2005 terdapat kebijakan tentang komitmen untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup. Keberlanjutan lingkungan hidup adalah prinsip yang harus benar-benar dijadikan acuan bagi perusahaan untuk menyusun program-program CSR nya.⁸³ Keberlanjutan lingkungan hidup dinilai menjadi sebuah strategi tersendiri bagi *First Resources* untuk tetap menjaga eksistensi perusahaannya dan sekaligus untuk menjaga lingkungan agar tetap dapat dinikmati para generasi mendatang. Dengan *First Resources* memberikan hak kelola lahan tanam berupa program kemitraan pola KKPA untuk masyarakat, secara tidak langsung masyarakat akan menjaga kebun miliknya dan dapat dipastikan masyarakat tidak akan membakar lahan atau sampah sembarangan yang dinilai dapat menjadi pemicu kebakaran hutan serta fenomena kabut asap yang kerap terjadi di Provinsi Riau. Hal ini menjadi bentuk dari upaya perusahaan untuk mempertahankan keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan (*sustainable*) karena dengan petani merawat secara baik kebun yang dimilikinya saat ini, generasi yang akan datang akan tetap dapat menikmati dan mengelola sumber daya alam yang saat ini kita gunakan.

3. *Profit*

Dalam jabaran Kotler and Lee tentang *Socially Responsible Business Practice* yang artinya perusahaan berpedoman kepada suatu praktik bisnis tentang investasi perusahaan dan sekaligus mendukung kondisi sosial dengan menyusun program pemberdayaan masyarakat dan juga pelestarian lingkungan.⁸⁴ *Profit* sebenarnya bukan merupakan wujud dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Seperti yang telah dibahas sebelumnya, CSR yang sesungguhnya hanya

⁸³ Untung Budi. *Op.cit*

⁸⁴ Kotler Philip, Lee Nancy. 2005. "*Corporate Social Responsibility*". New Jersey : John Wiley & Sons, Inc

mementingkan kepentingan masyarakat dan lingkungan saja tanpa adanya kepentingan ekonomis yang dapat menguntungkan pihak perusahaan. Tetapi tidak dapat dielakkan jika perusahaan yang dapat memberikan kontribusi besar bagi masyarakat dan lingkungan adalah perusahaan yang telah lebih dahulu memperoleh laba dalam kegiatan bisnisnya.⁸⁵

Dalam temuan di lapangan, program KKPA yang dijalankan oleh *First Resources* ini memuat kebijakan tentang kewajiban petani anggota program kemitraan *First Resources* untuk melakukan penjualan kembali hasil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dari kebun yang mereka kelola ke anak perusahaan milik *First Resources* yang menjadi mitra mereka. Kebijakan tersebut merupakan bentuk dari adanya kepentingan ekonomis yang dilakukan perusahaan. Salah satu tujuan perusahaan membuat kebijakan tersebut adalah untuk menjaga kestabilan tingkat produksi minyak kelapa sawit mentah setiap bulannya. Hal tersebut sesuai dengan konsep *profit* dalam 3P yang turut serta mempertimbangkan keuntungan perusahaan berupa tanggung jawab ekonomis demi meningkatkan kesejahteraan stakeholdernya sembari melaksanakan tanggung jawab sosial.

Dengan adanya kebijakan tentang kewajiban penjualan TBS kelapa sawit hanya kepada anak perusahaan *First Resources*, hal ini berdampak terhadap *profit* perusahaan sehingga dengan menjaga kestabilan finansial perusahaan, *First Resources* dapat terus menanamkan modal pembangunan kebun sebagai upaya untuk mengembangkan program kemitraan KKPA ini ke berbagai wilayah dan daerah di Provinsi Riau sehingga masyarakat akan semakin sejahtera dalam jangkauan yang lebih luas. Selain itu, disamping *First Resources* membuat kebijakan tentang kewajiban petani anggota untuk menjual seluruh hasil panen kelapa sawitnya, *First Resources* turut serta memperhatikan hubungan kerja sama yang berkelanjutan dengan menetapkan harga pembelian Tandan Buah Segar

⁸⁵ Bertens K., *Op.cit*

(TBS) kelapa sawit sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan. Harga tersebut cenderung memiliki nominal yang cukup tinggi dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses penetapan harga tersebut melalui media cetak setiap minggunya sehingga kebijakan penetapan harga kelapa sawit yang ditetapkan oleh *First Resources* dilaksanakan secara transparan kepada masyarakat.

Dengan begitu *First Resources* dikatakan telah melaksanakan kegiatan usaha secara *sustainable* sembari terus memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara lebih luas dan masyarakat pun akan secara berkelanjutan menjaga hubungan kerjasama dengan pihak *First Resources* sembari masyarakat dapat menikmati kontribusi perusahaan dalam program kemitraan pola KKPA tersebut.

Peneliti memilih 3P sebagai konsep yang tepat untuk menggambarkan hubungan antara tanggung jawab sosial (CSR) dengan tanggung jawab ekonomis yang dijalankan perusahaan. Mengingat *First Resources* merupakan salah satu perusahaan swasta yang dalam kegiatan bisnisnya terdapat tujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar, tentunya *First Resources* harus memastikan keberlangsungan kegiatan bisnisnya. Jika sebuah perusahaan swasta sampai pada titik defisitnya dan berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, dapat dipastikan perusahaan tersebut harus tutup. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, peran tanggung jawab ekonomis tentunya menjadi sebuah alasan yang masuk akal untuk perusahaan agar dapat mempertahankan bisnisnya dalam jangka panjang.⁸⁶

Dengan begitu, konsep 3P menjadi gambaran lengkap karena di dalamnya terdapat unsur tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari sisi peningkatan ekonomi masyarakat yang menjadi anggota koperasi binaan program kemitraan pola KKPA oleh *First Resources*. Selain itu tanggung jawab sosial perusahaan dari segi lingkungan juga terwujud dari adanya program kemitraan pola KKPA

⁸⁶ *Ibid*

ini karena secara tidak langsung masyarakat akan menjaga kebun yang diberikan oleh *First Resources* sebagai sumber mata pencaharian bagi mereka. Kedua faktor tersebut merupakan bagian dari implementasi tanggung jawab sosial (CSR) yang disebutkan dalam konsep 3P. Dengan adanya kebijakan dari *First Resources* tentang kewajiban petani anggota untuk menjual hasil panen kelapa sawitnya kepada perusahaan menjadikan faktor tersebut termasuk ke dalam konsep *profit* dalam 3P.

Tabel 4.2

Analisis SWOT CSR dalam Pemanfaatan Lahan Tanam pada Program Kemitraan Pola KKPA *First Resources* Regional Riau

Kekuatan	Kelemahan
<ul style="list-style-type: none"> • <i>First Resources</i> membeli hasil panen TBS kelapa sawit kepada petani anggota dengan harga yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan yang nominalnya cukup tinggi. • Program KKPA meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat petani • Mengurangi dampak kabut asap yang kerap melanda Provinsi Riau (<i>Planet</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>First Resources</i> tidak melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan secara langsung kepada masyarakat terkait program kemitraan KKPA.
Peluang	Ancaman
<ul style="list-style-type: none"> • Koperasi sebagai faktor penting dalam program kemitraan KKPA selalu memiliki dana SHU setiap tahunnya, dana tersebut dimanfaatkan masyarakat petani untuk membangun toserba sebagai <i>secondary income</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>First Resources</i> membuat kesepakatan dengan petani untuk menjual hasil panen kelapa sawit hanya kepada perusahaannya (MoU) di khawatirkan terdapat oknum petani yang tidak menjalankan komitmennya sesuai dengan MoU dengan perusahaan.

Menurut Griffin (2004) analisis SWOT meliputi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Analisis SWOT dapat dimanfaatkan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk mengatur strategi yang mendukung pelaksanaan misi serta mengeksploitasi kekuatan dan kesempatan. Selain itu analisis SWOT mampu menjadi acuan bagi perusahaan untuk dapat menetralsir kelemahan yang dimiliki dan menghindari segala ancaman-ancaman yang datang.⁸⁷ SWOT merupakan acuan bagi perusahaan untuk merumuskan dan menentukan strategi demi keberlangsungan bisnisnya. Sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh Chandler (1962), strategi merupakan bentuk dari tujuan jangka panjang bagi suatu organisasi dan perusahaan dengan pendayagunaan dan alokasi sumber daya yang baik untuk mencapai visi dari perusahaan itu sendiri.⁸⁸

a). Kekuatan (*strength*)

First Resources memiliki 27 anak perusahaan yang masing-masingnya melaksanakan program kemitraan pola KKPA termasuk PT. PISP yang menjadi subjek wawancara di lapangan. Hal ini menjadi sebuah sumber kekuatan bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan adanya program kemitraan KKPA ini dari sisi ekonomi. Disamping itu, *First Resources* memiliki kebijakan untuk petani anggota yang diharuskan menjual seluruh hasil panen TBS kelapa sawitnya hanya kepada pihak anak perusahaan *First Resources*. Dengan menetapkan harga pembelian TBS kelapa sawit yang sesuai dengan standar dari Dinas Perkebunan, petani anggota diuntungkan dengan harga nominal yang tinggi dan juga adanya transparansi harga yang dapat mereka akses melalui media cetak setiap minggunya. Hal ini menjadi sebuah kekuatan untuk

⁸⁷ Griffin Ricky W. 2004. “*Manajemen*”. Jakarta : Erlangga

⁸⁸ (dalam Rangkuti, 2006) Rangkuti Freddy. 2006. “*ANALISIS SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis*”. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

First Resources agar dapat terus menjaga keberlangsungan kerja sama yang menguntungkan masyarakat.

Terdapat sumber kekuatan dari program kemitraan KKPA ini dari segi lingkungan. Adanya program kemitraan KKPA membuat masyarakat merasa memiliki kebun sendiri sehingga mereka akan menjaga lahan dengan tidak membakarnya sembarangan. Jika lahan yang mereka miliki dapat mereka jaga dengan baik, dapat dipastikan lahan perkebunan yang diberikan perusahaan untuk masyarakat dapat mereka manfaatkan hingga generasi mendatang. Hal ini menjadi kekuatan tersendiri bagi *First Resources* untuk terus selalu menjaga lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk jangka waktu yang panjang.

b). Kelemahan (*weakness*)

Dalam wawancara yang dilaksanakan di koperasi binaan PT. PISP (anak perusahaan *First Resources*), didapatkan bahwa *First Resources* tidak melaksanakan sosialisasi ataupun penyuluhan secara langsung kepada masyarakat di dalam program kemitraan pola KKPA tersebut. Komunikasi hanya dijalin perusahaan melalui perantara koperasi atau perwakilan tokoh masyarakat saja tanpa perusahaan terjun langsung ke masyarakat. Hal ini dirasa menjadi sebuah kelemahan dalam pelaksanaan program kemitraan pola KKPA karena terdapat sebuah permasalahan terkait penerbitan sertifikat. Adanya *miss* komunikasi antara masyarakat dengan perusahaan menimbulkan kesalah pahaman di lapangan. Menurut masyarakat penerbitan sertifikat yang tidak kunjung selesai merupakan tanggung jawab pihak *First Resources* sedangkan pada kenyataannya penerbitan sertifikat sepenuhnya adalah kewenangan dari pemerintah yaitu BPN. Melalui permasalahan tersebut dapat diidentifikasi bahwa tidak adanya sosialisasi atau penyuluhan dapat menimbulkan permasalahan terkait informasi.

c). Peluang (*opportunity*)

Selain itu, program kemitraan pola KKPA ini menjadi peluang (*opportunity*) tersendiri bagi masyarakat. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, program kemitraan pola KKPA ini memiliki koperasi sebagai wadah transaksi antara masyarakat dengan perusahaan. Setiap tahunnya koperasi memiliki dana Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dapat dimanfaatkan oleh petani anggota untuk memperoleh *secondary income* contohnya pembangunan toserba yang dapat memenuhi kebutuhan warga dan juga sekaligus memberikan penghasilan tambahan untuk kesejahteraan anggota koperasi. Dengan adanya program kemitraan pola KKPA ini dapat menjadi sebuah peluang tersendiri bagi masyarakat petani anggota untuk memperoleh penghasilan tambahan diluar transaksi kelapa sawit.

d). Ancaman (*threats*)

Ancaman yang ditemukan dalam implementasi pemanfaatan lahan tanam (KKPA) ini berasal dari kelemahan pihak *First Resources* sendiri sebagai pemilik program KKPA. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan mengakibatkan sulitnya pihak perusahaan untuk mengontrol dan mengawasi para oknum petani yang tidak memegang komitmen untuk berperilaku profesional sesuai dengan kesepakatan dalam MoU untuk menjual seluruh hasil panen kepada pihak *First Resources*. Di khawatirkan terdapat oknum petani anggota binaan *First Resources* yang menjual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kepada pihak lain menimbang areal perkebunan di suatu daerah bukan hanya milik *First Resources* tetapi juga terdapat perusahaan lain yang turut serta melaksanakan program KKPA.

Pembahasan terkait tema CSR pada perusahaan perkebunan sudah banyak dikaji pada beberapa penelitian sebelumnya. Salah satu contohnya adalah penelitian berbentuk tugas akhir skripsi yang dilakukan oleh Benedikta Thia Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2013 yang berjudul “Strategi Manajemen Isu PTPN XIII Kalimantan Barat (Studi

Kasus Pada Isu Lingkungan Hidup Terhadap PTPN XIII).” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan terhadap studi kasus untuk mengetahui bagaimana strategi manajemen isu PTPN XIII dalam menangani isu lingkungan hidup.

Isu lingkungan hidup merupakan salah satu permasalahan yang harus diperhatikan terkait kegiatan operasi perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, PTPN XIII Kalimantan Barat mengakui pentingnya memiliki pola strategi manajemen isu. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan peran manajemen isu untuk citra perusahaan. Salah satu program yang dijalankan oleh PTPN XIII adalah program “*go green*” dengan tujuan perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Melalui program “*go green*” tersebut perusahaan merancang program yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan demi meredam maraknya isu-isu yang menerpa PTPN XIII dan kemudian dipublikasikan melalui media, website resmi, media lokal maupun media nasional. Disamping perusahaan menjalankan misinya untuk menangani isu-isu yang menerpa perusahaan dan juga untuk memberikan citra positif, program *go green* ini menjadi salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjaga lingkungannya.

Penelitian selanjutnya merupakan penelitian dalam bentuk jurnal komunikasi yang diteliti oleh Saladin Ghalib, Irwansyah, Yuanita Setyastuti dan Sri Astuty dari fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Penelitian ini berjudul “*Community Relation* Perkebunan Kelapa Sawit Tanah Rawa di Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan.” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui tipe penelitian eksploratif sehingga peneliti dapat menganalisis bagaimana peran *community relation* yang dilakukan perusahaan perkebunan dalam menjaga hubungan baik serta mengatasi konflik dengan masyarakat sekitar perkebunan. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan masyarakat yang terlibat di lapangan.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan adanya peran perusahaan perkebunan kelapa sawit di Tanah Rawa Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan, masyarakat merasa sangat terbantu dalam menanggulangi permasalahan ekonomi dan pengangguran. Perusahaan memberikan 20% lahan miliknya untuk digunakan petani dalam pola plasma kemitraan. Selain memiliki kelebihan, program ini menurut masyarakat masih banyak terdapat kekurangannya dari sisi internal maupun eksternal. Contohnya masih banyak terdapat konflik tentang pembebasan lahan, manajemen karyawan, persoalan batas area perkebunan, perizinan dan lain-lain yang menyebabkan kegiatan *community relation* menjadi terhambat.

Penelitian yang ketiga adalah penelitian dalam bentuk tugas akhir skripsi yang berjudul “Implementasi Program Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) Melalui Pola Kemitraan Pada Sektor Privat (Studi Pada Unit Usaha Bekri, PTPN VII (Persero).” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi, analisis data dokumentasi dan wawancara. Melalui tiga teknik pengambilan data tersebut, peneliti akan mengetahui bagaimana implementasi program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan oleh PTPN VII (Persero). Implementasi pada dasarnya terdiri dari beberapa tahapan yang meliputi perencanaan hingga evaluasi. Skripsi ini membahas tema tentang program pola kemitraan. Pola kemitraan merupakan program pengembangan masyarakat yang bersifat simbiosis mutualisme atau menguntungkan kedua belah pihak.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pada tahap pelaksanaannya, petani mitra mendapatkan bimbingan secara berkala dalam periode tiga bulan sekali, satu bulan sekali dan setiap hari oleh PTPN VII. Program kemitraan ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dari segi pendapatan, pendidikan dan penguatan organisasi lokal. Dalam konteks penanggulangan masalah, PTPN VII melakukan pertemuan bersama petani guna merumuskan bagaimana penyelesaiannya sehingga kebijakan yang di dapatkan dapat

menguntungkan kedua belah pihak. Pelibatan masyarakat petani dalam setiap keputusan yang diambil oleh PTPN VII dapat menciptakan rasa memiliki terhadap program kebijakan perusahaan. Hal ini berguna untuk menjaga hubungan kerjasama yang berlangsung dalam jangka panjang.

Penelitian berikutnya adalah skripsi dengan judul “Aktivitas Humas PT Perkebunan Nusantara V (Persero) Kantor Pusat Pekanbaru Dalam Membina Hubungan Dengan Publik Internal.” oleh Rino Haryadi, Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2015. Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif ini mengamati bagaimana aktivitas humas di PTPN V Pekanbaru melalui wawancara kepada pihak perusahaan dan masyarakat yang terlibat dalam aktivitas ini.

Hasil yang didapatkan dalam wawancara yaitu, perusahaan membuat kebijakan yang tujuannya sebagai bentuk pendekatan terhadap publik internal, adapun kebijakan terdiri dari penyediaan buku yang dibuat khusus untuk pegawai, adanya pertemuan secara berkala, membuat laporan kepada pemegang saham, memberikan fasilitas berupa hiburan serta wisata dan *study tour* untuk karyawan, melakukan pelatihan dan memberi *reward* untuk karyawan yang berprestasi. Selain itu terdapat berbagai macam fasilitas yang disediakan perusahaan untuk karyawannya seperti contohnya fasilitas dalam bidang kesehatan dan fasilitas ruang ibadah. Dalam wawancara yang dilaksanakan dengan karyawan perusahaan, di dapatkan kepuasan atas pelaksanaan aktivitas humas tersebut, aktivitas tersebut diakui dapat membangun suasana harmonis dan menyenangkan diantara masing-masing karyawan. Melalui kegiatan humas ini, perusahaan turut serta memperhatikan kesejahteraan karyawan yang merupakan stakeholdernya.

Penelitian terakhir dilakukan oleh Ismail dengan judul “Strategi *Community Development Officer* (CDO) PT. Waru Kaltim Plantation (WKP) dalam menyelesaikan masalah *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kecamatan Waru Desa Bangun Mulya (Periode Januari - Desember 2015). Dalam Jurnal Ilmu

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui data primer yang diperoleh dari *key informan* dan wawancara langsung oleh pihak perusahaan, penelitian ini dapat mengumpulkan data primer dan sekunder melalui laporan kegiatan CSR, dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan.

Hasil yang di dapatkan dari adanya strategi *community development officer* ini dalam menyelesaikan permasalahan CSR di kecamatan Waru Desa Bangun Mulya (periode Januari – Desember 2015) sudah terlaksana dengan cukup baik. Perusahaan selalu melakukan evaluasi terhadap program-program CSR yang sudah terlaksana. Selain itu PT. Waru Kaltim Plantation (WKP) juga melaksanakan program CSR secara berkelanjutan dengan memanfaatkan peran dari CDO. Adanya program pengembangan komunitas ini memberikan dampak sosial maupun ekonomi di lingkungan tersebut, dampak yang ditimbulkan antara lain adalah terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan terjalinnya hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pihak perusahaan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki perbedaan tentang jenis-jenis program CSR yang dijalankan perusahaan. Melihat beberapa penelitian terdahulu yang telah dijabarkan diatas, dapat dilihat jika beberapa perusahaan perkebunan memilih untuk melaksanakan tanggung jawab dan peran perusahaan dalam isu-isu lingkungan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan di sekitarnya. Mengingat perusahaan perkebunan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya, sehingga adanya tanggung jawab sosial dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tanggung jawab moral yang harus di jalankan perusahaan.

Perbedaan yang terlihat dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian yang dilaksanakan di *First Resources* ini bersifat kompleks, peneliti tidak hanya mengumpulkan data melalui perusahaan atau masyarakat yang berpartisipasi aktif

saja, melainkan penelitian ini melihat bagaimana implementasi program CSR yang berjalan melalui berbagai pihak yang terkait, antara lain adanya peran perusahaan, masyarakat, koperasi hingga bank yang menjadi narasumber dalam wawancara terkait penelitian tentang pemanfaatan lahan tanam milik *First Resources* ini. Selain memfokuskan pembahasan kepada program pemanfaatan lahan tanam perusahaan, penelitian ini juga memaparkan beberapa macam kegiatan CSR yang dijalankan oleh *First Resources* disertai dengan kualifikasi program ke dalam elemen-elemen dimensi filantropis.

C. Analisis Implementasi Program Kemitraan Pola KKPA oleh *First Resources* Regional Riau

Menurut Meter dan Horn, implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang memiliki kepentingan. Implementasi ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dituangkan dalam sebuah kebijakan.⁸⁹ Artinya, setiap kebijakan yang dibuat oleh perseorangan atau kelompok tertentu harus memperhatikan bagaimana implementasi dari berjalannya kebijakan tersebut.

Dalam manajemen implementasi yang digagas oleh James A.F. Stoner dkk, terdapat beberapa tahapan yang menjadi pedoman dari keberlangsungan implementasi kebijakan yang efektif, diantaranya : (1) implementasi Strategi (Pra Implementasi), (2) pengorganisasian manajemen kebijakan, (3) penggerakan kepemimpinan, dan (4) pengendalian kebijakan.⁹⁰

Berdasarkan temuan di lapangan, *First Resources* memiliki program kemitraan pola KKPA yang tujuannya adalah untuk memberikan hak kepada masyarakat petani untuk dapat mengelola lahan kelapa sawit milik perusahaan agar digunakan sebagai mata pencaharian sehari-hari. Program kemitraan pola

⁸⁹ Ali M. 2017. "*Kebijakan Menengah Dalam Perspektif Governance di Indonesia*." Malang : UB Press

⁹⁰ Sulila Ismet, *Op.cit*

KKPA tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan dari pencemaran kabut asap akibat kebakaran hutan. Kedua tujuan tersebut merupakan wujud dari implementasi tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility*. Selain kedua tujuan tersebut, terdapat sebuah kebijakan perusahaan untuk petani anggota agar menjual keseluruhan hasil TBS kelapa sawitnya hanya kepada anak perusahaan milik *First Resources*. Hal ini menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi pihak perusahaan untuk terus menjaga keberlangsungan kerjasama jangka panjang dengan masyarakat dan merupakan bentuk implementasi dari tanggung jawab ekonomis perusahaan bagi shareholdernya.

Adapun program kemitraan pola KKPA tersebut memiliki dua tahapan dalam pelaksanaannya, yang pertama adalah masa Pra-Konversi dan masa Konversi. Dalam masa Pra-Konversi, terdapat beberapa kebijakan dalam pembukaan lahan yang menjadi tahap awal dalam pelaksanaan kerjasama program kemitraan KKPA. Adapun lahan awal diperoleh dengan tiga kriteria, yaitu : (1) adanya tawaran dari perusahaan kepada masyarakat, (2) adanya permintaan dari masyarakat, dan (3) adanya konflik sosial ditengah masyarakat. Ketiga kriteria pembukaan lahan tersebut menjadi bagian utama dari tahapan dalam masa Pra-konversi yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan koperasi sebagai syarat utama dari program kemitraan pola KKPA tersebut. Keseluruhan tahap masa Pra-konversi sampai dengan masa konversi yaitu peralihan hak kebun dari perusahaan kepada masyarakat petani.

Sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh James A.F. Stoner dkk tentang tahapan dalam implementasi, masa Pra-konversi dan Konversi dalam program kemitraan pola KKPA memenuhi unsur-unsur dalam kategori tersebut. Didukung oleh pernyataan Edward III tentang adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam struktur birokrasi. Struktur birokrasi merupakan pembagian fungsi kerja dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk dapat

memudahkan penunjukan spesifikasi bidang kerja.⁹¹ Dalam masa Pra-konversi sampai dengan masa Konversi, terdapat beberapa SOP yang mengatur keberlangsungan tiap-tiap tahapannya seperti kriteria dalam pembukaan lahan sebagai negosiasi awal kerjasama, pencalonan petani anggota hingga persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat petani untuk dapat memiliki hak kebun kelapa sawitnya sendiri.

Menurut Edward III, komunikasi merupakan satu dari empat unsur penting dalam keberlangsungan implementasi kebijakan. Adanya intensifitas penyampaian informasi antara pembuat kebijakan dengan penerima kebijakan menjadi tolak ukur dari implementasi kebijakan yang efektif.⁹² Diperlukan adanya komunikasi yang terjalin dengan baik dari awal pelaksanaan kebijakan hingga sampai tahap evaluasi program. Komunikasi dianggap penting mengingat masyarakat yang menjadi penerima program tidak keseluruhannya paham tentang prosedur-prosedur yang harus ditaati sehingga diperlukan adanya pendekatan-pendekatan berupa sosialisasi untuk meminimalisasi kendala-kendala yang akan terjadi di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, berdasarkan pengakuan dari pihak masyarakat petani selaku mitra kerjasama First Resources, tidak ada sosialisasi atau penyuluhan khusus secara langsung dengan masyarakat yang dilakukan perusahaan dengan masyarakat. Komunikasi dilaksanakan melalui perantara pihak koperasi antara perusahaan dan masyarakat. Jika terjadi masalah di lapangan, masyarakat hanya dapat melaporkannya melalui koperasi yang kemudian disampaikan ke perusahaan, begitu sebaliknya. Dalam temuan lapangan terdapat pertanyaan petani yang mengeluhkan keterlambatan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) yang cenderung memakan waktu yang lama. Keterlambatan penerbitan SHM tersebut menurut pihak masyarakat petani merupakan tanggung jawab penuh perusahaan. Akan tetapi dari pihak perusahaan menyangkal jika penerbitan SHM

⁹¹ *Ibid*

⁹² *Ibid*

adalah kewenangannya, melainkan merupakan tanggung jawab pemerintah yaitu BPN. Fakta di lapangan tersebut menggambarkan terjadinya *miss* komunikasi antara pihak masyarakat dengan perusahaan di akibatkan kurangnya implementasi komunikasi sebagai sarana penyampaian informasi dari pihak pembuat kebijakan dengan penerima kebijakan sehingga implementasinya di lapangan kurang maksimal dan kendala-kendala terkait informasi tidak dapat dihindari.

Selain komunikasi, Edward III mengungkapkan terdapat unsur sumber daya (*resources*) sebagai salah satu faktor penting dari efektivitas suatu implementasi kebijakan. Melalui sumber daya yang baik, perintah-perintah kebijakan akan tersalurkan secara cermat, jelas dan lebih konsisten.⁹³ Sesuai dengan pernyataan Edward III tentang unsur sumber daya, menurut pengakuan pihak First Resources, perusahaan memiliki program pelatihan khusus untuk mendidik karyawan baru. Adapun pelatihan khusus tersebut berupa pemberian materikulasi kepada karyawan yang baru bergabung dengan First Resources agar mereka lebih memahami tentang kebijakan-kebijakan yang dimiliki perusahaan, termasuk kebijakan tentang program kemitraan pola KKPA. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menyadari pentingnya penyampaian informasi dengan melakukan pendekatan berupa penyuluhan agar pesan yang dimaksud dapat tersampaikan dengan baik kepada sumber dayanya.

Faktor berikutnya menurut Edward III tentang efektivitas implementasi kebijakan adalah adanya struktur birokrasi yang menjadi indikator penting terlaksananya implementasi kebijakan yang ideal. Struktur birokrasi membagi bidang-bidang pekerjaan berdasarkan tanggung jawabnya untuk menunjukkan spesifikasi pekerjaan, sehingga kegiatan perusahaan dapat berjalan secara lebih efektif.⁹⁴ Berdasarkan keterangan yang ditemukan di lapangan, *First Resources* melakukan hal yang serupa dengan konsep struktur birokrasi. *First Resources* membedakan antara divisi CSR dengan divisi KKPA yang pada hakikatnya

⁹³ Ibid

⁹⁴ Ibid

program kemitraan pola KKPA merupakan salah satu program yang memenuhi unsur CSR akan tetapi perusahaan memilih untuk membagi tanggung jawab kedua bidang tersebut agar pelaksanaannya menjadi lebih spesifik dan efektif, mengingat program kemitraan pola KKPA memiliki cakupan yang cukup luas.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa bidang program CSR yang dijalankan oleh *First Resources Regional Riau*, diantaranya (1) CSR dalam bidang ekonomi, (2) CSR dalam bidang sosial budaya, lingkungan dan kesehatan, (3) CSR dalam bidang pendidikan dan (4) CSR dalam bidang infrastruktur. Keseluruhan program CSR *First Resources Regional Riau* telah memenuhi kriteria dimensi filantropis dan juga pelaksanaan kegiatan CSR *First Resources* rata-rata terdiri dari bantuan sukarela tanpa adanya kepentingan perusahaan.

Program Kemitraan Pola KKPA menerapkan konsep 3P yaitu *People, Planet* dan *Profit*. Konsep yang memiliki hubungan erat dengan *Corporate Social Responsibility* ini menjelaskan tentang dua tanggung jawab dalam bisnis (perusahaan) yaitu, tanggung jawab ekonomis dan tanggung jawab sosial. Dalam tanggung jawab sosial (*People* dan *Planet*), *First Resources* melaksanakan kewajibannya untuk menyejahterakan masyarakat disertai dengan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup melalui program kemitraan KKPA. Selain itu untuk tanggung jawab ekonomis (*profit*), *First Resources* membuat sebuah kebijakan untuk semua petani anggotanya agar menjual seluruh hasil panen kelapa sawit hanya kepada anak perusahaan *First Resources* sehingga perusahaan tetap mendapatkan keuntungan dari adanya program kemitraan pola KKPA. Keselarasan dari adanya tanggung jawab ekonomis dan sosial (3P) membuat program kemitraan pola KKPA dapat berjalan secara berkelanjutan untuk menyejahterakan masyarakat, lingkungan dan juga keuntungan bagi perusahaan.

B. KETERBATASAN PENELITIAN

Peneliti menyadari bahwa penelitian yang telah dilakukan ini belum sempurna sepenuhnya mengingat adanya beberapa kendala dan keterbatasan selama

penelitian ini berlangsung. Permasalahan yang dialami oleh peneliti adalah *First Resources* sebagai subjek penelitian ini memiliki 27 anak perusahaan sehingga terdapat kendala dalam memilih salah satu anak perusahaan yang akan di observasi dan peneliti merasa pembahasan dalam penelitian ini kurang mengerucut dan terperinci karena subjek utama merupakan *Holding Company* yang memiliki cakupan luas.

C. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut

1. Saran Bagi Perusahaan

Melihat adanya program kemitraan pola KKPA yang dijalankan oleh *First Resources Regional Riau* melalui sumber data yang diperoleh dari salah satu anak perusahaan milik *First Resources* yaitu *PT. PISP*, masih terdapat kekurangan dalam praktek di lapangan seperti kurangnya peran perusahaan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Sebaiknya pihak perusahaan meluangkan waktu untuk mengevaluasi program kemitraan yang sudah berjalan tersebut agar dapat mengurangi kesalah pahaman dari dua belah pihak.

2. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian tentang kebun kemitraan pola KKPA ini, diharapkan peneliti selanjutnya yang akan mengambil tema serupa dapat memaksimalkan penelitiannya dengan memfokuskan pada salah satu anak perusahaan saja untuk dijadikan tema dan judul penelitian agar analisis semakin terperinci dan lebih jelas.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali M. 2017. "*Kebijakan Menengah Dalam Perspektif Governance di Indonesia.*" Malang : UB Press
- Asikin Zainal, Suhartana Wira Pria. 2016. "*Pengantar Hukum Perusahaan.*" Jakarta : Prenadamedia Group
- Bertens K. 2013. "*Pengantar Etika Bisnis.*" Yogyakarta : PT. Kanisius
- Bevly Beni. 2012. "*Corporate Social Responsibility : Hikmah Kegagalan dan Keberhasilan Strategi Bisnis di Amerika Serikat.*" USA : San Fransisco School
- Djakfar Muhammad. 2012. "*Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi.*" Jakarta : Penebar Plus
- Duha, Timotius. 2016. "*Perilaku Organisasi*". Yogyakarta : Deepublish
- Dwidjowijoto Riant N. 2006. "*Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang.*" Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Fauzi Yan, Widyastuti Y. E., Satyawibawa Iman, Paeru R. H. 2012. "*Kelapa Sawit*". Jakarta : Penebar Swadaya
- Griffin Ricky W. 2004. "*Manajemen*". Jakarta : Erlangga
- Kotler Philip, Lee Nancy. 2005. "*Corporate Social Responsibility*". New Jersey : John Wiley & Sons, Inc
- Nasdian, Fredian Tonny. 2014. "*Pengembangan Masyarakat*". Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Panjaitan Leonard Tiopan. 2015. "*Bank Ramah Lingkungan.*" Jakarta : Penebar Plus
- Parsons, Patricia J. 2004. "*Etika Public Relations.*" Jakarta : Erlangga

Parmadean Manuli. 2014. *“Mengelola Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit Secara Profesional.”* Jakarta : Penebar Swadaya

Pawito. 2007. *“Penelitian Komunikasi Kualitatif.”* Yogyakarta : LKiS

Rachman Nurdizal M; Efendi Asep; Wicaksana Emir. 2011. *“Panduan Lengkap Perencanaan CSR”*. Jakarta : Penebar Swadaya

Rangkuti Freddy. 2006. *“ANALISIS SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis”*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

Said, Achmad Lamo. 2015. *“Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance.”* Yogyakarta : Deepublish

Salusu J. 1996. *“Pengambilan Keputusan Stratejik.”* Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia

Siahaan, J. T. H., 2014. *“Memungut Remah-remah Kehidupan”*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Sulila Ismet. 2015. *“Implementasi Dimensi Pelayanan Publik dalam Konteks Otonomi Daerah.”* Yogyakarta : Deepublish

Sunyoto D., Putri Wika H. 2016. *“Etika Bisnis.”* Yogyakarta : CAPS

Untung Budi. 2014. *“CSR dalam Dunia Bisnis”*. Yogyakarta : CV Andi Offset

Yosephus L. S., 2010. *“Etika Bisnis”*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Skripsi

Benedikta Thia “Strategi Manajemen Isu PTPN XIII Kalimantan Barat (Studi Kasus Pada Isu Lingkungan Hidup Terhadap PTPN XIII)” Skripsi Sarjana. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2013.

Rino Haryadi “Aktivitas Humas PT Perkebunan Nusantara V (Persero) Kantor Pusat

Pekanbaru Dalam Membina Hubungan Dengan Publik Internal.” Skripsi Sarjana. Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2015.

Masniati “Efektivitas *Electronic Public Relations* (e-PR) Dalam Membantu Kegiatan Publisitas di PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru” Skripsi Sarjana. Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2012.

Jurnal

Apsari A. A. & Rohman A. “Perspektif Pelaku Bisnis Perhotelan di D.I Yogyakarta terhadap CSR.” *Jurnal Komunikasi*. Volume 7 No. 1. Tahun 2012

Ghalib Saladin, Irwansyah, Setyastuti, Astuti Sri. “*Community Relation* Perkebunan Kelapa Sawit Tanah Rawa di Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan.” *Journal Of Communication Studies*. Volume 2, Nomor 1. Tahun 2017

Ismail. “Strategi *Community Development Officer* (CDO) PT. Waru Kaltim Plantation (WKP) dalam menyelesaikan masalah *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kecamatan Waru Desa Bangun Mulya (Periode Januari - Desember 2015).” *E- Journal Ilmu Komunikasi*. Volume 5, No. 1. Tahun 2017.

Triyono Agus. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui *Community Development* Program Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) PT. Holcim Indonesia Tbk Pabrik Cilacap.” *KomuniTi*. Volume 6 No. 2. Tahun 2014.

Sumber Internet

Website artikel dan *company profile* *First Resources Ltd* <http://www.first-resources.com/> Diakses pada tanggal 5 Februari 2018

Website Dipenda Pekanbaru <http://www.dipenda.pekanbaru.go.id/dari-410-cuma-22-perusahaan-sawit-di-riau-kantongi-sertifikat-ispo/> diakses pada tanggal 23 April 2017 pada pukul 14.40 WIB

Website Majalah TEMPO edisi 19 April 2017
<https://www.tempo.co/topik/masalah/14/asap-dan-kebakaran-hutan> /diakses pada tanggal 23 April 2017 pukul 13.33 WIB

Website Portal Berita Utusan Riau edisi 5 Maret 2014, <http://utusanriau.co/~/det/1487> artikel diakses tanggal 28 Februari 2018

Website Portal Berita edisi 27 Februari 2016
<http://riausky.com/news/detail/5866/hari-ini-riau-penyumbang-titik-api-terbesar-di-sumatera.html> artikel terbit 2016, diakses pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 19.00 WIB

Website Portal Berita Riau Terkini edisi 26 Februari 2016
<http://riauterkini.com/usaha.php/sosial.php?arr=104810&judul=%20PT.%20PISP%20Kepenuhan%20ikut%20Cerdaskan%20Anak%20Rohul%20Melalui%20Program%20CSR> diakses pada tanggal 8 April 2017

Sumber gambar logo *First Resources Ltd*
https://www.google.co.id/search?q=first+resources&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAov6Mn-baAhUSS48KHcbABQUQ_AUICygC&biw=1366&bih=662 Diakses pada tanggal 2 Februari 2018

Dokumen yang tidak terbit

Syarat keanggotaan KKPA, Sumber data : *materi sosialisasi kebun kemitraan oleh Masrokan*

Dokumentasi milik direksi Umum KKPA *First Resources Regional Riau*

LAMPIRAN

POLA KKPA POLA PIR TRANS

N O.	NAMA KOPERASI	LOKASI	PERJANJIAN (MoU/SKB)	LEGALITAS LAHAN	CPP	LUAS (Ha)
1	KUD Mulya Mandiri	Dusun Muara Nikum dan Dusun Ujung Gurab, Kecamatan Rambahn Hilir	No. 02.0.4/SKB/029/XI/2009, tanggal 29 Desember 2009	Sertifikat Hak Milik (SHM), telah bersertifikat sebanyak 105 SHM	384 orang	Luas ± 479 Ha
2	KUD Harapan Mulya	Desa Kota Tengah, Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu	No.001/PISP-KSUHM/II/SPK/2005, tanggal 23 Februari 2005	Sertifikat Hak Milik (SHM) seluruh SHM sudah selesai	116 orang	Luas ± 250 Ha
3	KUD Rizki Abadi	Desa Kepayang, Kecamatan Tambusai, Kab. Rokan Hulu	No. 02.0.4/SPK/091/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012	Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 199 SHM.	199 orang	Luas ± 257,84
TOTAL					699	986,84

NO.	NAMA KOPERASI	LOKASI	LEGALITAS LAHAN	CPP	LUAS
1	Sumber Rejeki	Kepenuhan Raya	10	53 2	1.066,1 0
2	Sumber Makmur	Kepenuhan Baru	54	50 7	1.012,5 4
3	Sawit Subur	KUPT SP-3	48	50 0	1.000,4 8
4	Jaya Bersama	KUPT SP-4	86	50 0	999,8 6
5	Suka Damai	KUPT SP-5	52	38 1	765,5 2
6	Mitra Makmur	Suka Maju	27	47 0	892,2 7
7	Kop.Integrasi Sawit Sejahtera	Kepenuhan Barat Mulya	05	12 2	455,0 5
8	Integrasi Karya Makmur	Kepenuhan Timur	73	20 6	243,7 3
TOTAL			55	3.21 8	6.435,5 5



FIRST RESOURCES REGIONAL RIAU

Surya Dumai Group Building, 9th Floor
Jl. Jend. Sudirman No. 395, Pekanbaru Riau, Indonesia 28116
Telp. : (62-761) 32888, Fax. : (62-761) 3270

www.first-resources.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 016/RCS-SK/FR/IV/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Delveri

Jabatan : HR Manager

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Natasia Nurwitasari

NIM : 14321124

Program Studi : Psikologi

Asal Universitas : Universitas Islam Indonesia

Judul Skripsi : Implementasi CSR First Resources Ltd dalam Pemanfaatn Lahan Tanam

Bagi Penduduk Sekitar Lingkungan Industri Provinsi Riau

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian dan pengambilan data di First Resources Ltd. Adapun proses pengambilan data dilakukan selama 6 bulan mulai tanggal 4 Oktober 2017 s/d 4 April 2018.

Demikian surat keterangan magang ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 4 April 2018


Delveri
HR Manager

TRANSKRIP

Narasumber : Hardian, CSR First Resources Riau

Peneliti : Selamat pagi, pak. Saya Natasia mahasiswa Ilmu Komunikasi UII yang ingin melakukan penelian terkait kegiatan CSR First Resources Group. Menyangkut CSR, sebelumnya saya ingin tahu apa-apa saja macam kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan?

Hardian : ada banyak macam kegiatan CSR yang kami lakukan seperti dalam bidang ekonomi, social budaya, lingkungan dan kesehatan, pendidikan, infrakstruktur dan lain-lain.

Peneliti : lalu apa saja penerapan atau implementasi dari kegiatan CSR dalam masing-masing bidang tersebut?

Hardian : saya beri beberapa contoh pelaksanaannya, untuk sekedar informasi First Resources Group memiliki 27 anak perusahaan. Untuk hampir keseluruhan PT kami melakukan kegiatan CSR dari bidang ekonomi seperti program pemberdayaan UMKM dan kewirausahaan, lalu ada program pelatihan menjahit dan tata rias. Untuk bidang pendidikan kami juga memiliki program beasiswa, pembangunan gedung sekolah, akses internet ke tiap sekolah di daerah sekitar wilayah industri kami. Selain itu kami juga melakukan CSR di bidang sosial budaya, lingkungan dan kesehatan dengan membuat program dokter keliling yang bertugas melakukan pengobatan secara gratis untuk masyarakat. Dan dari bidang infrakstruktur kami melakukan bantuan berupa rumah ibadah, bantuan pembuatan gerbang atau tugu untuk masing-masing wilayah sekitar industri.

Peneliti : seberapa penting kegiatan CSR ini dilaksanakan bagi pihak First Resources?

- Hardian : Kegiatan CSR memang sangat penting untuk diterapkan dalam suatu perusahaan, Disamping kegiatan CSR merupakan kewajiban yang ketentuannya telah diatur oleh pemerintah akan tetapi kami merasa kegiatan CSR ini sangat menunjang keberlangsungan kegiatan masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Sesuai dengan teorinya 3P, CSR harus menerapkan konsep kelestarian People dan Planet disamping mencari Profit. Dan kami merasa itu memang sangat penting bukan karena kewajiban dari pemerintah tetapi memang kami merasakan benar manfaatnya.
- Peneliti : awal mula program-program tersebut terbentuk apakah ada campur tangan masyarakat langsung atau hanya pihak perusahaan saja yang menetapkan kriteria program CSR?
- Hardian : kami berkonsultasi kepada tokoh masyarakat setempat apa saja yang desa butuhkan. Di awal mula eksekusi program kami melakukan pendekatan-pendekatan kepada pihak desa yang di wakili tokoh masyarakat. Contohnya kami meminta masukan dan saran tentang apa yang dibutuhkan desa, kenapa memerlukan masukan dan saran dari pihak desa? Karena kami ingin melengkapi kebutuhan masyarakat, misalnya kami ingin menyiapkan program sunatan massal akan tetapi pemerintah ternyata sudah lebih dahulu menerapkan program tersebut. Jadi kami benar-benar memerlukan adanya kerjasama dari pihak desa untuk penyusunan pembuatan program CSR.
- Peneliti : menyangkut masalah pemerintah, apakah ada peran pemerintah dalam penyusunan program CSR perusahaan?
- Hardian : kalau dari pihak pemerintah mereka lebih menyarankan pengembangan di bidang UKM untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Karena mungkin banyak program-program pemerintah

yang belum tepat sasaran sehingga memerlukan banyak bantuan dari pihak lain termasuk bantuan dari perusahaan yang ada di Riau.

Peneliti : jika boleh tau, siapakah yang bertanggung jawab untuk kegiatan CSR di First Resources Group ini? Apakah pihak perusahaan memiliki utusan khusus yang bertugas untuk mengontrol program-program CSR yang dijalankan?

Hardian : dulunya kepala personalia yang bertanggung jawab terhadap berjalannya kegiatan CSR, tetapi sekarang karena tidak ada kepala personalia sementara kami dari staff CSR yang bekerja sekaligus bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Kami juga dibantu oleh pihak humas, tetapi kembali lagi karena tugas humas mengontrol 5 anak perusahaan jadi terkadang kurang dapat tercover juga dari pihak humas.

Peneliti : dari 27 anak perusahaan First Resources Group apakah semuanya melaksanakan program CSR?

Hardian : dari 27 anak perusahaan, hanya 14 perusahaan yang melakukan kegiatan CSR. Karena kami mengutamakan perusahaan yang bersertifikasi ISPO. Maksudnya ISPO adalah pengelolaan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan. Program ini wajib sesuai dengan PERMENTA nomor 11 tahun 2015. ISPO ini berbeda dengan CSR, ISPO ini tentang pengelolaan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan.

Peneliti : sebelumnya saya pernah mendengar tentang pemanfaatan lahan tanam di area sekitar perusahaan, membahas tentang judul penelitian saya tentang pemanfaatan lahan tanam perusahaan sendiri, apakah dalam program CSR dari perusahaan memang benar terdapat program tersebut?

Hardian : memang benar perusahaan memiliki program pengelolaan lahan tanam kebun kelapa sawit untuk masyarakat dengan mengusung pola KKPA. Untuk program kemitraan pola KKPA tersebut dari perusahaan sendiri sebenarnya tidak menggabungkan antara kegiatan CSR dengan KKPA karena pembahasan KKPA cukup luas sehingga membutuhkan bagian khusus yang menanganinya, bias ditanyakan di bagian umum KKPA dengan bapak Rokan.

Peneliti : bagaimana menurut pendapat bapak tentang program pola KKPA tersebut? Apakah dapat dikategorikan sebagai kegiatan CSR?

Hardian : program KKPA dapat dikatakan juga sebagai program CSR karena jika ditelusuri, program KKPA itu juga menerpakan inti dari CSR itu sendiri karena dalam KKPA kita seperti mendidik masyarakat untuk mandiri dalam artian perusahaan membantu memberdayakan masyarakat. Untuk lebih jelasnya bias nanti ditanyakan langsung ke bagian umum KKPA. Pokoknya inti dari program KKPA adalah perusahaan merupakan bapak angkat yang memfasilitasi masyarakat untuk dapat mengelola kebun kelapa sawit mandiri. Karena modal awal itu kan yang dianggap sulit untuk diperoleh masyarakat.

Narasumber : Masrokan, Manager Kebun (umum) First Resources Riau

Peneliti : selamat pagi pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Natasia mahasiswi ilmu komunikasi UII yang sedang mengadakan penelitian tentang pemanfaatan lahan tanam perusahaan, sebelumnya saya sudah mendapat informasi dari bagian CSR tentang pemanfaatan lahan tersebut, saya baru mengetahui jika program tersebut merupakan program pola KKPA yang ditangani oleh divisi bapak. Jika boleh tahu, mengapa pola KKPA tersebut tidak menjadi satu bagian dari program CSR di perusahaan ini?

Masrokan : ya jelas saja pengurusnya berbeda, karena program pola KKPA ini tingkatannya jauh lebih besar, ibaratnya paling penting lah untuk perusahaan kita, volumenya juga besar maka dari itu perlu staff khusus yang menanganinya. Karena pola KKPA ini menyangkut tentang aspek sosial, maka ini ditangani oleh pihak umum. Jadi saya beri gambaran tentang bagian CSR dan bagian umum. Memang keduanya sulit untuk dibedakan. Kalau CSR berkaitan erat dengan sosbud, pendidikan, bantuan-bantuan bencana dan lain-lain. Nah karena KKPA ini erat kaitannya dengan pengembangan ekonomi, maka yang menanganinya adalah pihak umum bukan CSR. Untuk sekedar informasi, KKPA ini sudah ada jauh sebelum lahirnya konsep CSR. Dahulunya program ini adalah milik pemerintah bersamaan dengan PIR. Akan tetapi karena tidak semua masyarakat setempat adalah PIR Trans maka dibentuk pula program KKPA tersebut. Dari perusahaan sendiri mulai mengadopsi program pola KKPA ini sejak tahun 1995 karena sudah ditiadakannya program KKPA dari pemerintah, sehingga saat ini pendanaan secara langsung dari pihak perusahaan ke koperasi desa dan petani yang dikelola masyarakat tanpa campur tangan pemerintah. Dalam membangun kebun kemitraan, perusahaan disebut juga sebagai inti, perusahaan inti memiliki kewajiban untuk membangun kebun plasma. Plasma disini ditujukan untuk masyarakat. Sehingga dalam pola KKPA terkenal istilah inti-plasma yang ditujukan untuk menggambarkan hubungan perusahaan dengan masyarakat.

Peneliti : lalu bagaimana respon dari masyarakat sendiri menanggapi program ini?

Masrokan : jelas mereka sangat senang karena dibangun kebun. Jadi begini, diawal mula pembukaan lahan kami menganggap masyarakat itu sama sekali tidak tahu tentang sawit. Kalaupun mereka tahu tentang sawit,

mereka hanya sekedar tahu hal-hal sederhananya saja, tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana cara merawat sawit dengan baik, memilih bibit yang tepat, dosisnya berapa, kapan waktu yang tepat untuk memupuk dan lain-lain itu tidak mereka kuasai di awal mula pembangunan lahan.

Penelitian : apa saja prosedur yang dijalankan dari program pola KKPA ini?

Masrokan : sebelum lahan diberikan ke masyarakat dalam kurun waktu 4 tahun sampai kebun sawit itu berbuah menghasilkan TBS (Tandan Buah Segar), diempat tahun pertama itulah pihak perusahaan yang mengambil alih untuk menanam hingga merawat sampai hasilnya berbuah, setelah 4 tahun dan menghasilkan baru lahan diserahkan kepada petani melalui koperasi. Usia kebun harus masuk tahun tanam dulu, karena perawatan awal kan susah, kalau dari perusahaan kami kan memiliki SDM khusus yang dipersiapkan untuk mengelola kebun kelapa sawit sehingga kami berharap dapat lebih memudahkan petani di awal pembangunan Jadi tahapnya terbagi dua, ada masa Pra-konversi dan masa konversi. Konversi itu masa peralihan, saat perusahaan memberikan hak kebun setelah empat tahun kepada petani peserta, tetapi sebelumnya, harus melewati tahap pra konversi dahulu. Nah pra konversi ini terdiri dari persyaratan untuk menjadi petani peserta, lalu harus mengurus legalitas koperasi melalui notaris, melihat usia tanaman apakah sudah layak atau belum kira-kira usia empat tahun, lalu menetapkan unit cost yang tujuannya untuk memberikan kesepakatan beban hutang kepada petani untuk lahan yang diberikan. Selanjutnya menentukan Calon Petani Peserta (CPP), Penyusunan Rencana Kerja Operasional dan baru masuk tahap konversi dimana petani diberikan hak lahan dengan konsekuensi harus membayar beban hutang tadi ke bank agar mendapatkan sertifikat.

- Penelitian : lalu menjelang kebun sawit tersebut berbuah, apakah perusahaan mengadakan pelatihan untuk masyarakat petani yang masih awam terhadap pengelolaan kebun kelapa sawit?
- Masrokan : dari perusahaan tidak ada, hanya kita berhubungan langsung dengan koperasi desa saja. Masyarakat kan jumlahnya sangat banyak, akan sangat sulit jika kita harus berhubungan langsung dengan semua masyarakatnya. Jadi untuk itulah gunanya koperasi, pihak perusahaan hanya berkomunikasi langsung dengan pengurus koperasi, jika ada permasalahan masyarakat pun menyampaikan lewat koperasi dan koperasi menyampaikan kepada pihak perusahaan. Menyangkut masalah perawatan kebun pun pihak perusahaan menyampaikan lewat sosialisasi dan pembinaan ke koperasi untuk kemudian disampaikan kembali ke masyarakat karena setelah 4 tahun kebun dirawat perusahaan dan telah menghasilkan, barulah masyarakat dapat terlibat.
- Peneliti : bagaimana cara perusahaan untuk memulai membangun kebun kemitraan ini?
- Masrokan : ya sumber lahan yang biasanya kita dapatkan ada 3. Yang pertama kami memperoleh lahan untuk kemitraan ini berdasarkan adanya ajuan atau permohonan kerjasama dari masyarakat. Lalu ada juga yang dari kita perusahaan memohon pembangunan lahan dengan mengurus dan membuat surat izin. Terus yang ketiga biasanya kita membangun lahan karena hasil social conflict seperti ada protes dari desa sebelah minta dibuatkan kebun juga, mungkin merasa di anak tirikan ya desanya itu. Kurang puas padahal sudah ada mitra dengan perusahaan lain.
- Peneliti : bicara tentang koperasi, sebenarnya apa fungsi dari koperasi itu sendiri secara garis besarnya?

Masrokan : Koperasi menjadi wadah penting dalam implementasi program kemitraan ini karena hasil kebun yang perusahaan berikan untuk masyarakat harus dijual ke perusahaan itu sendiri. jadi begini, misalnya kita ingin membuka lahan. Biaya pembangunan lahan tentunya tidak sedikit, bisa mencapai milyaran. Untuk itu kita memerlukan dana pinjaman dari bank. tetapi bank juga takut beresiko karena tidak yakin apakah akan berhasil atau tidak. Akhirnya yang mengusahakan adalah pihak perusahaan, makanya perusahaan dianggap sebagai bapak angkat karena memfasilitasi negosiasi ke bank, caranya adalah dengan perawatan di empat tahun pertama tadi, setelah 4 tahun kebun dirawat perusahaan dan menghasilkan buah, kemudian perusahaan menyerahkan kebun tersebut kepada masyarakat dan buah yang berbuah dijual ke perusahaan melalui koperasi. Terkait modal awal, pihak perusahaan melakukan refundising kepada masyarakat setelah memberikan lahan kebun sawit. Ketika bank melihat perkebunan sudah berbuah tentunya bank menjadi percaya masyarakat dapat mengembalikan modal awal pembukaan lahan. Jadi urusan antar masyarakat dan perusahaan adalah jual beli TBS melalui koperasi. Dan urusan masyarakat dengan bank dipotong melalui hasil penjualan TBS perbulannya, bisa dikatakan secara garis besar koperasi berfungsi menjadi sentral kegiatan program pola KKPA ini karena semua elemen terkait berkomunikasinya melalui koperasi.

Peneliti : dalam penjelasan tersebut, bapak menjelaskan tentang empat tahun masa pemeliharaan oleh perusahaan, tujuannya untuk apa pak?

Masrokan : ya tujuannya Demi meningkatkan taraf perekonomian masyarakat tempatan artinya masyarakat yang berada di sekitar kebun kami melakukan pembangunan kebun dan melakukan perawatan di empat tahun pertama sebelum kebun menghasilkan buah. Kan kembali lagi

kendala mereka SDM jadinya untuk perawatan awal masih banyak yang kurang paham secara keseluruhan tentang pengelolaan kebun sawit. Usia kebun harus masuk tahun tanam dulu, karena perawatan awal kan susah, kalau dari perusahaan kami kan memiliki SDM khusus yang dipersiapkan untuk mengelola kebun kelapa sawit sehingga kami berharap dapat lebih memudahkan petani di awal pembangunan. Artinya ya kami itu memberikan bantuan dari sisi ekonomi kan, ibaratnya mereka dikasih makan, mereka kenyang, lalu mereka tenang, dan mereka merasa menang. Jika sudah dalam tahap menang berarti mereka merasa sudah sejahtera. Pastinya saat sudah sejahtera mereka bisa mencari solusi-solusi sendiri atas hambatan yang ada di lapangan, tentunya juga dari penghasilan mereka sendiri tanpa bantuan dari kami lagi.

- Peneliti : lalu untuk penjualan tersebut bagaimana sistem pemotongan biaya angsuran ke bank yang dilakukan koperasi?
- Masrokan : Rata-rata pemotongan 30% mengapa koperasi menggunakan persen? Karena kita ingin pembagian rata, tidak merugikan masyarakat. Katakanlah ketika sedang tidak musim panen mereka dapat pembagian yang adil pula untuk potongan dan jatah mereka pribadi. Ini salah satu langkah kita. Jika misalnya di tetapkan sekian ratus ribu tetapi saat itu tidak musim panen, alhasil mereka tidak mendapat keuntungan.
- Peneliti : di awal pembangunan lahan apakah pernah terjadi permasalahan atau misalnya penolakan dari masyarakat?
- Masrokan : justru tidak ada yang pernah menolak jika dibangun kebun kelapa sawit. Jadi sebenarnya bukan penolakan akan tetapi protes dari masyarakat desa lain yang tidak dibangun kebun. Katakanlah kebanyakan pembangunan kebun kelapa sawit ini atas dasar kerja

sama murni akan tetapi pernah terjadi pada perusahaan kami protes dari masyarakat diluar desa yang kami bangun kebun. Jadi kami membangun kebun di salah satu desa karena terdapat lahan yang memungkinkan, akan tetapi desa yang lain tidak terima, mereka demo ingin dibangun lahan juga tetapi minimnya lahan yang memungkinkan di desa mereka. Alhasil pihak perusahaan melakukan komunikasi dengan mereka dan melakukan negosiasi dengan persyaratan mereka harus mencari lahan yang memungkinkan, dalam artian lahan tersebut tidak banyak masalah. Itu salah satu tahap pembangunan kebun kelapa sawit dikarenakan social conflict.

Peneliti : berarti sebelum memasuki masa konversi, kebun harus berusia empat tahun dulu pak? Jika kebun sudah berbuah sebelum usia 4 tahun bagaimana pak?

Masrokan : Usia kebun harus masuk tahun tanam dulu, itu minimalnya 4 tahun. karena perawatan awal kan susah, kalau dari perusahaan kami kan memiliki SDM khusus yang dipersiapkan untuk mengelola kebun kelapa sawit sehingga kami berharap dapat lebih memudahkan petani di awal pembangunan.

Penelitian : menurut bapak, apa manfaat dari adanya program ini bagi pihak perusahaan? Sejauh ini kan saya banyak menangkap manfaatnya bagi masyarakat, lalu bagaimana untuk perusahaan sendiri?

Masrokan ; adanya program ini membantu kami (pihak perusahaan) untuk mencapai pengelolaan kebun yang baik dengan berlandaskan 3P yaitu Planet, People, Profit. Masyarakat pun jika diberikan kebun tentunya ikut menjaga kelestarian lingkungan, jadi kami melaksanakan tanggung jawab moral lah, dengan bersama-sama menjaga lingkungan bersama masyarakat.

Peneliti : mohon maaf sebelumnya pak, jika saya meminta izin untuk meninjau langsung ke lokasi perkebunan dan bertemu masyarakat dan pihak koperasi apakah boleh?

Masrokan : bisa, lusa bersama dengan staff saya sekalian kami mau mengurus masalah sertifikat. Tapi Kalau mau tahu tentang KKPA, akan sangat luas sekali, karena kami terdiri dari 27 anak perusahaan untuk di wilayah Riau saja. Tetapi secara keseluruhan sistem dan teknis dari masing-masing anak perusahaan kami semua sama karena tergabung dalam bidang yang sama juga yaitu kelapa sawit.

Narasumber : **Robby, Karyawan Bank Riau Kepri**

Peneliti : sebelumnya, saya telah mendapatkan beberapa informasi tentang pelaksanaan kebun kemitraan KKPA, dalam pelaksanaannya disebutkan campur tangan pihak bank lah yang membuat pelaksanaan kebun kemitraan sejauh ini terbilang sangat baik. Bagaimana peran bank sendiri dalam program KKPA ini?

Robby : jadi gini, kebetulan di bank riau kepri sebenarnya kita tergantung kondisi pasar, kita membuat produk sesuai potensi. Untuk daerah rohul sendiri itu potensi yang kita liat kan banyak perkebunan ya kelapa sawit. Berdasarkan potensi tersebut kita lihat lagi peluang, nah peluangnya sudah ada lalu kita buatlah SKIM Kredit. Jadi yang awalnya SKIM Kredit ini cakupannya hanya untuk kelapa sawit secara umum tanpa ada pembagian khusus, tapi ternyata ada peluang untuk masyarakat punya lahan sendiri dari konversi itu. Pada zaman dulunya kan cuma ada dua, modal kerja atau investasi. Konversi ini yang terbaru, jadinya kami dari pihak bank Riau kepri punya SKIM khusus untuk konversi yang mengakomodir usaha perkebunan, dibagian agribisnis. Ada tanaman karet sama kelapa sawit.

Kebetulan kita mitra sama PT. PISP, berdasarkan data dari koperasi dan perusahaan, masing-masing mengajukan permohonan kerjasama berarti ada tiga pihak yaitu bank, perusahaan dan koperasi. Jadi kita bekerjasama, sebelum menyepakati kerjasama dengan perusahaan dan koperasi terlebih dahulu kami melakukan pengecekan terhadap kondisi lahan, kami harus memastikan lahan tidak berbenturan dengan kawasan yang dilindungi, misalnya. Kemudian kami melihat kondisi lahannya, bagaimana kelayakannya. Lalu kami melihat bagaimana

sistem pengelolaan hasil. Untuk PT. PISP sendiri harga yang ditetapkan cukup bagus karena sesuai dengan harga Disbun. Dan keseluruhan prosedur kerjasamanya juga sejauh ini tidak ada masalah hanya mungkin kendala sertifikat saja.

Peneliti : apa fungsi sertifikat itu sendiri untuk pihak bank?

Robby : sertifikat itu ya gunanya sebagai agunan. Kan kalau di bank itu ada pinjaman, tujuannya jelas, orangnya jelas, kemudian ada agunannya itu sendiri. Nah jadi sebenarnya agunan itu memerlukan sertifikat untuk menjamin pinjaman itu.

Peneliti : lalu untuk kendalanya sudah sampai sejauh mana? Dan apakah ada solusinya?

Robby : ya sertifikat agak lama, perlu waktu yang tidak singkat untuk diterbitkan. Tapi perusahaan sudah punya solusi sendiri ya pak rahmat terkait masalah agunan ini

Rahmat : jadi saya jelaskan lebih dulu, penerbitan sertifikat memang lama dan itu menjadi salah satu kendala kami, sebenarnya yang memiliki hak untuk menerbitkan sertifikat itu adalah BPN, Badan Pertahanan Nasional bagian agrarian. Pekerjaan mereka sebenarnya tidak hanya mengurus sertifikat untuk 1 atau 2 koperasi saja, bahkan seluruh koperasi yang ada di kabupaten ini, jangankan setahun dua tahun, bisa sampai empat sampai lima tahun baru selesai. Jadi kendala tentang sertifikat ini bukan berasal dari petani maupun perusahaan, tetapi ini adalah kewenangan BPN. Memang dari penerbitannya yang agak lama. Untuk masalah agunan sendiri sebenarnya pihak perusahaan sudah memiliki alternatif berupa deposit yang akan diberikan sebagai

penjamin, nah disitulah fungsi perusahaan sebagai avalis tadi yang artinya menjamin kredit lahan masyarakat tersebut kepada pihak bank sebelum sertifikatnya terbit.

Robby : ya, perusahaan menjadi alternatif dan memberikan banyak kemudahan. Karena bentuk agunan tadi harusnya berupa sertifikat, tapi karena perkebunan itu kan seharusnya agunan yang diinvestasikan artinya tujuan investasi untuk apa, itulah yang digunakan sebagai agunan, ditambah pula dengan ketersediaan deposit di awal dari pihak perusahaan sebagai agunan. Kalau dari bank Riau kami memberikan nilai 20% dari harga tiap konversi lahannya.

Peneliti : Lalu untuk hubungan masyarakat ke pihak bank sendiri apakah juga melalui koperasi?

Rahmat : kalau hubungan semua pihaknya memang dari koperasi semua sebenarnya, penengahnya ada di koperasi. Jadi untuk bank sendiri bisa dibilang perannya adalah sebagai pihak ketiga untuk pengembangan. Ya mensupport program perusahaan kita lah. Mendukung kesejahteraan petani.

Peneliti : kalau boleh tau, pak. Dulu sebelum adanya peran perusahaan dan kebun sawit, bagaimana perputaran keuangan di daerah rokan hulu ini? Apakah ada perbedaan yang signifikan?

Robby : wah ya jauh sekali, potensi sawit ini luar biasa. Dulu sebelum masuk sawit kan semua petani menanam karet, sawit jauh sekali besar pendapatannya jika dibandingkan dengan karet. Kalau masalah perputaran kan kita bermitra dgn beberapa koperasi binaan PT PISP di rokan hulu khususnya di daerah Kepenuhan. Yaa kisarannya kita

perbulan bisa sampai 25 miliar perputaran uangnya. Itu dana segar yang dibawa pulang untuk koperasi-koperasi dalam satu kecamatan diminggu ketiga. Ya jauh dibandingkan pada saat dulu masih bertani karet. Pendapatan petani sawit sangat tinggi untuk saat ini.

Peneliti : lalu kelebihan dan kekurangan apa saja yang dirasakan dari pihak bank atas program kemitraan KKPA ini?

Robby : ya kalau kelebihan ya jelas ya pendapatan masyarakat jauh meningkat tinggi, dari pihak bank sendiri kami setiap bulannya merasakan dampak yang besar pula dari program ini, setiap bulannya target kami selalu tercapai. Nah tetapi kelemahannya ya kembali lagi untuk masalah sertifikat tadi. Penerbitan sertifikat ini kan kadang waktunya lama, tetapi walaupun sertifikat belum terbit ya kita manfaatkan lah SKT dulu sebagai alternatifnya.

Narasumber : Wandu, Pengurus dan petani koperasi KKPA Rizki Abadi

Peneliti : sebagai masyarakat yang berpartisipasi langsung dengan program kemitraan KKPA ini dan juga menjadi anggota bahkan pengurus dari koperasi itu sendiri, apakah fungsi koperasi dalam program KKPA ini?

Wandu : jadi koperasi berfungsi sebagai wadah untuk melakukan kegiatan operasional dalam tahapan pembangunan hingga perawatan kebun

kelapa sawit. Sebelum kebun kelapa sawit dibangun, terlebih dulu harus memiliki koperasi yang berbentuk umum dalam artian koperasi tidak hanya dikhususkan untuk menangani kebun saja, bisa juga untuk keperluan dan kegiatan lain. Koperasi ini juga harus disahkan oleh dinas koperasi kabupaten setempat. Jadi koperasi itu tidak ada khususnya, koperasi bersifat umum dan boleh menangani bidang apa saja. Nah koperasi ini juga memiliki legalitas yang jelas. Dengan demikian kerjasama dalam tahap penanaman, pembangunan, infrastruktur sampai dengan penyelesaian sertifikat saat konversi diumur 48 bulan. Dan konversi itu adalah pengalihan lahan dari hak perusahaan menjadi hak masyarakat petani. Nah intinya fungsi koperasi itu adalah menyatukan semua aspirasi dan keinginan masyarakat untuk kemudian disampaikan kepada perusahaan.

Peneliti : dalam tahap awal pelaksanaan program kemitraan KKPA ini, apakah pihak perusahaan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung?

Wandi : tidak ada, perusahaan kan tidak berurusan langsung dengan masyarakat. Kalau sosialisasi ya kepada koperasi saja yang artinya Cuma segelintir tokoh masyarakat desanya saja yang ketemu sama pihak perusahaan, asisten kebunnya biasanya yang berurusan sama kami ini pengurus koperasi.

Peneliti : sebagai perantara dari pihak perusahaan dan masyarakat, pak wandi selaku pengurus koperasi apakah pernah menemui kendala-kendala dalam implementasi program ini? Misalnya dari sisi tanaman, perawatan tanaman atau penjualannya?

Wandi : kendala ya ada, tidak bisa kita bilang tidak ada. Kalau kendala itu biasanya ada skala kecil dan besarnya. Kalau dari penjualan,

sebenarnya mutu dan kualitas TBS tandan buah segar kelapa sawit kami berbeda dari kebun luar. Di KKPA ini perusahaan punya standar buah untuk bisa dijual. Kalau kebun luar buah masih yang merah atau kuning bisa dijual. Tapi kalau KKPA ini punya kriteria khusus lah seperti buahnya harus dibroncol dengan kata lain buah yang dijual harus matang. Untuk urusan penjualan pihak koperasi memiliki coordinator lapangan sendiri untuk mengawasi penjualan TBS. kendala lainnya biasanya kalau dari yang sering kami alami ya saat musim hujan, jalanan rusak, sulit untuk mengantar TBS ke pabrik saat penjualan sehingga terkadang mengalami keterlambatan, tapi biasanya kalau musim hujan kita antisipasinya pakai HardTop yang penting dapat mengatasi kendala jalanan rusak tadi. Lalu SDM juga bisa dibilang kendala juga untuk kita, soalnya memang kan SDM dari kami sendiri tidak sebanding dengan SDM dari perusahaan, hingga kadang-kadang suka ada miss komunikasi atau kesalahan-kesalahan teknis dalam pengelolaan kebun. Tapi kalau yang masalah jalan tu kita sih ingin dari perusahaan ikut membantu sebenarnya, atau ada kemudahan lain ya bagaimana solusinya mungkin nanti akan kami ajukan juga.

Penelitian : menyangkut masalah korlap, apakah korlap itu ada setelah memasuki masa konversi atau sebelumnya koperasi sudah mempunyai korlap terlebih dahulu?

Wandi : jadi gini, kan koperasi itu sudah ada waktu masa pembangunan ya karena syarat wajib, bahkan sebelum dicanangkan program KKPA pun ada juga koperasi yang sudah berdiri. Jadi koperasi ini memang dari awal saat pembuatan MoU juga dibahas tentang tenaga kerja. Dalam MoU itu disebutkan harus ada tenaga kerja yang sanggup menjalankan dan mengawasi pelaksanaan kerjasama ini, korlap sendiri adalah bagian dari tenaga kerja dari kami koperasi yang bekerjasama dengan

perusahaan. Tenaga kerja itu koperasi di prioritaskan masyarakat tempatan yang bermukim di daerah tempat koperasi beroperasi. Nah jadi tenaga kerja itu dibutuhkan bahkan mungkin sebelum pelaksanaan juga sudah harus ada tenaga kerja di lapangan, misalnya nanti mau dibangun kebun, kita dari desa kan sudah harus punya data-data jelas tentang ini lahan milik siapa, luas lahan berapa.

Peneliti : disamping dari beberapa kendala, bagaimana keuntungan dan manfaat yang dirasakan oleh pihak koperasi ini?

Wandi : wah ya sangat jauh berbeda lah dengan dulu sebelum KKPA, disini sudah ada 10 tahun lah kita gerak di kelapa sawit, dulunya ini kan karet ya sekitar 20 tahun yang lalu, jauh bedanya dengan sekarang apalagi semenjak ada kemitraan dengan perusahaan ini. Perputaran ekonomi untuk koperasi kami bisa mencapai 300-400 juta perbulan. Lalu kan kami memperoleh hasilnya setiap bulan, dan juga kami ini juga setiap bulannya harus berhubungan dengan bank. nah dengan kewajiban setiap bulannya melunasi kredit ke bank itu kami merasa dituntut untuk dapat mengelola keuangan kami secara lebih baik. Seperti dibiasakan menabung lah mungkin ini namanya.

Peneliti : sebagaimana yang telah pak wandi sampaikan terkait koperasi ini sendiri bukan merupakan koperasi khusus melainkan koperasi bersifat umum yang boleh bergerak dibidang apa saja selain perkebunan sawit, untuk di koperasi ini sendiri adakah jenis kegiatan lain yang dilakukan?

Wandi : kami juga ada kegiatan simpan pinjam untuk anggota. Selain itu kami juga menjalankan usaha warung obat-obatan racun ya untuk kebutuhan kebun. Terus juga kami menjalankan usaha warung yang menjual kebutuhan sehari-hari seperti beras dan macam-macam sembako juga.

Jadi koperasi kegiatannya tidak hanya mengurus urusan penjualan TBS ke perusahaan saja tetapi juga kami memiliki kegiatan lain untuk menunjang pemasukan koperasi kami.

Narasumber : **Tarmizi, pengurus dan petani KUD Mulya Mandiri**

Rahmat Widodo, asisten kebun KKPA First Resources

Peneliti : bagaimana menurut pandangan bapak tentang program pola KKPA yang dilaksanakan oleh PT PISP di kabupaten Rokan hulu ini?

Tarmizi : jadi ini saya jelaskan sedikit dulu ya, PT. PISP kan dulu membangun kebun pola KKPA di desa kami rambah hilir tengah kabupaten Rokan Hulu, nah itu harus ada koperasinya, kalo tidak ada koperasi yang berbadan hukum, tidak mau perusahaan membangun kebun. Nah berdirilah koperasi kita ini mulya mandiri. Maka mitranya perusahaan PT PISP dengan KUD Mulya Mandiri. Dengan adanya pembangunan kebun KKPA ini oleh PT PISP , mengangkat harkat dan martabat kami para petani dari sisi ekonomi. Karena jujur saja dari zaman dulu kami hanya berprofesi sebagai petani kebun karet, dimana karet itu perawatannya sangat susah tidak seperti kelapa sawit yang tetap menghasilkan. Jika dulu musim hujan, karet susah sekali untuk produksi, tetapi sekarang walaupun musim hujan, kelapa sawit tetap menghasilkan untuk kami.

- Peneliti : lalu apa tanggapan warga disekitar desa ini dengan adanya kebun KKPA ini?
- Tarmizi : tanggapan masyarakat disini ya responnya beda ya, saya jelaskan dulu. Kami petani kemitraan ini terbagi dua. Ada Trans PIR dan petani KKPA. Kalau PIR-TRANS dikasih tempat tinggal, terus ada juga lahan perkebunan seluas 2 Ha dan jatah konsumsi selama 1 tahun diawal pelaksanaannya. Tapi itu kan dulu waktu mereka pindah dari jawa kesini, programnya pemerintah dulu itu. Sekarang kan semuanya langsung dari perusahaan lewat pola KKPA ini. Lebih kurang luas PT PISP membangun kebun di kecamatan kami, rambah hilir ini sekitar 800an Hektar lah. Jadi ya senanglah semua warga disini tanggapannya, kelapa sawit ini untungnya besar mbak, terbantu sekali kami dengan adanya kemitraan KKPA ini.
- Peneliti : apakah dalam tahap awal pembangunan kebun kemitraan KKPA ini, pihak perusahaan melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat?
- Tarmizi : tidak ada ya, perusahaan kalau ada apa apa langsung datang ke koperasi, nanti kami yang sampaikan ke anggota-anggota. Sejauh ini sih seperti itu.
- Peneliti : saya mendengar tentang fungsi koperasi sebagai wadah transaksi sekaligus penghubung dari berbagai pihak yang terlibat dalam kemitraan ini. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan program ini dari sisi koperasi?
- Tarmizi : kendala adaa, masalah transportasi lah yang sulit diatasi. Musim hujan ini jalanan disini rusak, angkutan mobil kami susah buat masuk. Kalau

udah masuk bulan ber-ber ini hujan terus ini. Namun buah tetap keluar, tetap kami kirim ke PT PISP tapi ya terlambat kadang 2-3 hari dari biasanya, itupun kami harus punya dan siapkan dana khusus juga buat sewa Hardtop. Yang penting TBS tandan buah segar kelapa sawitnya sampai ke pabrik PT PISP. Kami sudah pernah mengajukan permohonan infrakstruktur ya dari perusahaan tapi ya belum kunjung direspon. Terus juga ini yang tidak kunjung selesai itu masalah sertifikat. Apalagi sekarang, mbak. Penerbitan sertifikat menjadi lebih lama, lebih disiplin ketentuan-ketentuannya, kami masih ada lagi 44 sertifikat yang masih nyangkut belum diterbitkan.

- Peneliti : untuk penjualan TBS kepada pihak perusahaan PT PISP sendiri apakah ada negosiasi atau ketentuan harga sesuai permintaan petani?
- Tarmizi : kalau harga TBS sesuai dengan harga yang ditetapkan Dinas perkebunan, ya pak rahmat?
- Rahmat : maaf saya potong sedikit. Menambahkan tentang dinas perkebunan, sekedar informasi First Resources khususnya PT PISP ini membeli TBS sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh dinas perkebunan, jadi kita ini perusahaan kebun sawit itu punya semacam asosiasi gitu untuk penentuan harga kelapa sawit. Nah yang handle itu pihak dinas perkebunan. Jadi harga pasarannya setiap hari Selasa selalu dirapatkan. Setiap minggu selalu dirapatkan penentuan harganya. Itu memang koordinatonya dinas perkebunan provinsi Riau. penentuan harga ini terbuka untuk siapa saja, di koran juga dimuat.
- Tarmizi : kita juga petaninya yang jual langsung dengan harga itu, tidak dikurang tidak ditambah. Kan kita juga udh MoU harus jualnya ke PT PISP saja tidak boleh keluar, kalau dipikir pikir ya sudah enak jualnya ke PT PISP, harga juga sudah tinggi dibanding kalau jual keluar.

Kalau dibandingkan perusahaan lain di rokan hulu, PT PISP ni tinggi mbak kasih harga, malah banyak petani dari mitra luar PT PISP tu ingin jual ke PT PISP. Kalau perusahaan lain mungkin kebijakannya berbeda pula ya tergantung kondisi dan aturan main mereka, misalnya lagi musim kelapa sawit kan jadinya buah banyak panen, harga jadi turun. Pas lagi sedikit buahnya panen harga jadi mahal. Ya kalau PT PISP enak nya terkontrol terus sama pemerintah jadi tidak sembarang-sembarang tentukan harga. Contoh dalam beberapa bulan ini saya sempat ngobrol sama petani perusahaan lain, harga kelapa sawit yang dijual bisa beda sampai 500 perak perkilo, lebih tinggi harga jual ke PT PISP. Contoh di perusahaan lain dijual seharga 1640 rupiah sementara di PT PISP 2090 rupiah. itu sesuai dengan harga kelapa sawit yang ditetapkan sama disbun harga dari PT PISP, bisa kita lihat di Koran.

Peneliti : apakah ada target khusus untuk penjualan? Apakah PT PISP mempunyai target khusus dalam membeli TBS?

Tarmizi : tidak ada, PT PISP beli TBS kami sesuai hasil panen yang ada. Tidak punya target khusus kalau dari perusahaan. Intinya kami tidak boleh jual buah ini kemana mana. Cuma ke PT PISP saja.

Rahmat : kalau sebelum sebelumnya memang ada sanksi nya dari kita jika ketahuan petani menjual TBS keluar selain ke PT PISP, tapi semenjak harga kami mengikuti harga disbun dan nilainya terbilang tinggi, ini meminimalisir pelanggaran petani tersebut.

Peneliti : untuk syarat-syarat pinjaman koperasi sendiri bagaimana pak?

Tarmizi : itu masyarakat dikasih pinjaman sebanyak 2 juta, guna ya mungkin dalam proses membantu urusan panen, contoh biaya upah bongkar

muat, uang jalan supir yang mengantar TBS dan lain-lain, kalau petani itu ya mungkin mereka ada kebutuhan lain diluar urusan kebun, kami kasih lah pinjaman maksimal 2 juta dengan fee 1 persen.

Peneliti : tetapi kalau untuk yang berkaitan dengan kebun KKPA itu sendiri seperti pembibitan, perawatan dan lain-lain apakah ditanggung perusahaan?

Tarmizi : haa itu pas masuk konversi, jadi di PT PISP ada pra konversi sama masa konversi. Saat pra konversi kan semua biaya itu tanggung jawabnya perusahaan, nnti sudah umur 4 tahun baru dikonversikan dalam arti diberikan untuk kita lahannya, pas udah konversi kan udah menghasilkan buah, pas itu kami jual buahnya ke PT PISP, hasil dari penjualan itu dipotong 30% untuk cicilan hutang bank atas lahan kami dan 20% dipotong untuk biaya perawatan kebun semuanya diatur sama koperasi

Peneliti : koperasi sudah jelas dimanfaatkan sebagai wadah untuk transaksi kelapa sawit, apakah koperasi juga memiliki fungsi lain diluar kegiatan kebun?

Tarmizi : kalau KUD mulya mandiri ini ada simpan pinjam ya tentunya, kami ada juga pengadaan pupuk. Pengadaan pupuk ini kana da keuntungan, keuntungan pun untuk petani juga. Salah satu contohnya KUD beli pupuk 200. Dijual petani 210 dengan cicilan 3 bulan atau 4 bulan. Nah keuntungan ini juga untuk petani yang akhir tahun dibagikan dalam bentuk SHU, sisa hasil usaha. Akhir tahun saat tutup buku. Kami punya target sih ke depannya ingin buka toserba juga untuk rencana jangka panjang.

Narasumber : **Samsuri petani koperasi PIR-TRANS**

Peneliti : sebelum ini saya sudah mendapatkan informasi tentang petani KKPA, dalam wawancara saya dapati fakta tentang petani koperasi PIR TRANS yang turut berpartisipasi dalam program kemitraan KKPA ini. Bolehkan saya tau apa perbedaan petani KKPA dengan PIR TRANS?

Samsuri : oo jadi begini, aslinya itu PIR TRANS kan mendatangkan orang dari jawa, program PIR TRANS ini ditujukannya bagi ekonomi lemah, begitu di data degan desa, setelah data, pihak desa mendaftarkan kami ada yang ke dinas sosial, ada yang ke transmigrasi juga. Setelah itu ada pengangkatan. Kan kami transmigran disebar ada di 27 provinsi. Nah kebetulan saya diangkat oleh yayasan Dharmais yang berada di bogor. pada tahun 1992 kami ditempatkan di sorek Riau ini yang sekarang pelalawan. Nah pas pindah ke sumatera ini kami dikasih rumah yang peserta transmigran dengan lahan 1,5 Ha, kebun 2 Ha. Untuk kita pribadi. Kami juga dapat jatah makan selama setahun. Semua dari pemerintah. Kita bekerja di lahan PIR TRANS namanya kebun plasma, kami diupah murah waktu itu pada tahun 1992. Saat itu semuanya murni dari pemerintah, belum ada konversi dari perusahaan. Jadi ini sekilas sejarah PIR TRANS itu, untuk keseluruhan pelaksanaanya sama. Bedanya kami yang PIR TRANS ini dikasih lahan rumah, dikasih jatah makan juga pada saat awal dulu ikut pir trans, dan sekarang transaksinya ada perbedaan sedikit. Kalau di KKPA kan hasil penjualan dipotong 30% buat pelunasan hutang lahan ke bank itu kami PIR TRANS juga sama, tapi untuk biaya perawatan kebun kalau KKPA ditentukan oleh koperasi, kami secara mandiri,

jadi penghasilan bulanannya gak dipotong sama koperasi untuk biaya perawatan kebun, murni semua kami yang urus.

Peneliti : kalau untuk bapak sendiri sebagai petani PIR TRANS apakah tanggapan bapak dalam program kemitraan ini?

Samsuri : sangat terbantu sekali dengan program KKPA ini. Dengan adanya program kemitraan ini ekonomi kami makin meningkat. Ini kai di daerah kota tengah tinggalnya, bisa dilihat sudah banyak mobil lalu lalang, dulunya ini hutan belum ada apa apa. Kota tengah ini pesat sekali perkembangannya semenjak sawit masuk. Alhamdulillah juga saya sebagai petani bisa menyekolahkan anak saya di jawa sampai kuliah.

Peneliti : untuk kendala yang dialami, pernahkah terjadi kendala-kendala di lapangan?

Samsuri : ya kendala pasti ada, tapi kan dari perusahaan selalu mengirim utusannya ya pak rahmat ini sebagai utusan perusahaan yang selalu mengecek dan berkomunikasi kepada kami para petani. Yang tidak membantu jujur saja saat ini kendalanya yang kami rasakan adalah sawitnya udah mau replanting, tapi sertifikatnya ada yang belum selesai. tapi ya untuk masalah sertifikat ini kan perusahaan bilang itu diurus oleh BPN, sekarang petani tidak ada urusannya dengan BPN, urusan petani kan sama perusahaan. Sekarang adek bayangkan saja, usia tahun tanam dari 1997 sampai sekarang tahun 2017 masih ada beberapa sertifikat yang belum terbit, kendalanya dimana? Sampai sekarang belum ada solusinya.



BANGUN KEMERDEKAAN

Di Bawah Bimbingan

3. Dasar Kerjasama Kemitraan

Kerjasama kemitraan pembangunan kebun ini adalah :

- Keinginan masyarakat untuk memiliki kebun sawit sendiri.
- Tidak tersedianya dana melalui program KKPA maupun PIR dan Pemerintah
- Saling menguntungkan antara Perusahaan & masyarakat
- Dukungan dari Pemerintah (Pusat & Daerah).

4. Tujuan

Tujuan pembangunan kebun melalui program kerjasama kemitraan ini terdiri dari :

a. Tujuan Secara Umum

Salah satu tujuan pembangunan kebun adalah jika masyarakat sekitar ikut memiliki kebun, maka mereka juga ikut memiliki kebun ini yang dibangun perusahaan, dan masyarakat akan ikut manajaganya.

Keamanan kebun (termasuk keamanan kebun inti) akan terjaga jika masyarakat sekitar kebun sudah sejahtera, atau minimal kebutuhan pokok mereka telah tercukupi. Salah satu caranya adalah dengan membangun kebun untuk mereka dengan sistem kemitraan. Tujuan umum didefinisikan sebagai :

- Kerjasama antara koperasi dengan perusahaan yang saling menguntungkan.
- Memanfaatkan lahan kurang/ tidak produktif menjadi lahan yang produktif.
- Membuka lapangan kerja.
- Meningkatkan perekonomian daerah.
- Mempercepat pertumbuhan ekonomi desa.

b. Tujuan Perusahaan

Tercapainya pengelolaan kebun yang lestari berazaskan 3P (Planet, People, Profit), yaitu :

- Planet (Lingkungan) : Pembangunan kebun yang berwawasan lingkungan, tidak merusak lingkungan, bahkan bisa memperbaiki lingkungan.
- People (Kesejahteraan) : Kesejahteraan bersama (Perusahaan, karyawan, masyarakat sekitar).
- Profit (Keuntungan) : Pencapaian keuntungan perusahaan secara finansial.

c. Tujuan Masyarakat Petani

- Peningkatan taraf ekonomi masyarakat petani.
- Majunya pembangunan infrastruktur desa.
- Terbuka lapangan kerja dan peluang berusaha.
- Timbulnya efek penganda (*multiplier effect*).

5. Manfaat Adanya KKPA

a. Bagi Perusahaan :

- Kepastian Pemenuhan Bahan Baku Industri (PKS)
- Minimalisasi *Social Problem*
- Kepedulian (tanggung jawab) Perusahaan kepada Lingkungan Sosial (CSR).

b. Bagi Masyarakat :

- Peningkatan Taraf Ekonomi dan Sosial Budaya
- Peningkatan Manfaat dan Nilai Tambah bagi Lahan Desa
- Perbaikan Lingkungan (Klim Mikro, Tala Air, dsb - untuk Lahan Marginal)

c. Bagi Pemerintah :

- Pengembangan Kewilayahan
- Pengembangan dan Penggairahan Perekonomian Lokal dan Nasional dengan adanya efek penganda (*multiplier effect*).
- Penyumbang PDRB dari Sdkt Sektor Perkebunan

a. Syarat-syarat

1. Syarat-syarat Pola Kemitraan

- Adanya ketersediaan lahan yang sesuai untuk kelapa sawit.
- Lahan yang tersedia harus bebas konflik masalah kepemilikan.
- Adanya keinginan dari masyarakat untuk bermitra dengan Perusahaan dalam rangka membangun kebun kelapa sawit.
- Kesiapan masyarakat untuk membentuk Koperasi sebagai wadah untuk bermitra dengan Perusahaan.
- Harus ada koperasi sebagai instansi berbadan hukum.
- Adanya Bank sebagai penyanggah dana pembangunan kebun kelapa sawit dan perusahaan sebagai penjamin / avalis.

2. Syarat-syarat Keanggotaan

- Umur petani peserta minimal 21 tahun, atau sudah menikah.
- Berkelakuan baik selama menjadi petani plasma dan bersedia menandatangani surat pernyataan.
- Belum pernah menjadi peserta petani plasma pola PIR-Trans, KKPA atau pola kemitraan lainnya.
- Bersedia tidak menjual areal kebun miliknya.

1. Pendahuluan

Ada empat sumberdaya yang harus ada dalam pembangunan kebun kelapa sawit kemitraan, yaitu 1) sumberdaya alam (SDA-lahan, misalnya); 2) sumberdaya manusia (SDM-lengga kerja *skill* dan *non skill*); 3) dana/investasi; dan 4) teknologi/bekalan dengan per-kelapastawitan.

Dua sumberdaya yang pertama, yaitu SDA dan SDM (terutama tenaga kerja *non skill*) dimiliki oleh masyarakat, sedangkan dana dan teknologi dimiliki oleh perusahaan/investor, atau jika investor tidak menguasai teknologi, minimal bisa membeli teknologi tersebut untuk membangun kebun.

Jika empat sumberdaya yang dimiliki oleh dua pihak (investor dan masyarakat) dipadukan dan didukung oleh pemerintah, dalam hal ini penyediaan infrastruktur dan regulasi yang mendukung, maka pembangunan kebun kemitraan akan tenajud dengan baik. Dengan demikian peningkatan taraf ekonomi masyarakat akan dapat terangkat, dan membantu pemerintah dalam hal pengurangan angka kemiskinan.

2. Pengertian

Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) adalah sistem pembangunan kebun plasma yang dilakukan oleh kebun inti sebagai Bapak Angkat yang bekerjasama dengan instansi berbadan hukum (koperasi) dengan kesepakatan/penjanjian tertentu sehingga saling menguntungkan kedua belah pihak.

Tetapi karena tidak ada lagi program KKPA dari pemerintah (termasuk pendanaannya), maka kerjasama kemitraan bisa tenajud dengan mengambil pola KKPA, tetapi dengan pendanaan oleh perusahaan inti.

- Bersedia mematuhi peraturan di dalam kesepakatan bersama;
- Bersedia memberi kuasa kepada Koperasi untuk mengurus kerjasama dengan pihak perusahaan dan Bank.

7. Mekanisme Kerjasama

Antara perusahaan mitra dan masyarakat (melalui pemerintah desa setempat dan para tokoh-tokoh masyarakat) melakukan rencana kerjasama yang hasilnya dituangkan ke dalam Naskah Kesepakatan (MoU). Di dalam MoU ini disepakati porsi pembagian lahan untuk ini dan untuk plasma.

Setelah terjadi kesepakatan 'pembagian lahan' dengan persentase tertentu, perusahaan ini (sebagai Bapak Angka) melakukan pembangunan kebun di seluruh lahan yang menjadi rencana tapak kebun, tanpa melihat di mana rencana lahan ini dan di mana rencana lahan plasma. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan kebun bisa merata dengan kualitas pembangunan dan benih yang sama antara ini dan plasma.

Sambil menunggu perusahaan ini membangun kebun, masyarakat beserta dengan aparat desa dan tokoh-tokohnya menyiapkan pembuatan/pembentukan koperasi sebagai wadah untuk kerjasama dengan perusahaan ini nantinya. Jika di desa tersebut telah ada koperasi, maka masyarakat bisa menggunakan koperasi yang telah ada.

Setelah pembangunan kebun, maka antara perusahaan ini dengan koperasi menandatangani Surat Kesepakatan Bersama (SKB) yang diketahui Camat dan Bupati. Di dalam SKB ini dituangkan sistem kerjasama yang detail antara masing-masing pihak.

8. Penjelasan Secara Umum

a. Pembangunan Kebun

Pembangunan kebun umumnya diawali dengan terbitnya surat/keputusan IZIN dari Pemerintah untuk memperoleh lahan, meski lahan tsb berasal dari lahan milik.

Untuk mengangkat nilai sosial dan ekonomi masyarakat tempatan (sektor kebun), peningkatan kerjasama dan menjaga keamanan sejak proses perizinan, pembangunan kebun, pemeliharaan, panen dan proses produksi di PKS, maka perusahaan bermitra dengan masyarakat.

Pembangunan Kebun adalah dimulai dari pembukaan lahan, stacking, pembibitan, penanaman sampai pemeliharaan dan pemupukan dimana secara teknis seluruhnya dikerjakan oleh perusahaan ini.

b. Pemeliharaan Kebun

c. Konversi

Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dilakukan oleh perusahaan. Pemeliharaan ini dilakukan sampai dengan tanaman berumur 4 tahun atau sampai dengan tanaman layak untuk diserahkan kepada petani. Setelah itu baru dilakukan konversi kepada petani peserta melalui koperasi.

Setelah kebun diserahkan kepada petani peserta, dan tanaman telah menghasilkan, maka pemeliharaan selanjutnya dilakukan oleh perusahaan dengan biaya ditanggung oleh petani yang diambil sebagian dari hasil penjualan TBS.

Konversi adalah proses pengalihan hak kebun dari perusahaan ini ke masyarakat pemilik melalui koperasi, setelah kebun dinilai memenuhi persyaratan teknis dan bisa dilepas kepada petani. Biasanya setelah kebun berumur 4 tahun.

Sebelum kebun dikonservasikan kepada petani pemilik, perlu dilakukan persiapan menuju proses konversi. Proses ini disebut sebagai Pra Konversi, yaitu proses persiapan pengalihan hak kebun dari perusahaan ini ke masyarakat pemilik melalui koperasi, dimana persiapan administrasi untuk persyaratan kredit, mengurus reko-mendasi teknis dan mengurus legalitas (alas hak) atas kepemilikan lahan bagi masyarakat/koperasi. Selama masa Pra Konversi (di dalam 4 tahun), jika kebun telah menghasilkan buah pasir maka TBS menjadi milik perusahaan ini. Pelaksanaan konversi yang harus dipenuhi, antara lain :

- Legalitas Koperasi : Sebagai persyaratan pengikatan di notaris, koperasi harus menyiapkan legal-las seperti Akte Pendirian, SIUP, SITU, TDP, NPWP, Laporan Keuangan, dll.
- Umur Tanaman : Umur tanaman yang layak untuk dilakukan konversi adalah 4 tahun.
- Kondisi Tanaman : tanaman yang siap untuk dikonservasikan adalah yang telah memenuhi standar untuk Konversi.
- Pantapan Pagu Kredit (Unit Cost) : Adalah pantapan beban hutang petani atas investasi pembangunan kebun, dengan satuan rupiah per hektar atau rupiah per kapling. Perhitungan besaran ini ditentukan oleh Konsultan Independen dari hasil telaahan di lapangan.
- Pantapan CPP : Calon Petani Paserta (CPP) ditetapkan oleh SK Bupati, dengan mekanisme usulan dari bawah. Usulan dari desa, diketahui Camat dan kemudian disahkan oleh Bupati.

d. Pengembalian Kredit/Pinjaman

- RKO : Kebun diserahkan kepada petani, tetapi perawatan kebun tetap dilakukan oleh perusahaan, dengan terlebih dahulu dibuat Rencana Kerja Operasional (RKO) yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan biaya ditanggung oleh petani.
- Sertifikat Alas Hak : Sertifikat bisa berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama petani paserta atau bisa juga Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama koperasi. Sertifikat tersebut dijadikan sebagai agunan untuk pinjaman petani/koperasi kepada lembaga keuangan (bank) atau perusahaan (jika perusahaan sebagai penyandang dana).

Pemotongan 30% dari penjualan TBS setiap bulan ini dimaksudkan untuk pembayaran bunga dan pokok pinjaman sampai dengan lunas.

- Pengembalian Kredit/Pinjaman : Adalah pengembalian pinjaman petani peserta, yang diturus secara kolektif oleh koperasi dengan cara pemotongan ± 30% dari penjualan TBS setiap bulan sampai dengan lunas.
- Pengembalian Sertifikat : Jika pinjaman petani telah lunas, dan atas hak berbentuk SHM, maka sertifikat diserahkan kepada petani pemiliknya, dan jika dalam bentuk HGU atas nama koperasi, maka sertifikat HGU dikembalikan kepada koperasi (jika secara kolektif petani sudah lunas pinjamannya).

9. Pembagian Ini : Plasma

- Umur lahan yang telah ada tanaman, baik kelapa, pinang, sawit, atau lainnya, porsi pembagian adalah 50 : 50 (50% ini dan 50% plasma/petani)
- Lahan yang masih berupa hutang/semak/bekas, porsi pembagian adalah 70 : 30 (70% untuk perusahaan ini dan 30% untuk plasma/petani).
- Lahan milik masyarakat yang sebelumnya terpisah-pisah antara pemilik satu dengan lainnya, setelah dilakukan pengukuran, pembagian dan penyerahan lahan akan direlokasi dalam satu hamparan kebun plasma. Sehingga mempermudah pengawasan, perawatan dan pemeliharaan terdapat kebun plasma tersebut.

Handwritten signature/initials